



RPJPD

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

TAHUN 2025 - 2045 KABUPATEN NATUNA





BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat terkini, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

- Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah dalam hal ini Kabupaten Natuna adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Natuna;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Natuna adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
11. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045;
12. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (Agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045;
13. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan

menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045;

14. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah;
15. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
16. Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang;
17. Arah Pembangunan adalah komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
18. Indikator Utama Pembangunan adalah ukuran keberhasilan pencapaian arah pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD mempedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Natuna.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- d. BAB IV : VISI DAN MISI KABUPATEN NATUNA
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
- Dan
- f. BAB VI : PENUTUP

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 5

Perubahan RPJPD dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 NOPEMBER 2024



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 NOPEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 49

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 3.34/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Natuna hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat Undang-Undang, maka Kabupaten Natuna wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan mempedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RTRW Kabupaten Natuna. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 28



DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-7
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
2.1.1 Geografi	II-2
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.1.1.2 Letak Astronomis dan Geografis	II-5
2.1.1.3 Kondisi Topografi	II-5
2.1.1.4 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah	II-7
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-8
2.1.1.6 Lingkungan Hidup	II-8
2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung KLHS	II-9
2.1.1.8 Kebencanaan	II-17
2.1.1.9 Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	II-17
2.1.1.10 Ketahanan kebutuhan dasar masyarakat	II-18
2.1.2 Aspek Demografi	II-19
2.1.2.1 Kondisi Kependudukan	II-19
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-23
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-24
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-24
2.2.1.2 Inflasi	II-26
2.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia	II-27
2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan.....	II-29
2.2.1.5 Indeks Gini	II-31
2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-32
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-34
2.3 ASPEK DAYA SAING	II-38
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-38
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-41
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-45
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-48
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-52
2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA 2005 – 2025	II-54
2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	II-60
2.6.1 Proyeksi Penduduk	II-61
2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana	II-63
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-67
2.7.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna	II-67
2.7.1.1 Karakteristik Spasial Kabupaten Natuna	II-67
2.7.1.2 Perkembangan Spasial Kabupaten Natuna	II-67
2.7.1.3 Pola Ruang Kabupaten Natuna	II-71
2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Natuna	II-84
2.7.3 Kedudukan Kabupaten Natuna Kawasan Strategis Nasional	II-85
2.7.4 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	II-88
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	 III-1
3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.2 ISU-ISU STRATEGIS	III-12
3.2.1 Isu Strategis Internasional	III-12
3.2.2 Isu Strategis Nasional	III-17
3.2.3 Isu Strategis Daerah	III-21
3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Natuna	III-26



BAB IV	VISI DAN MISI KABUPATEN NATUNA	IV-1
4.1	VISI KABUPATEN NATUNA	IV-2
4.2	SASARAN VISI KABUPATEN NATUNA	IV-6
4.3	MISI KABUPATEN NATUNA	IV-9
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGGA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 – 2045	V-1
5.1.1.	Arah Pembangunan dan <i>Game Changer</i> Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045	V-7
5.2	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 – 2045	V-16
5.2.1.	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera	V-16
5.2.2.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas	V-17
5.2.3.	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan	V-18
5.2.4.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan Kesiambungan Pembangunan yang Adaptif	V-18
5.2.5.	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu	V-19
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1
6.2	MANAJEMEN RISIKO	VI-2
6.3	KERANGKA PENGENDALIAN	VI-3
6.4	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	VI-3



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-4	4
Tabel II.2	Banyaknya Pulau yang berada di Kabupaten Natuna	II-5	5
Tabel II.3	Sebaran Topografi dan Kelerengan Kabupaten Natuna	II-6	6
Tabel II.4	Ketinggian Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-6	6
Tabel II.5	Karakteristik Jenis Tanah di Kabupaten Natuna	II-7	7
Tabel II.6	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-8	8
Tabel II.7	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023	II-17	17
Tabel II.8	Capaian Indeks Ketahanan Pangan dan Air Baku Tahun 2018-2023	II-18	18
Tabel II.9	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-20	20
Tabel II.10	Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-21	20
Tabel II.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	II-22	22
Tabel II.12	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%)	II-26	26
Tabel II.13	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023	II-27	27
Tabel II.14	Kemiskinan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-30	30
Tabel II.15	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (Milyar Rupiah)	II-38	38
Tabel II.16	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)	II-39	39
Tabel II.17	PDRB per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-40	40
Tabel II.18	Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023	II-42	42
Tabel II.19	Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023	II-43	43
Tabel II.20	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023	II-46	46
Tabel II.21	Kondisi Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-47	47
Tabel II.22	Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022	II-47	47
Tabel II.23	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-50	50
Tabel II.24	Skala interval Otonomi Fiskal	II-52	52
Tabel II.25	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Natuna, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	II-53	53
Tabel II.26	Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Natuna, Tahun 2019-2023	II-54	54
Tabel II.27	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Natuna pada Periode RPJPD 2005-2025	II-55	55
Tabel II.28	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja RPJPD	II-55	55



	Kabupaten Natuna Tahun 2005– 2025		
Tabel II.29	Proyeksi Penduduk Kabupaten Natuna, Tahun 2025-2045	II-61	61
Tabel II.30	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Natuna, Tahun 2025-2045	II-62	62
Tabel II.31	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Natuna 2025-2045	II-62	62
Tabel II.32	Proyeksi Kebutuhan Listrik Natuna, 2025-2045	II-63	63
Tabel II.33	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Natuna, 2025-2045	II-64	64
Tabel II.34	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Natuna, 2005-2045	II-65	65
Tabel II.35	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Natuna, 2025-2045	II-65	65
Tabel II.36	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Natuna	II-66	66
Tabel II.37	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Natuna	II-66	66
Tabel II.38	Alokasi Pola Ruang Kawasan Budidaya	II-72	73
Tabel II.39	Alokasi Pola Ruang Kawasan Lindung	II-73	73
Tabel II.40	Kinerja RTRW Kabupaten Natuna	II-75	75
Tabel II.41	Sebaran Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Natuna	II-88	89
Tabel III.1	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Natuna (km) Tahun 2021-2022	III-7	6
Tabel III.2	Persebaran kepadatan penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2023	III-7	7
Tabel III.3	Keterkaitan Permasalahan Pokok dan Permasalahan RPJPD Kabupaten Natuna	III-11	10
Tabel III.4	Keterkaitan Isu RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045	III-22	21
Tabel III.5	Keterkaitan Isu KLHS RPJPD dengan Permasalahan dan Isu RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045	III-24	22
Tabel III.6	Keterkaitan Isu global, Isu Provinsi Kepulauan Riau, Isu Strategis Kabupaten Natuna dan Faktor Penentu	III-28	27
Tabel IV.1	Perwujudan Visi Kabupaten Natuna 2025-2045	IV-2	2
Tabel IV.2	Perumusan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045	IV-4	4
Tabel IV.3	Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045	IV-7	8
Tabel IV.4	Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Natuna	IV-9	9
Tabel V.1.	Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Arah Kebijakan pada tiap tahapan RPJPD	V-6	6
Tabel V.2.	Arah Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045	V-8	8
Tabel V.3	Kebijakan Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	V-9	9
Tabel V.4	Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan IUP beserta baseline (2025) dan proyeksi (2045)	V-21	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	I-5	4
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Natuna	II-3	3
Gambar II.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-9	9
Gambar II.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-19	19
Gambar II.4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-21	21
Gambar II.5	Piramida Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-23	23
Gambar II.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%) dengan Migas	II-24	24
Gambar II.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%) Tanpa Migas	II-25	25
Gambar II.8	Inflasi di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2022 (%)	II-27	27
Gambar II.9	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-28	28
Gambar II.10	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan nasional Tahun 2023	II-28	28
Gambar II.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%)	II-29	29
Gambar II.12	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2023 (%)	II-30	30
Gambar II.13	Indeks Gini Kabupaten Natuna Tahun 2005-2022	II-31	31
Gambar II.14	Indeks Gini Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023 dan Perbandingan Antar Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan nasional Tahun 2023	II-32	32
Gambar II.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)	II-32	33
Gambar II.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Perbandingan Antar Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional (%)	II-33	34
Gambar II.17	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023	II-35	35
Gambar II.18	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2018 - 2023	II-35	35
Gambar II.19	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023	II-36	36
Gambar II.20	Indeks Pembangunan Pemuda	II-37	37
Gambar II.21	Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-38	38
Gambar II.22	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023	II-41	41
Gambar II.23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2021-2022	II-44	44
Gambar II.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023	II-44	44
Gambar II.25	Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023	II-45	45
Gambar II.26	Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023	II-46	46
Gambar II.27	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-50	50
Gambar II.28	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023	II-51	51
Gambar II.29	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023	II-51	51
Gambar II.30	Angka Kriminalitas Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023	II-52	52
Gambar II.31	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022	II-53	53



Gambar II.32	Evaluasi RPJPD Kabupaten Natuna Setiap Tahapan RPJPD 2005-2025	II-56	56
Gambar II.33	Peta Rupa Bumi Kabupaten Natuna	II-67	67
Gambar II.34	Hirarki/Struktur Tata Ruang Kota Di Kabupaten Natuna	II-69	69
Gambar II.35	Agenda Nasional Di Wilayah Kabupaten Natuna Sesuai Arahan RPJMN (2020-2024)	II-70	70
Gambar II.36	Arahan RTRW Provinsi Kepulauan Riau terkait pengembangan wilayah Kabupaten Natuna	II-70	70
Gambar II.37	Indikasi Arahan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna	II-71	71
Gambar II.38	Grafik Alokasi Pola Ruang di Kabupaten Natuna	II-72	72
Gambar II.39	Grafik Alokasi Pola Ruang Lindung di Kabupaten Natuna	II-73	73
Gambar II.40	Peta Pola Ruang Kabupaten Natuna	II-73	74
Gambar II.41	Kedudukan Geografis Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	II-86	86
Gambar II.42	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	II-87	87
Gambar II.43	Peta Sebaran Kawasan Strategis Kabupaten Natuna	II-90	90
Gambar III.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Natuna	III-2	2
Gambar III.2	Kerangka Logis Isu Strategis Kabupaten Natuna	III-12	11
Gambar III.3	Megatren Global 2045	III-12	12
Gambar III.4	Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”	III-18	17
Gambar III.5	17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	III-20	19
Gambar IV.1	Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Natuna 2025-2045	IV-3	3
Gambar IV.2	Penyelarasan Misi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna	IV-12	12
Gambar V.1	Tema Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Natuna	V-1	1



BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Natuna, merupakan wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis sebagai gugusan pulau di Laut Cina Selatan. Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan keindahan alamnya dengan pantai eksotis, terumbu karang memukau, dan hutan hujan tropis yang melimpah. Secara strategis, Natuna juga dikenal sebagai pusat perikanan penting, menyediakan sumber daya laut berlimpah. Keragaman budaya, dipengaruhi oleh variasi etnis dan kebudayaan melayu yang kental, sehingga memberikan dimensi dan warna dalam kearifan lokal yang menjadi keistimewaan Kabupaten Natuna. Selain itu, Natuna memiliki batas wilayah yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Hal ini memiliki kepentingan strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab III, Pasal 5, Ayat (1), RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bab 1, Pasal 1, Ayat (25), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pembangunan Kabupaten Natuna selama dua puluh tahun dilaksanakan melalui dokumen RPJPD Kabupaten Natuna 2005-2025 yang dijabarkan dalam empat tahapan RPJMD. Pada saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025. Dalam menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah dengan berakhirnya tahapan RPJPD 2005-2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna perlu menyusun dokumen RPJPD periode selanjutnya. Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Natuna harus menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045. Perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045, Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan



RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan tersusunnya RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah serta memperkuat stabilitas kawasan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Selaras dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJPD Kabupaten Natuna selama dua puluh tahun pembangunan kedepan menitikberatkan pada tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan. Dengan diperkuat landasan transformasi yang terdiri 2 (dua) agenda yaitu agenda supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi serta agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kemudian kerangka implementasi dengan 3 (tiga) agenda yaitu agenda mewujudkan pembangunan kewilyahan yang merata dan berkualitas; agenda mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta agenda mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Perumusan RPJPD Kabupaten Natuna berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa yang akan datang. RPJPD juga memberikan fokus pada tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif, memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan. Perencanaan ini bertujuan untuk mewujudkan Natuna sebagai kabupaten yang mandiri, berdaya saing, dan ramah lingkungan, dengan ketahanan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna menggunakan 2 (dua) kelompok pendekatan yakni:

- Pendekatan partisipatif**, artinya dalam penyusunan RPJPD ini melibatkan masyarakat dan stakeholder sebagai pemangku kepentingan;
- Pendekatan teknokratik**, artinya dalam penyusunan RPJPD ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Pendekatan politis**, artinya dalam penyusunan RPJPD ini dibahas bersama dengan DPRD; dan
- Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** artinya penyusunan RPJPD ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

yang melibatkan desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Selanjutnya dalam penyusunan substansi RPJPD Kabupaten Natuna dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu

- 1) **Holistic-tematik**, perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Integrative**, dalam penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan focus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan; dan
- 3) **Spasial**, penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan..

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi ke Provinsi Kepulauan Riau, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJPD oleh DPRD, evaluasi pemerintah Pusat, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

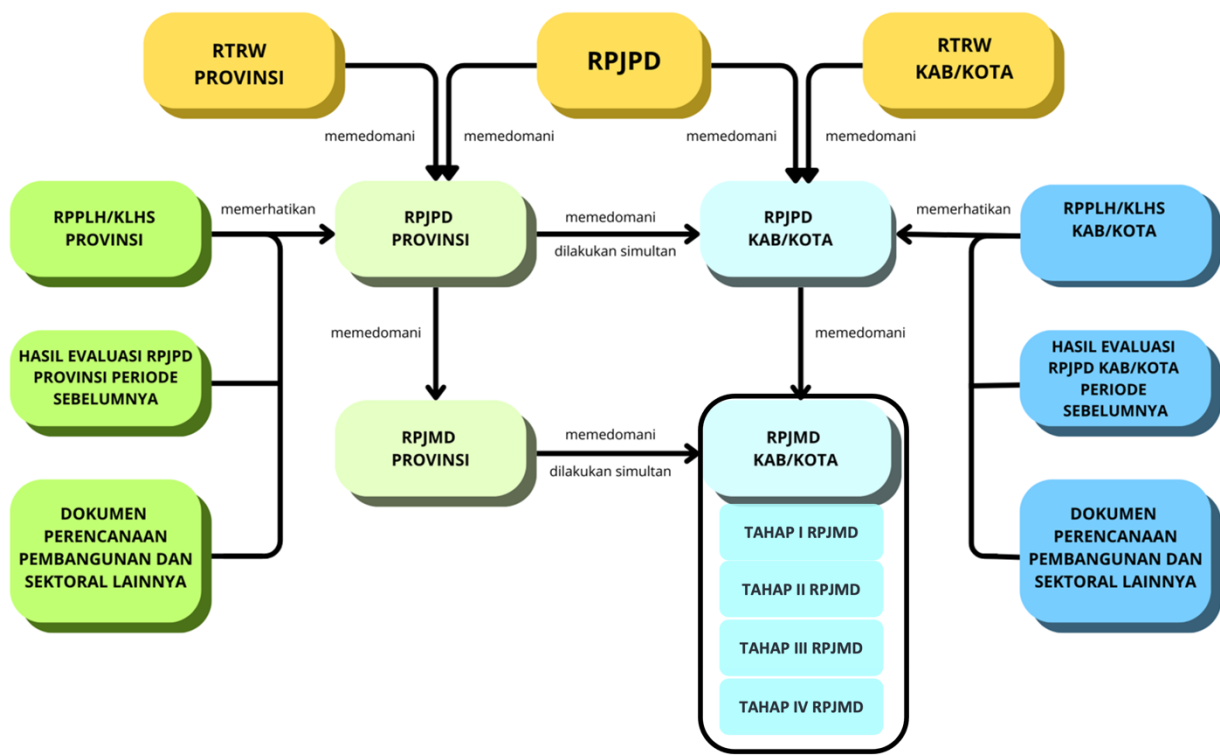
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Panjang Jangka Pembangunan Nasional 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042 Tahun 2017);
 7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2022);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5 Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.



Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan
Gambar I.1

Berikut diuraikan hubungan antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW dan KLHS.

a. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Natuna dan RPJPN

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN tertuang visi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD perlu memedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Kabupaten Natuna. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-



isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 perlu memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Natuna dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau

RPJPD Kabupaten Natuna perlu memedomani RPJPD Provinsi Kepulauan Riau untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Natuna

Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna harus memerhatikan RTRWD Kabupaten Natuna. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Natuna

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Natuna memiliki hubungan yang integral dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. RPJPD, yang mencakup periode 20 tahun, berperan sebagai arah dan pedoman strategis untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan, mencakup tujuan besar yang ingin dicapai hingga 2045. Sementara itu, RPJMD disusun setiap lima tahun sebagai tahapan implementatif dari RPJPD, menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi dan tantangan aktual pada periode tertentu. RPJMD menerjemahkan kebijakan jangka panjang ke dalam program dan kegiatan konkret yang lebih terukur, dengan fokus pada pemenuhan target-target pembangunan dalam jangka menengah. Dengan demikian, keterkaitan antara RPJPD dan RPJMD sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memastikan setiap program berjalan konsisten menuju pencapaian visi dan tujuan jangka panjang Natuna.

e. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS RPJPD Kabupaten Natuna

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menyatakan bahwa KLHS harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Sehingga KLHS mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Memahami bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam 20 tahun, yang mana dalam penyusunan dokumen perencanaan harus memenuhi 2 (dua) prinsip yaitu berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan maka KLHS harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan strategis yaitu RPJPD dan RPJMD. Sehingga dalam pelaksanaan RPJPD yang dijabarkan dalam RPJMD akan menggiring pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi *stakeholders* dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna dalam periode 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, dan RKPD atau dokumen perencanaan tahunan;
2. Memberikan arah pengembangan wilayah bagi pelaksana pembangunan daerah dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral; dan
3. Memberikan tolak ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Natuna.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan tentang gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Natuna RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisikan tentang hasil olahan dan analisis tentang permasalahan pembangunan berdasarkan data kinerja dan informasi pembangunan untuk mengidentifikasi permasalahan daerah. Kemudian berdasarkan hasil telaahan isu internasional/nasional, isu strategis Provinsi serta mempertimbangkan permasalahan yang ada maka diidentifikasi isu strategis Kabupaten Natuna.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Berisikan tentang penjelasan dan penjabaran visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Kemudian visi dan misi daerah perlu diselaraskan dengan visi dan misi pada tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Berisikan tentang arah pembangunan dan arah kebijakan serta sasaran pokok sebagai upaya yang harus dicapai dalam pembangunan 20 tahun yang dibagi dalam 4 tahapan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik kekhasan Kabupaten Natuna

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kaidah pelaksanaan, manajemen risiko, kerangka pengendalian dan pembiayaan pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan penyusunan rencana untuk mengarahkan dan mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Esensi perencanaan pembangunan daerah mencakup berbagai aspek yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan dengan pijakan analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah untuk kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Natuna menyajikan kondisi capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum namun tetap komprehensif dengan tahun analisis disesuaikan dengan perencanaan pembangunan pada periode yang telah diselesaikan. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang merupakan perencanaan pembangunan dengan periode pembangunan 20 tahun, yang dimana terdapat berbagai kebijakan yang akan dirumuskan dalam dokumen ini memiliki hierarki tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal tersebut menjadikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus memiliki relevansi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan hingga mewujudkan harapan masyarakat pada akhir periode pembangunan yakni tahun 2045.

Rujukan analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna yang dicantumkan pada gambaran umum berisikan potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah pada berbagai aspek seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD periode sebelumnya serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman capaian pembangunan dengan basis data 20 tahun terakhir (5 tahunan sesuai periode pembangunan jangka menengah). Sehingga dari capaian pembangunan tersebut mampu memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada tahun akhir, perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Natuna.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kedua aspek ini yaitu aspek geografi dan demografi sangat memiliki keterkaitan yang kuat. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Natuna.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Natuna baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Natuna.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

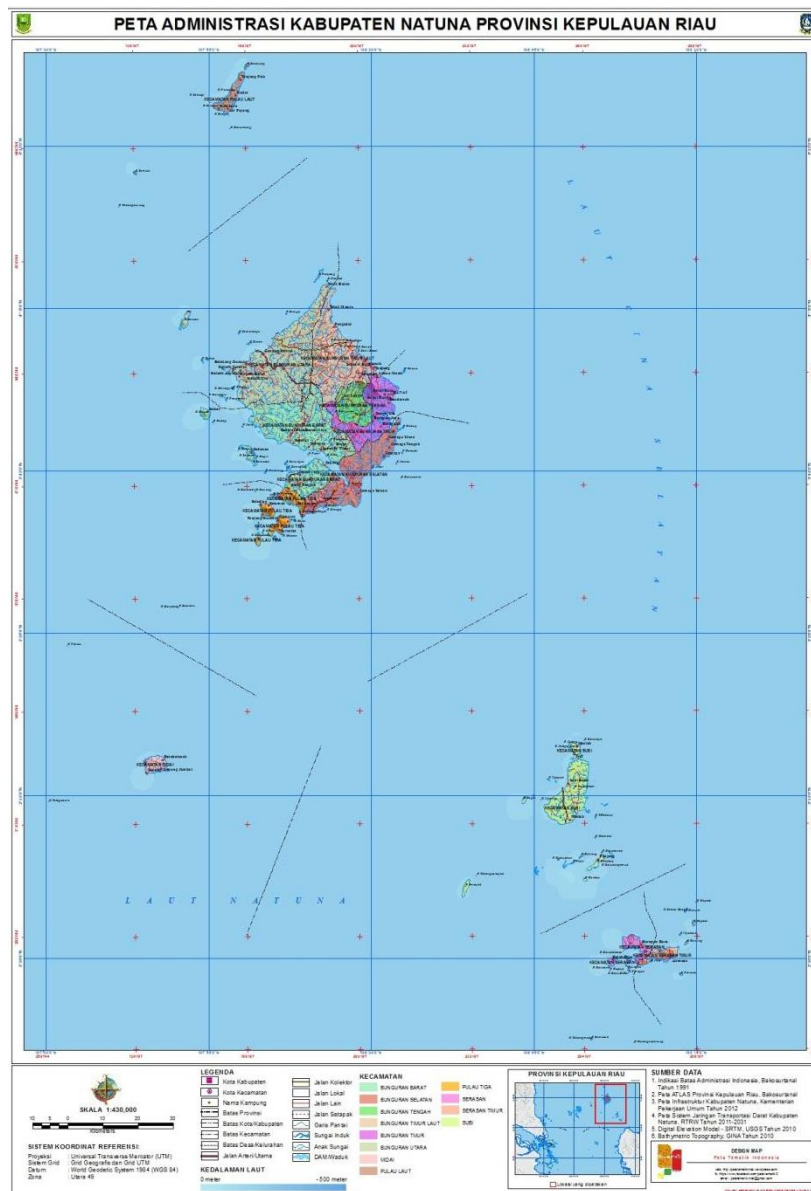
Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan, Korea dan Jepang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Sindu Galba dan Abdul Kadir Ibrahim (2000) menyebut sebagai pintu gerbang bagi negara tetangga, seperti: Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Natuna Utara;
- b. Sebelah Timur : Laut Natuna Utara;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan;
- d. Sebelah Barat : Semenanjung Malaysia.

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah mencapai 264.145,56 km² dengan rincian 262.167,07 km² perairan (lautan) dan 1.978,49 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Menurut data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau di Kabupaten Natuna, dengan 27 Pulau (17,53 %) yang berpenghuni dan 127 pulau (82,44 %) tidak berpenghuni. Dari semua kecamatan, Kecamatan Serasan memiliki jumlah pulau terbanyak yang belum berpenghuni yaitu 30 pulau. (23,62 % dari pulau belum berpenghuni). Pulau-pulau yang ada dapat dikelompokkan dalam 2 gugusan :

- a. Gugusan Pulau Natuna, terdiri atas pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut dan Pulau Tiga.
- b. Gugusan Pulau Serasan, terdiri atas pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.



Gambar II.1

Peta Administrasi Kabupaten Natuna

Sumber: Natuna Dalam Angka Tahun 2024, BPS Kabupaten Natuna

Berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 Kabupaten Natuna dibentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau dan meliputi enam kecamatan yaitu kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan, serta satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Natuna, wilayah kecamatan kemudian dimekarkan sehingga pada tahun 2004 jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut. Pada tahun 2007 wilayah Natuna dimekarkan lagi menjadi 16 kecamatan.

Kemudian berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, dibentuklah Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Natuna yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 7 Kecamatan di gugusan pulau Anambas. Sedangkan Natuna terbagi atas 12 kecamatan yakni dengan dengan



penambahan kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, dan Serasan Timur.

Kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 10 Desember 2014 dibentuklah 3 kecamatan baru diwilayah Kabupaten Natuna. Tiga kecamatan ini adalah Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai. Dengan begitu wilayah Kabupaten Natuna terdiri atas 15 Kecamatan pada tahun 2016. Kemudian berdasarkan Perda Kabupaten Natuna Nomor 13 tahun 2021 tanggal 9 November 2021 dibentuklah kemacatan baru untuk menunjang pemerintahan Kabupaten Natuna dalam mencapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Natuna yang diberikan nama Kecamatan Pulau Panjang. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.1-1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau pada tanggal 9 Desember 2022 memberikan nama serta pengkodean untuk pemekaran dari kecamatan di Kabupaten Natuna yaitu Seluan. Dan hingga tahun 2023 wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari 17 Kecamatan dengan wilayah terbesar berada di daerah Bunguran Utara sebesar 398,09 km², sedangkan untuk kawasan terkecil berada di daerah Pulau Panjang dan Pulau Seluan masing-masing sebesar 7,12 km² dan 7,08 km².

Tabel II.1
Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
Midai	Sabang Barat	13,77	0,70
Suak Midai	Batu Belanak	12,42	0,63
Bunguran Barat	Sedanau	247,95	12,53
Bunguran Utara	Kelarik	398,09	20,12
Pulau Laut	Air Payang	37,58	1,90
Pulai Tiga	Sabang Mawang Barat	41,68	2,11
Bunguran Batubi	Batubi Jaya	214,45	10,84
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	17,38	0,88
Pulau Seluan	Seluan	7,08	0,36
Bunguran Timur	Ranai	148,77	7,52
Bunguran Timur Laut	Tanjung	298,97	15,11
Bunguran Tengah	Harapan Jaya	85,83	4,34
Bunguran Selatan	Cemaga	234,23	11,84
Serasan	Serasan	44,72	2,26
Subi	Subi	139,12	7,03
Serasan Timur	Arung Ayam	29,36	1,48
Pulau Panjang	Pulau Panjang	7,12	0,36
Kabupaten Natuna		1.978,49	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024



Mengacu pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 kecamatan terluas di Kabupaten Natuna adalah Kecamatan Bunguran Utara dengan persentase 20,12 persen, Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan persentase 15,11 persen sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pulau Panjang dan Pulau Seluan yang merupakan Kecamatan baru dari pemekaran pada tahun 2022.

2.1.1.2 Letak Astronomis dan Geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kabupaten Natuna terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan. Secara astronomis, Kabupaten Natuna secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 01016’ - 07019’ LU (Lintang Utara) dan 105000’- 110000 BT (Bujur Timur) . Di wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kecamatan Serasan sebanyak 30 pulau. Banyaknya pulau di Kabupaten Natuna seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2
Banyaknya Pulau yang berada di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Total Pulau
1	Midai	2
2	Suak Midai	-
3	Bunguran Barat	15
4	Bunguran Utara	14
5	Pulau Laut	8
6	Pulai Tiga	14
7	Bunguran Batubi	2
8	Pulau Tiga Barat	4
9	Pulau Seluan	2
10	Bunguran Timur	8
11	Bunguran Timur Laut	10
12	Bunguran Tengah	-
13	Bunguran Selatan	12
14	Serasan	30
15	Subi	11
16	Serasan Timur	10
17	Pulau Panjang	12
Jumlah Pulau		154

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

Dari data BPS Kabupaten Natuna diketahui terdapat data tambahan terkait dengan pulau yang berada di Kabupaten Natuna bahwa terdapat 154 pulau baik pulau yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Natuna cukup beragam. Sebagian besar daratan dari pulau-pulau yang berada di kabupaten ini memiliki topografi datar hingga landai. Namun juga terdapat bentang alam perbukitan dan gunung. Sedangkan untuk kelerengan seperti halnya topografi, kelerengan di



Kabupaten Natuna didominasi kelerengan yang tidak curam dengan persentase 0 – 8%. Sedangkan wilayah dengan kelerengan yang berkisar dari 15% hingga di atas 40% umumnya berada di wilayah perbukitan.

Tabel II.3
Sebaran Topografi dan Kelerengan Kabupaten Natuna

Jenis Topografi	Lereng (%)	Luas (Ha)	Skor
Datar	0 – 1	40.944	20
Agak datar	1 – 3	42.425	20
Berombak/Agak Landai	3 – 8	49.459	20
Bergelombang/Landai	8 – 15	31.877	40
Berbukit Kecil/Agak curam	15 – 25	6.325	60
Berbukit/Curam	25 – 40	18.710	80
Bergunung	>40	7.056	100
Terjal	>60	1.580	100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna, 2016

Ketinggian wilayah di kabupaten Natuna berkisar dari 0 meter hingga 1.035 meter di atas permukaan laut. Ada sekitar delapan gunung yang dapat ditemukan di Kabupaten Natuna. Gunung Ranai yang terletak di kecamatan Bunguran Timur Laut merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian mencapai 1.035 meter. Kawasan perbukitan dan gunung ini merupakan hulu dari sungai-sungai yang membelah daratan rendah di kabupaten Natuna. Kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah cukup rendah adalah kecamatan Subi dengan ketinggian maksimal hanya 10 meter di atas permukaan laut. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah kecamatan Bunguran Timur Laut yang di wilayahnya terdapat gunung Ranai. Berikut ini ketinggian wilayah di Kabupaten Natuna menurut kecamatan :

Tabel II.4
Ketinggian Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2023

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Midai	160
2	Suak Midai	410
3	Bunguran Barat	530
4	Bunguran Utara	198
5	Pulau Laut	200
6	Pulai Tiga	500
7	Bunguran Batubi	120
8	Pulau Tiga Barat	410
9	Pulau Seluan	260
10	Bunguran Timur	950
11	Bunguran Timur Laut	980
12	Bunguran Tengah	80
13	Bunguran Selatan	550
14	Serasan	370
15	Subi	58
16	Serasan Timur	360
17	Pulau Panjang	10

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling tinggi di Kabupaten Natuna yaitu kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu dengan ketinggian 980 Mdpl. Kemudian kecamatan yang paling rendah di Kabupaten Natuna yaitu Kecamatan Pulau Panjang dengan ketinggian di angka 10 Mdpl.

2.1.1.4 Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Hasil identifikasi Peta Tanah Semidetil Kabupaten Natuna skala 1:50.000 menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna didominasi oleh 7 jenis tanah. Berdasarkan luasannya, jenis tanah yang paling tersebar di Kabupaten Natuna adalah jenis tanah Podsolik. Karakteristik jenis tanah yang ada di Kabupaten Natuna sangat beragam antara lain sebagai berikut:

Tabel II.5
Karakteristik Jenis Tanah di Kabupaten Natuna

Jenis Tanah	Penyusun	Tekstur	Tingkat Drainase	KTK Tanah	Kejuhan Basa
Litosol	Bahan induk batugamping	Halus – sedang	Baik – agak cepat	Rendah	Tinggi
Aluvial	Endapan sungai	Agak halus – halus	Terhambat – sedang	Rendah – sedang	Rendah
Regosol	Endapan pasir	Pasir – Pasir berlempung	Cepat	Rendah	Tinggi
Kambisol	Endapan liat dan pasir – terumbu karang – batupasir batulanau – batupasir – batulanau bertufa	Agak halus – halus	Baik	Sedang	Rendah
Gleisol	Endapan sungai – endapan marin	Agak halus – halus	Terhambat – sangat terhambat	Sedang	Sedang – tinggi
Podsolik	Batuan sedimen batulanau	Halus	Baik	Sangat rendah	Rendah
Oksisol (Latosol)	Tanah tua yang mengalami pelapukan	Menyerupai pasir	Sedang – cepat	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, 2018

Tanah di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur umumnya terdiri dari jenis tanah latosol, alluvial, podsolik serta organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk batuan beku organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan organik. Jenis tanah podsolik dijumpai pada ketinggian antara 50 m hingga 350 m dpl, sedangkan jenis tanah organosol dijumpai pada daerah cekungan di belakang sungai utama yang merupakan daerah rawa dan pada umumnya tingkat kematangan hemik sampai saprik. Tanah yang terdapat di Kecamatan Serasan dan Midai umumnya terdiri dari jenis tanah gleisol, latosol, alluvial, litosol dan organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahan induk bahan organik (endapan pantai berupa pasir, kerikil dan sisa tumbuhan), batuan beku basa dan batuan vulkanik. Jenis tanah gleisol dijumpai di Pulau Subi besar yang berkembang dari bahan alluvium-koluvium yang terdiri dari endapan halus dan kasar (campuran) serta lumpur marin menempati satuan fisiografi pasangsurut dan pelebahan dengan bentuk wilayah datar.



2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten yang berada di pulau dengan iklim tropis mengalami dua musim dalam setahun, yaitu musim penghujan yang terjadi antara November hingga April, dan musim kemarau yang terjadi antara Mei sampai Oktober. Perubahan Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Dalam rentang musim penghujan yang terjadi di Natuna, ada musim yang populer di masyarakat Natuna terutama untuk kalangan nelayan yaitu musim angin utara. Pada bulan Januari s.d Februari bertiup angin utara dan timur laut dimana hujan turun sesekali dengan temperatur udara sedang. Lalu pada bulan Maret s.d April bertiup angin timur, dimana hujan sedikit dengan temperatur udara agak panas. Kemudian pada bulan Mei – Agustus bertiup angin barat, dimana hujan turun agak banyak dan temperatur udara tergolong sedang.

Tabel II.6

Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kabupaten Natuna Tahun 2023

No	Bulan	Suhu Rata-rata	Kelembaban (%)	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)	Kecepatan Angin (Knot)	Tekanan udara (mb)
1	Januari	26,50	88,70	12,3	23	45	5,50	1,009,20
2	Februari	27,00	87,30	8,0	21	58	5,70	1.009,80
3	Maret	27,40	85,40	9,4	15	65	5,40	1.010,50
4	April	29,20	82,10	2,4	9	88	2,50	1.008,60
5	Mei	30,30	83,80	7,1	18	89	2,10	1.009,20
6	Juni	29,10	86,80	16,2	22	66	1,80	1.008,90
7	Juli	27,70	90,30	12,0	19	53	2,00	1.009,30
8	Agustus	28,50	87,70	4,2	12	73	1,80	1.009,90
9	September	27,60	90,20	11,7	17	58	1,90	1.009,40
10	Oktober	28,00	88,60	9,5	17	78	2,00	1.010,50
11	November	27,70	90,10	17,3	23	54	2,50	1.009,40
12	Desember	28,00	89,60	11,7	23	56	3,70	1.009,80

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Natuna cukup bervariasi selama 2023. Jika melihat pada rata-rata kecepatan angin harian, angin bergerak kencang pada bulan Januari dan Februari, dan melambat di bulan Maret hingga Oktober lalu bergerak kencang kembali pada bulan November dan Desember. Kecepatan rata-rata harian angin mencapai 3 knot dengan maksimum 34 knot di titik tertinggi.

Penyinaran matahari di tahun 2023 terjadi cukup intens dengan rata-rata 58,00 persen per hari. Penyinaran matahari paling intens terjadi pada bulan April dengan nilai 77 persen. Di sisi lain, pada bulan Desember, lama penyinaran matahari sangat rendah, hanya sebesar 38 persen. Pada tahun 2023 hujan turun selama 215 hari, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau.

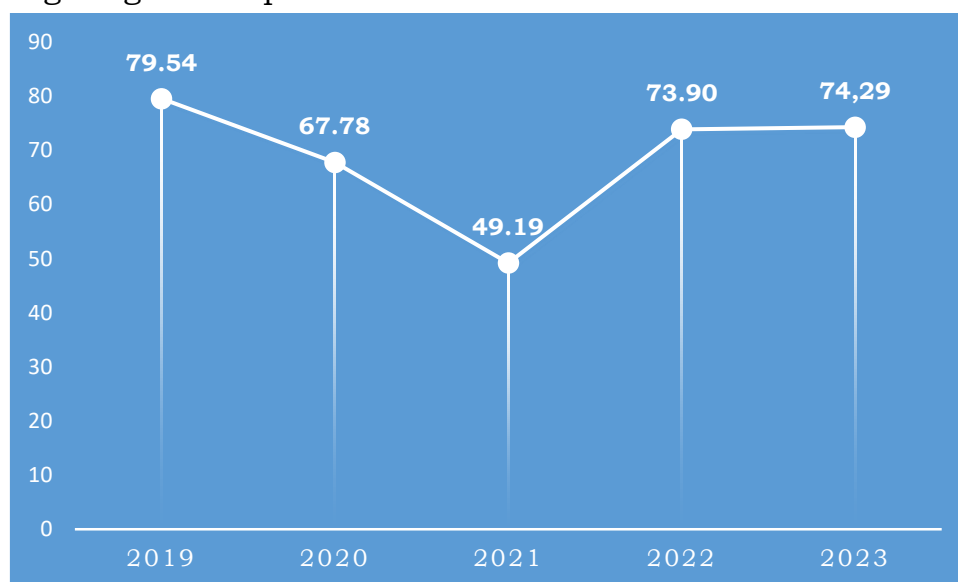
2.1.1.6 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Natuna dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun ijin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan

sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang.

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Natuna adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun kondisi IKLH Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 74,29 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,90. Tingginya aktivitas pertambangan dan penggalian di Kabupaten Natuna perlu menjadi perhatian dan pengawasan yang melekat sebagai upaya minimalisir degradasi kualitas lingkungan hidup.



Gambar II.2

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, 2024

2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung KLHS

Daya dukung dan daya tampung sering digunakan dalam kaitannya dengan analisis dampak lingkungan, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya. Dalam praktiknya, menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan ekologis, di mana manusia dan ekosistem dapat berdampingan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Natuna dijabarkan sebagai berikut:

a. Tekanan terhadap lingkungan

Daya dukung dan daya tampung ini salah satunya berfokus pada permasalahan kependudukan. Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 yaitu berjumlah 85.446 jiwa yang terdiri atas 43.924 jiwa penduduk laki-laki dan 41.522 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 105,78. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2018. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2022 mencapai 29.306 jiwa, dengan persentase sebesar 34,30 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Selanjutnya, data dukung dan daya tampung terkait permukiman. Pusat Kabupaten Natuna yakni di Ranai dan menjadi daerah utama pembangunan terutama perumahan, adapun luas kawasan permukiman yang ada saat ini sebesar 25.374,54 hektar atau 12,45% dari luas daratan Kabupaten Natuna, karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dan luas wilayah perkotaan. Lokasi permukiman tersebar di sepanjang pantai. Bila melihat persebaran permukiman transmigrasi. Pembangunan perumahan, Kabupaten Natuna menjadi sasaran utama para investor oleh karena mempunyai prasarana dasar yang relative lebih baik dan sumber daya alam berpotensi ekonomi tinggi.

Berbagai daerah di Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dengan perubahan fisik dari alami ke binaan secara besar-besaran, dan pemadatan penduduk. Tingginya aktivitas tersebut sebanding pula dengan hasil samping yang akan dihasilkan seperti limbah padat berupa sampah (organik dan anorganik) dan limbah cair serta hasil samping lainnya, yang perlu ditangani secara serius. Dengan demikian daerah - daerah tersebut menjadi kantung - kantung yang berbeda dengan daerah yang lain.

Sebagai konsekuensi pembangunan permukiman ini, sumber daya alami di Kabupaten Natuna umumnya sering kali menjadi ajang konflik antara sektor industri, pertanian dan permukiman. Di samping itu ada pula konflik sosial yang terjadi karena adanya perbedaan tingkat ekonomi antara permukiman terencana yang merupakan wilayah (domain) orang kota yang berpendapatan tinggi, dan cenderung berorientasi ke Kabupaten dan Provinsi bahkan Pusat dengan perkampungan setempat yang dipadati pekerja berpendapatan rendah, cenderung mengumuh dan mengalami kelangkaan air bersih serta prasarana lainnya. Konflik sosial yang timbul ini, bila tidak ditangani dengan benar, akan berdampak buruk terhadap kestabilan daerah. Suatu kenyataan bahwa secara keseluruhan kondisi permukiman, terutama di perkotaan, semakin lama semakin tidak nyaman dan aman bagi penghuninya, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dari sisi kesehatan, salah satu keberhasilan peningkatan kualitas hidup adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang



memadai. Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik tersebut tidaklah mudah, mengingat belum meratanya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna. Walaupun demikian, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus diupayakan sehingga dapat menyentuh sasaran secara adil. Cara yang dilakukan antara lain menyediakan pelayanan kesehatan di tempat yang mudah dijangkau, dengan harga yang relatif murah dan adil bagi setiap lapisan masyarakat. Sebagai indikator yang menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan Kabupaten Natuna, dilakukan kajian terhadap beberapa aspek seperti penurunan angka kematian bayi dan balita, peningkatan angka harapan hidup, serta peningkatan gizi balita.

Pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Natuna yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui sistem agribisnis. Data menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini masih sangat tergantung pada usaha pertanian. Terjadinya krisis ekonomi semakin menempatkan usaha pertanian sebagai bidang pembangunan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena telah sangat berperan dalam menyediakan bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta menyerap tenaga kerja bagi yang kehilangan pekerjaan. Pengembangan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan pada masa mendatang adalah sektor industri, meskipun kontribusi sektor industri di wilayah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan namun potensi untuk terus dikembangkan masih cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor ini yang cenderung meningkat beberapa tahun terakhir. Kegiatan sektor industri pengolahan di Kabupaten Natuna mencakup dua sub sektor yakni Industri Pengolahan Besar/Sedang dan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR). Dimana IKKR merupakan bagian terbesar dari sektor industri di kawasan ini dan banyak terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat serta Kecamatan Serasan.

Hasil dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Natuna meliputi minyak mentah dan gas bumi. Jumlah lifting minyak mentah mengalami peningkatan dari 4.773.443 barel pada 2017 menjadi 4.920.340 barel pada 2018. Selain terjadi peningkatan produksi terdapat pula kenaikan harga dari US\$49,49 menjadi US\$66,23. Semen-tar itu, nilai pendapatan kotor juga mengalami peningkatan dari US\$236.215.854 pada 2017 menjadi US\$325 897 894 pada 2018. Sama halnya dengan minyak mentah, gas bumi mengalami



penurunan jumlah produksi sebesar 10 persen, namun harga rata-rata gas bumi meningkat menjadi 10.44 US\$. Nilai pendapatan kotor gas bumi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 486.217.691 US\$.

Produksi listrik tertinggi berasal dari Kecamatan Bunguran Timur dengan nilai produksi selama setahun yaitu sebesar 27.882.824 yang berasal dari PLTD Ranai, sedangkan untuk produksi terendah berasal dari PLTD Tanjung Kumbik dan PLTD Kelarik. 27.882.824 yang berasal dari PLTD Ranai, sedangkan untuk produksi terendah berasal dari PLTD Tanjung Kumbik dan PLTD Kelarik.

Distribusi air bersih di kabupaten Natuna berjumlah sebesar 3.825.792 m³ dengan lebih dari 67% air didistribusikan ke pelanggan di kecamatan Bunguran Timur, hal ini didukung dengan jumlah pelanggan yang ada di Bunguran Timur yang terdiri dari 6.024 pelanggan, dimana jumlah ini merupakan 83,5% dari total pelanggan yang ada di Kabupaten Natuna.

Secara administratif Kabupaten Natuna terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yang letaknya tersebar pada beberapa pulau dengan demikian untuk mengefektifitaskan pembangunan antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya penyediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi sangat penting guna mempercepat aksesibilitas antar kawasan. Pada saat ini untuk melayani dan memudahkan aksesibilitas digunakan 3 (tiga) macam transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara.

Jumlah wisatawan di Kabupaten Natuna pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut terjadi baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Natuna sejalan dengan peningkatan jumlah objek wisata dan jumlah kunjungan pada tahun 2023. Objek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah wisata bahari yaitu sebanyak 56.632 kunjungan sepanjang tahun 2023. Hal ini dikarenakan Kabupaten Natuna memiliki banyak pantai yang menarik dan eksotis sehingga menarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata bahari.

Limbah B3 yang terdapat di Kabupaten Natuna baik organik maupun anorganik bersumber dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan penggantian pada mesin penggerak baik itu kendaraan transportasi darat maupun transportasi laut dan pelayanan kesehatan yaitu dari Rumah sakit, puskesmas, dan klinik maupun rumahrumah makan. Selain itu limbah B3 juga berasal dari rumah tangga, seperti batu baterai bekas, lampu (neon dan bolam) bekas, sisa obat-obatan, dan accu bekas, dimana pengelolaan limbah B3 sampai saat ini belum dapat dikelola dan ditangani dengan baik oleh instansi terkait dan hanya dikelola secara tradisional oleh masyarakat seperti dibakar atau ditimbun. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang cukup serta belum adanya

perusahaan yang mendapat izin untuk penyimpanan sementara limbah B3.

b. DDDT lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem

Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Sistem klasifikasi Jasa Lingkungan tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Diasumsikan semakin tinggi Jasa Lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian. Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi lingkungan yang terutama didalamnya adalah yaitu: 1) Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*); 2) Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*); 3) Layanan/fungsi budaya (*cultural services*); 4) Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*).

c. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah Kabupaten Natuna terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Berdasarkan data tersebut yang diperoleh kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Natuna, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta rekomendasi penanganan risiko bencana.

Risiko Bencana Banjir

Kabupaten Natuna terdapat tiga kelas bahaya yang signifikan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Luasan total wilayah yang masuk dalam kelas bahaya rendah mencapai 3.962,61 Hektar. Sementara itu, luasan kelas bahaya sedang mencapai 5.134,41 Hektar, dan kelas bahaya tinggi memiliki luasan yang paling luas, mencapai 15.227,28 Hektar.

Banjir Bandang

Kabupaten Natuna memiliki sebaran kelas bahaya rendah-tinggi. Total luasan pada kelas bahaya rendah mencapai 3.913,92 Ha, sedangkan untuk kelas bahaya sedang mencapai 3.167,01 Ha dan untuk kelas bahaya tinggi mencapai 8.072,64 Ha.

Tanah Longsor

Kabupaten Natuna ditemukan bahwa terdapat variasi dalam kelas bahaya, meliputi tingkat rendah hingga tinggi. Luasan total pada kelas bahaya rendah mencapai 31.882,86 Hektar, sedangkan kelas bahaya sedang mencakup luasan sekitar 84,24



Hektar, dan kelas bahaya tinggi memiliki luasan mencapai 1.795,68 Hektar

Kekeringan

Potensi penduduk terpapar bencana kekeringan di Kabupaten Natuna, kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling banyak, yaitu Kecamatan Bunguran Timur sebanyak 27.914 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling sedikit, yaitu Kecamatan Pulau Seluan sebanyak 824 jiwa. Berdasarkan hasil analisis, maka kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Natuna memiliki kelas kerentanan rendah sedang. Dimana kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah yaitu, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kecamatan Bunguran Selatan, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu, Kecamatan Bunguran Batubi, Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Pulau Seluan, Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kebakaran Hutan Dan Lahan

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna memiliki kelas kerentanan sedang-tinggi. Dimana kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu, Kecamatan Bunguran Tengah, Pulau Seluan, Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kelas kerentanan tinggi yaitu, Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Batubi, Bunguran Selatan, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan Kecamatan Bunguran Utara.

Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim (angin puting beliung) di Kabupaten Natuna, kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling banyak, yaitu Kecamatan Pulau Tiga sebanyak 2.489 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling sedikit, yaitu Kecamatan Bunguran Batubi sebanyak 23 jiwa. Berdasarkan hasil analisis, maka risiko Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) di Kabupaten Natuna memiliki kelas kerentanan rendah-sedang. Dimana kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah yaitu, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kecamatan Bunguran Selatan, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu, Kecamatan Bunguran Batubi, Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Pulau Seluan, Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat. Berdasarkan hasil analisis, maka kerentanan Bencana Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) di Kabupaten Natuna memiliki kelas kerentanan rendah-sedang. Dimana kecamatan yang memiliki kelas kerentanan rendah yaitu, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kecamatan Bunguran Selatan, sedangkan untuk kecamatan

yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu, Kecamatan Bunguran Batubi, Bunguran Tengah, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Pulau Seluan, Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Gelombang Ekstrim Dan Abrasi

Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Natuna, kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling banyak, yaitu Kecamatan Bunguran Timur sebanyak 3.300 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar paling sedikit, yaitu Kecamatan Bunguran Selatan sebanyak 82 jiwa.

Berdasarkan hasil analisis, maka kerentanan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Natuna memiliki kelas kerentanan sedang-tinggi. Dimana kecamatan yang memiliki kelas kerentanan sedang yaitu, Kecamatan Bunguran Batubi sedangkan untuk kecamatan yang memiliki kelas kerentanan tinggi yaitu, Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Selatan, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Pulau Seluan, Pulau Tiga dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Kajian ini mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya. Secara harfiah efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip keefisiensi artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah yang cukup besar, terdiri dari wilayah darat dan laut serta jumlah penduduk sebanyak 84.560 jiwa (BPS Kabupaten Natuna, 2023) membentuk suatu ekosistem kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Keanekaragaman bentang alam dan luasnya wilayah ini memberi potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah bagi Kabupaten Natuna yang berupa sumber daya hutan, perkebunan, bahan galian/tambang, perikanan, sumber daya air dan pariwisata.

- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi (IPCC, 2007). Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana, seperti kebakaran lahan, erosi,

abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (Smit & Wandel, 2006). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNPB (2023), Kabupaten Natuna memiliki indeks kapasitas adaptasi yang sedang-rendah (Tabel 3.68). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana di Kabupaten Natuna, maka Kabupaten Natuna dapat melakukan penyesuaian dan berusaha untuk kembali pada keadaan semula, sebelum terjadi bencana. Kapasitas adaptasi Kabupaten Natuna perlu ditingkatkan sehingga dapat dengan cepat melakukan penyesuaian dan kembali pada keadaan semula sebelum terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan indikasi adanya infrastruktur yang terbentuk dari alam untuk melindungi dan mencegah beberapa bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam di wilayah tersebut mampu menjadi pelindung terhadap bencana, dan sebaliknya.

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Jasa Lingkungan Biodiversitas sebagai vegetasi lahan hutan memiliki potensi yang tinggi untuk keanekaragaman hayati.

Kabupaten Natuna memiliki jasa ekosistem relatif sedang dengan luasan

kategori jasa ekosistem sedang adalah kelas dengan luasan terbesar yaitu mencapai 48% seluas 94.574,63 Ha, sementara luasan kelas ekosistem sangat tinggi yang dimiliki Kabupaten Natuna seluas 23.514,01 Ha. Keberagaman topografi di Kabupaten Natuna bervariasi dari datar sampai pegunungan yang ditentukan oleh perbedaan tinggi tempat ini mendukung keanekaragaman hayati yang khas pada masing-masing wilayah Kecamatan. Bagian wilayah Kabupaten Natuna yang kaya akan keanekaragaman hayati salah satunya di hutan lindung Hutan Gunung Ranai seluas 2.654,40 Ha



yang berada di Kecamatan Bunguran Timur, wilayah yang banyak memiliki tutupan lahan berupa vegetasi umumnya juga akan memiliki keanekaragaman flora-fauna tinggi.

2.1.1.8 Kebencanaan

Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerugian dan penderitaan secara luas, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Bencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Beberapa contoh bencana meliputi gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan pandemi. Bencana alam umumnya terjadi karena proses alamiah seperti perubahan tektonik, aktivitas vulkanik, atau cuaca ekstrem. Sementara itu, bencana yang disebabkan oleh manusia dapat melibatkan kesalahan teknologi, kecelakaan industri, konflik bersenjata, atau aktivitas manusia yang merusak lingkungan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna telah tercatat mengalami kejadian bencana meliputi: Banjir 38 kejadian; tanah longsor 3 kejadian; kebakaran hutan dan lahan 44 kejadian; cuaca ekstrem (angin puting beliung) 15 kejadian dan abrasi 2 kejadian.

Dalam penghitungan indeks risiko bencana, menggunakan pendekatan *hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu feno-mena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selanjutnya *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2015 hingga 2023 indeks resiko bencana tidak mengalami perubahan dimana capaiannya berada pada angka 112,4.

Tabel II.7

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia BNPD Tahun 2023

2.1.1.9 Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah aspek penting dalam pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tertib. RTRW berfungsi sebagai panduan untuk penggunaan lahan yang optimal, memastikan bahwa setiap ruang digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti kawasan permukiman, industri, pertanian, dan konservasi lingkungan. Dengan mengikuti RTRW, pemerintah daerah dapat menghindari konflik penggunaan lahan yang sering terjadi, seperti pembangunan industri di area pertanian atau permukiman di kawasan rawan



bencana. Ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mencegah degradasi lingkungan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pemanfaatan ruang sesuai RTRW di Kabupaten Natuna sudah dilaksanakan beberapa tahun yang dihitung dengan indikator persentase pemanfaatan Ruang sesuai RTRW yang mencapai 81,98 dari tahun 2015 hingga 2021. Kemudian ditahun 2022 dan 2023 meningkat capaiannya menjadi 100 persen. Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan lahan juga dapat dilihat dari persentase alih fungsi lahan yang mencapai 0,18 persen dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam pembangunan fisik yang sesuai dengan RTRW dalam pembangunan Kabupaten Natuna.

2.1.1.10 Ketahanan kebutuhan dasar masyarakat

Ketahanan pangan, energi, dan air adalah tiga pilar utama yang saling berkaitan dan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Ketahanan pangan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang aman dan bergizi untuk hidup sehat. Ini melibatkan produksi pangan yang berkelanjutan, distribusi yang efisien, dan aksesibilitas yang adil. Tanpa ketahanan pangan, masyarakat rentan terhadap malnutrisi, kesehatan yang buruk, dan ketidakstabilan sosial. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan sering kali melibatkan dukungan kepada petani, peningkatan teknologi pertanian, dan kebijakan yang mendorong distribusi makanan yang merata. Selain ketahanan pangan, ketahanan energi dan air juga sangat penting. Ketahanan energi memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang berkelanjutan dan andal ke sumber energi yang cukup untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan pembangunan ekonomi. Sumber energi yang stabil diperlukan untuk menjalankan infrastruktur penting, seperti transportasi, kesehatan, dan industri. Di sisi lain, ketahanan air memastikan ketersediaan air bersih untuk minum, sanitasi, pertanian, dan industri. Tanpa air yang cukup, produksi pangan tidak mungkin dicapai, kesehatan masyarakat terancam, dan konflik atas sumber daya air dapat meningkat. Oleh karena itu, integrasi strategi ketahanan pangan, energi, dan air adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan resilien. Ketersediaan pangan, energi dan air di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada indeks ketahanan pangan, indeks ketahanan energi dan indeks ketahanan air yang terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.8

Capaian Indeks Ketahanan Pangan dan Air Baku Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan pangan	54,75	57,26	55,7	57,64	57,86	59,15
Indeks Ketahanan Air (ketersedian air baku)	0,0535	0,0545	0,0545	0,0545	0,1445	0,1445

Sumber: Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan data diatas, capaian tahun 2023 Indeks Ketahanan energi Kabupaten Natuna mencapai sebesar 673,912. Kemudian pada indeks ketahanan pangan Kabupaten Natuna pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami

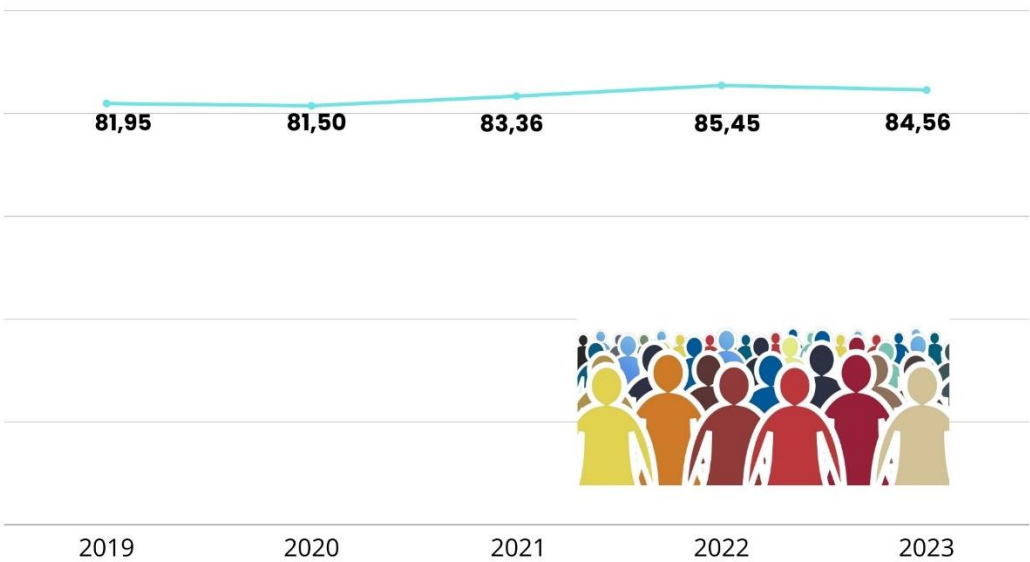
perkembangan positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks ketahanan pangan ditahun 2021 mencapai 57,64, ditahun 2022 mencapai 57,86 dan ditahun 2023 mencapai 59,15.

2.1.2 Aspek Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Natuna mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Ini melibatkan pemantauan pertumbuhan penduduk, distribusi usia, tingkat urbanisasi, dan struktur demografis lainnya. Pengetahuan tentang demografi penduduk membantu pemerintah setempat dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, pemahaman tentang demografi dapat memberikan wawasan terkait dengan tenaga kerja, potensi ekonomi, serta tantangan dan peluang pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Natuna. Analisis demografi yang komprehensif menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan dinamika populasi setempat.

2.1.2.1 Kondisi Kependudukan

Kondisi kependudukan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari jumlah penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi kependudukan Kabupaten Natuna dapat dianalisis dengan melihat pada tabel di bawah ini.



Gambar II.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2019-2024



Pada tahun 2023 Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk 84.561 ribu penduduk. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni sebesar 69.003 jiwa. Kecamatan di Kabupaten Natuna dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Bunguran Timur sebesar 29,08 ribu jiwa. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi tahun 2023 ada pada kecamatan Midai yakni sebesar 265,07 jiwa per km², sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,58 jiwa per km². Persentase distribusi penduduk pada tahun 2023 tertinggi ada pada Kecamatan Bunguran timur yaitu 34,39 persen.

Tabel II.9
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Midai	3,72	3,60	3,66	3,72	3,65
2.	Suak Midai	1,82	1,74	1,75	1,77	1,73
3.	Bunguran Barat	8,05	7,85	8,01	8,18	8,07
4.	Bunguran Utara	4,76	4,52	4,63	4,74	4,69
5.	Pulau Laut	2,39	2,32	2,35	2,38	2,33
6.	Pulai Tiga	3,74	3,73	3,84	3,96	3,94
7.	Bunguran Batubi	4,05	3,88	3,91	3,94	3,83
8.	Pulau Tiga Barat	2,14	2,11	2,14	2,18	2,15
9.	Pulau Seluan*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Bunguran Timur	26,91	27,81	28,52	29,31	29,08
11.	Bunguran Timur Laut	5,51	5,37	5,52	5,69	5,65
12.	Bunguran Tengah	3,80	3,68	3,79	3,92	3,92
13.	Bunguran Selatan	3,34	3,35	3,46	3,58	3,58
14.	Serasan	5,37	5,27	5,38	5,51	5,44
15.	Subi	3,04	3,06	3,13	3,21	3,18
16.	Serasan Timur	3,30	3,20	3,27	3,35	3,31
17.	Pulau Panjang**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kabupaten Natuna		81,95	81,50	83,36	85,45	84,56

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

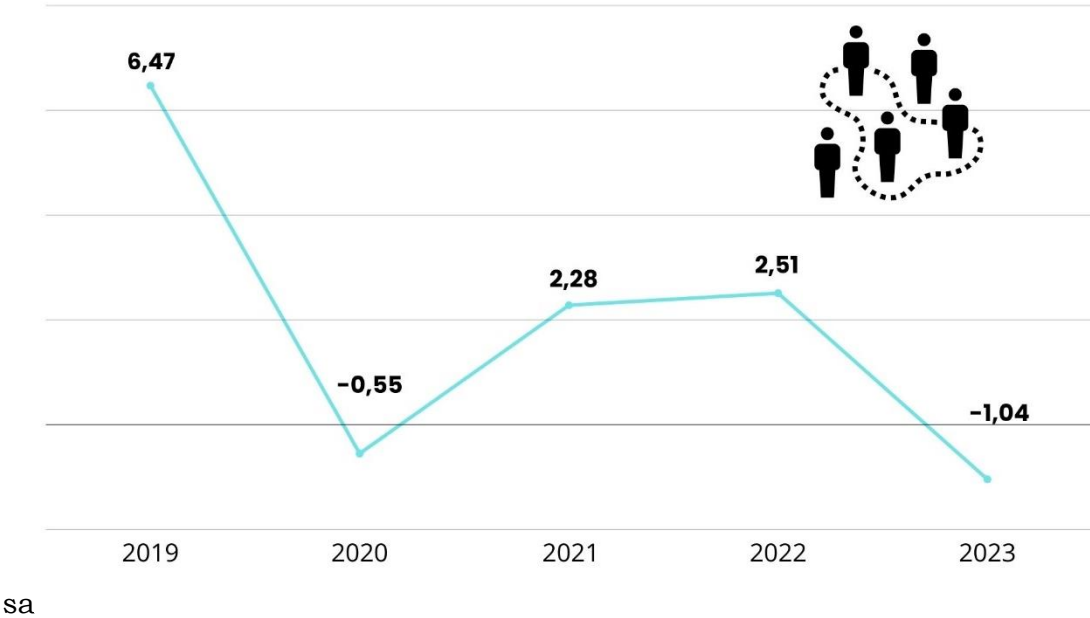
Rasio jenis kelamin di Kabupaten Natuna secara umum mengalami fluktuasi dengan pola menurun dimana pada tahun 2023 sebesar 105,86 yang mengindikasikan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (dari 100 perempuan terdapat 105-106 penduduk laki-laki). Adapun rasio jenis kelamin tertinggi pada tahun 2023 di Kabupaten Natuna berada di kecamatan Bunguran Selatan sebesar 119,95 dan terendah berada di kecamatan Subi dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,63.



Tabel II.10
Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna
Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Midai	3,65	4,32	265,07	103,34
Suak Midai	1,73	2,05	139,29	104,50
Bunguran Barat	8,07	9,54	32,55	106,58
Bunguran Utara	4,69	5,55	11,58	108,95
Pulau Laut	2,33	2,76	62,00	101,90
Pulai Tiga	3,94	4,66	94,53	111,19
Bunguran Batubi	3,83	4,53	17,86	109,40
Pulau Tiga Barat	2,15	2,54	123,71	103,50
Pulau Seluan*	NA	NA	NA	NA
Bunguran Timur	29,08	34,39	195,47	103,42
Bunguran Timur Laut	5,65	6,68	18,90	106,80
Bunguran Tengah	3,92	4,64	45,67	106,38
Bunguran Selatan	3,58	4,23	15,28	119,95
Serasan	5,44	6,43	121,65	106,26
Subi	3,18	3,76	21,75	100,63
Serasan Timur	3,31	3,91	112,74	107,13
Pulau Panjang**	NA	NA	NA	NA
Kabupaten Natuna				
2023	84,56	100,00	42,74	105,86
2020	81,50	100,00	41,19	105,77
2015	74,52	100,00	37,24	106,37

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024
Ket: * data masih bergabung dengan Kec. Bunguran Utara
** data masih bergabung dengan Kec. Subi



Gambar II.4
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2019-2024



Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pada pertumbuhan penduduk di atas, menggunakan perhitungan dari data Kabupaten Natuna dalam Angka. Pada tahun 2023, terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Natuna dimana capaian pertumbuhan penduduk menurun dari 2,51 persen menjadi -1,04 persen pada tahun 2023. Berikut jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Natuna :

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Ribu Jiwa)

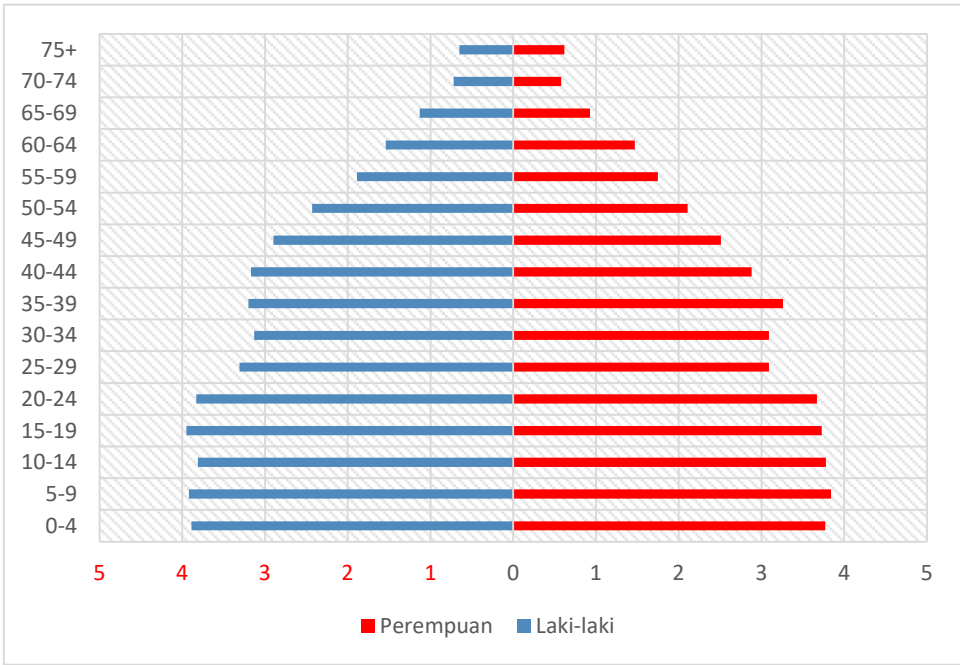
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	3,89	3,77	7,66
5-9	3,92	3,84	7,75
10-14	3,81	3,78	7,59
15-19	3,95	3,73	7,68
20-24	3,83	3,67	7,50
25-29	3,31	3,09	6,40
30-34	3,13	3,09	6,23
35-39	3,20	3,26	6,46
40-44	3,17	2,88	6,05
45-49	2,90	2,51	5,42
50-54	2,43	2,11	4,54
55-59	1,89	1,75	3,65
60-64	1,54	1,47	3,01
65-69	1,13	0,93	2,06
70-74	0,72	0,58	1,30
75+	0,65	0,62	1,27
Total	43,48	41,08	84,56

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

Sebanyak 84,56 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Natuna, sebagian besar dihuni oleh penduduk berusia 0-39 tahun sebanyak 57,27 ribu jiwa. Penduduk rentang usia tersebut mendominasi sekitar 67,71 persen. Jika mengacu pada klasifikasi generasi menurut Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Generasi *Baby Boomers* (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau *millennials* (Kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi *Alpha* (Kelahiran 2013-2025) ditemukan bahwa generasi di Kabupaten Natuna didominasi oleh Generasi Y atau *millennials*, Gen Z, dan Gen *Alpha*. Selain itu, persentase penduduk produktif (15-64 tahun) juga mendominasi sebesar 67,40 persen dari total penduduk. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang tinggi. Kondisi ini

merupakan peluang bagi Kabupaten Natuna untuk memanfaatkan penduduk usia produktif untuk guna akselerasi pembangunan Kabupaten Natuna.

Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).



Gambar II.5
Piramida Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

Dari piramida penduduk Kabupaten Natuna didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Natuna memiliki cukup banyak penduduk usia muda namun sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun penduduk usia tua juga meningkat di jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas namun masih menjadi minoritas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesehatan masih menjadi perhatian penting dalam pemerataan pembangunan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan mewujudkan angka harapan hidup yang lebih berkualitas.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023.

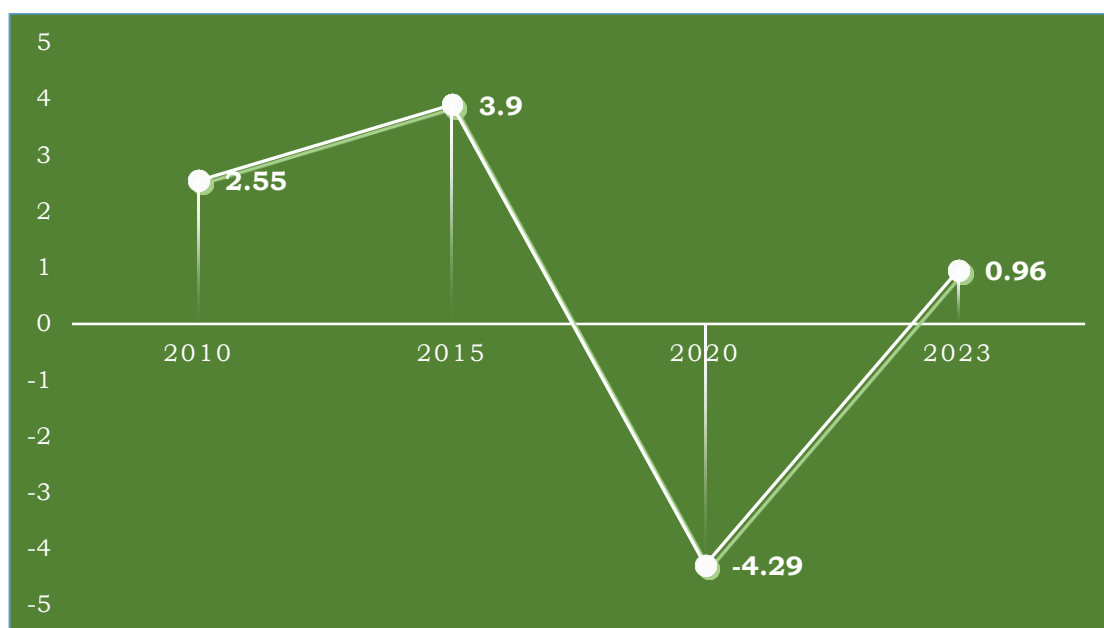
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. Gambaran Perekonomian daerah di Kabupaten Natuna memberikan pemahaman yang berkaitan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, PDRB Per Kapita, laju inflasi, dan tingkat kemiskinan.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Lebih jelasnya, perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.



Gambar II.6

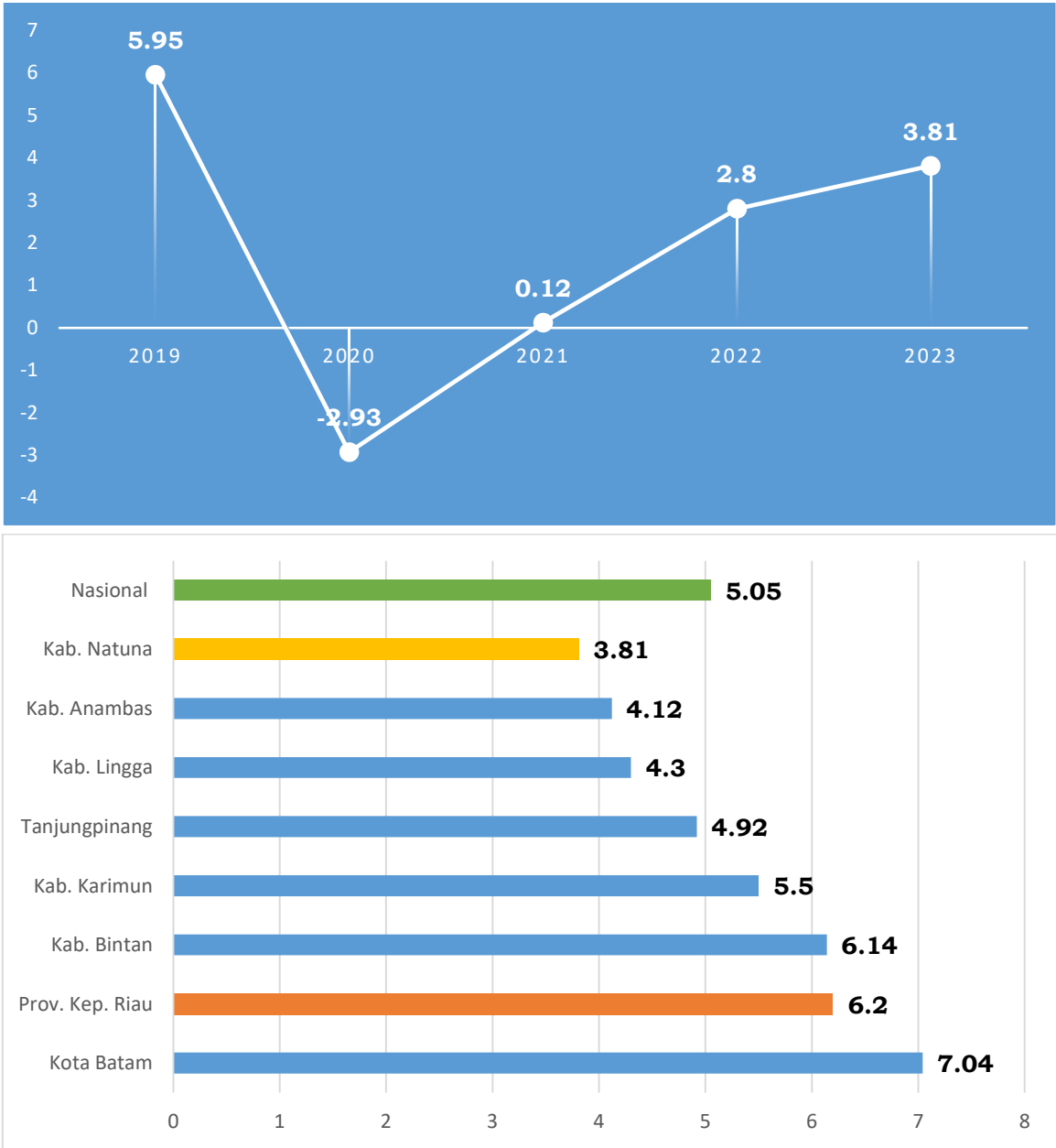
**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%)
dengan Migas**

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2011-2024

Mengacu pada grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi bersifat



fluktuasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna sebesar 5,88 pada tahun 2010, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 3,90 persen. Terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 menjadi -4,29 persen sebagai efek terjadinya Pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna kembali menguat pada tahun 2023 menjadi 0,96 persen sebagai dampak pemulihan dan penanganan pasca Pandemi COVID-19 hingga saat ini.



Gambar II.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna dengan Kota/Kabupaten se-Kepulauan Riau Tahun 2023 (%) Tanpa Migas

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2024

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2019 memiliki capaian 5,59 persen hingga menjadi -2,93 persen pada tahun 2020. Penurunan di tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang memukul produktivitas beberapa sektor perekonomian daerah. Adapun pencapaian pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0,12 persen menjadi 3,81



persen. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi non migas di Kabupaten Natuna masih tertinggal bila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna masih jauh di bawah capaian provinsi sebesar 6,20 persen dan capaian nasional sebesar 5,05 persen.

Dengan melihat lebih dalam lagi beberapa sektor yang cukup berkembang dalam beberapa tahun terakhir yaitu pengadaan listrik dan gas, konstruksi dan transportasi dan pergudangan. Kemudian pada sektor pertanian juga meningkat ditahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini diperkuat dengan capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupten Natuna mencapai sebesar 100. Dengan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	-2,38	1,63	3,28	3,98
2	Pertambangan dan Penggalan	0,20	-4,82	-0,02	-0,96	-0,22
3	Industri Pengolahan	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,16	1,49	0,39	3,17	6,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,57	3,75	8,43	3,32	3,43
6	Konstruksi	7,87	-5,06	-4,52	0,51	5,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	-4,75	1,83	4,71	3,82
8	Transportasi dan Pergudangan	6,48	-22,09	1,12	11,74	5,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	-5,05	4,31	3,75	3,67
10	Informasi dan Komunikasi	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
12	Real Estate	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
13	Jasa Perusahaan	3,33	-8,13	1,19	8,23	1,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	2,49	-1,58	2,45	0,73
15	Jasa Pendidikan	4,52	-0,36	4,46	3,11	0,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	-0,95	6,01	3,61	1,02
17	Jasa lainnya	2,84	-0,40	0,31	3,60	4,91
Produk Domestik Regional Bruto (dengan Migas)		1,75	-4,29	0,02	0,11	0,96
Produk Domestik Regional Bruto (tanpa Migas)		5,95	-2,93	0,12	2,80	3,81

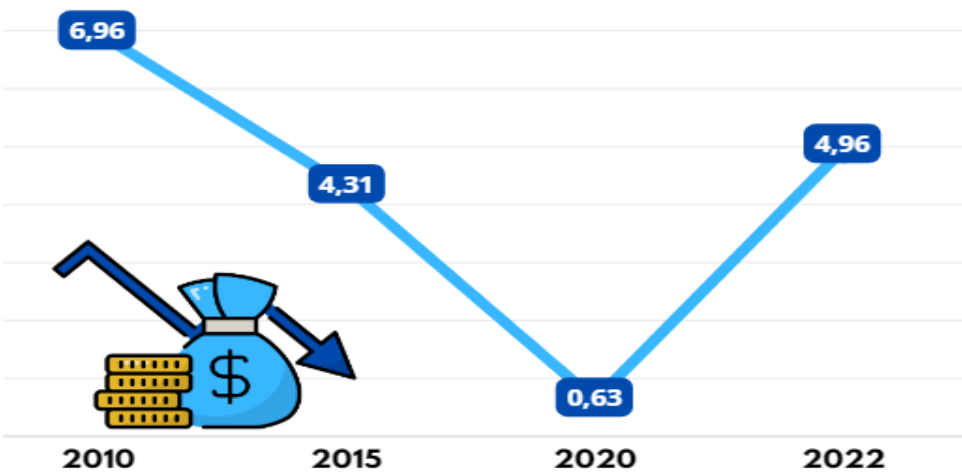
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2024

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat

pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi *policy makers* dalam mengendalikan inflasi daerah.

Inflasi Kabupaten Natuna bergerak menurun dari tahun 2010 sampai 2022 seiring stabilitas harga barang dan jasa. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 6,96 persen selanjutnya menurun di tahun 2015 menjadi 4,31 persen. Kemudian inflasi kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 0,63 persen dan pada tahun 2021 menjadi 0,42 persen. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Natuna mengalami inflasi hingga 4,96 persen. Secara umum dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang sebelumnya, pola menurun terjadi pada inflasi Kabupaten Natuna yang mengindikasikan adanya kestabilan harga mulai terjaga, namun pada tahun-tahun terakhir angka inflasi kembali meningkat hingga 4,96 persen di tahun 2022.



Gambar II.8
Inflasi di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2022 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2022

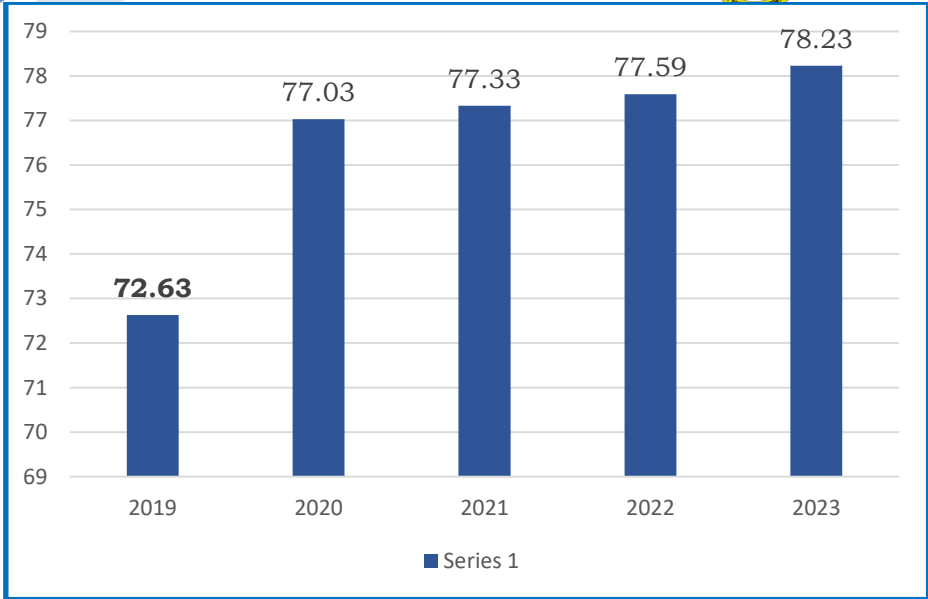
2.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma dimana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Tabel II.13
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023

Indikator	2005	2010	2015	2020	2023
Rata-rata Lama Sekolah	6,90	7,06	8,45	8,73	9,08
Harapan Lama Sekolah	NA	12,33	13,85	13,9	13,93
Umur Harapan Hidup	67,90	61,97	63,64	73,57	74,15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	604,1	12957,63	13611,67	14.762	15.409

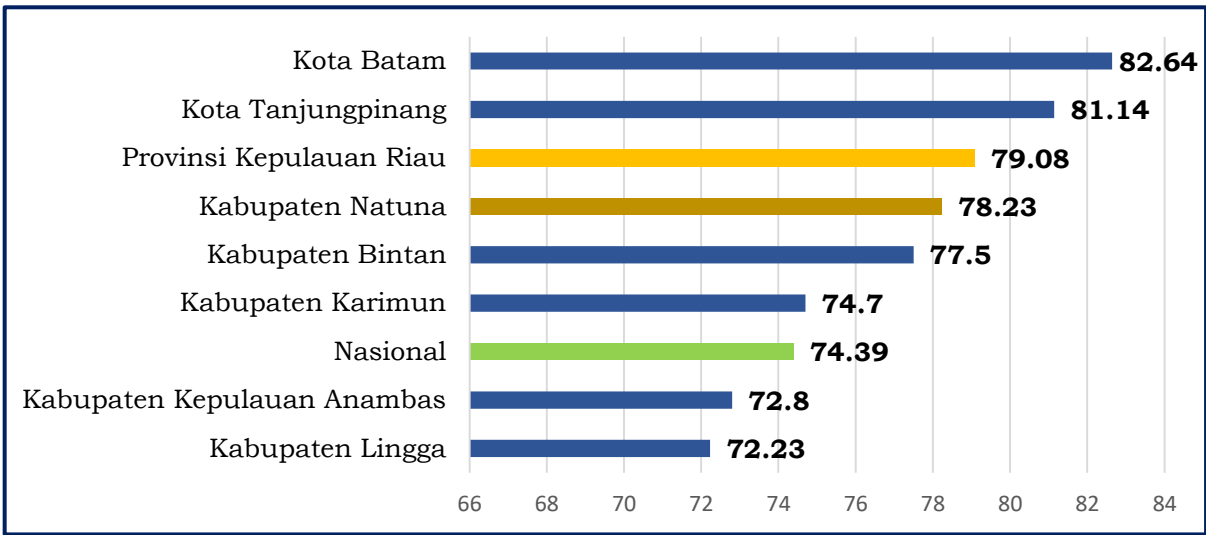
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2005-2023



Gambar II.9
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2023

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Natuna apabila dilihat dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan dari tahun 2010-2023. Pada tahun 2005, IPM Kabupaten Natuna sebesar 68,40 dan IPM Kabupaten Natuna menurun menjadi 66,29 di tahun 2010. Penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan formula dan metodologi perumusan IPM.

Selanjutnya, pada pembangunan hingga 2015, IPM kembali meningkat menjadi 70,87, IPM pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 77,03 dan pada tahun 2023 angka IPM meningkat menjadi 78,23. Peningkatan IPM di Kabupaten Natuna didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (Rata-rata lama sekolah sebesar 9,08 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,93 tahun, angka harapan hidup 74,15 tahun, pengeluaran per kapita sebesar 15.409 ribu rupiah/tahun/kapita).



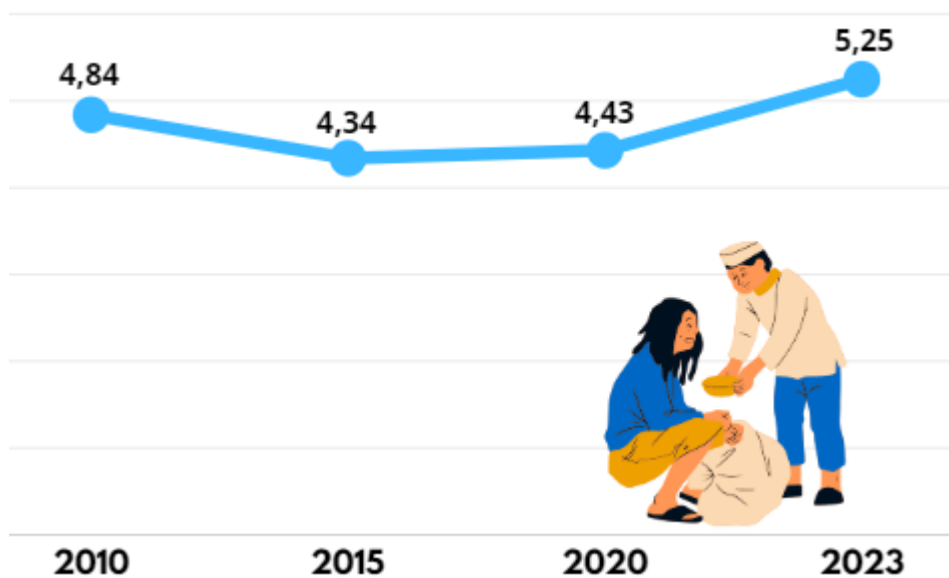
Gambar II.10
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan nasional Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2023

Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan wilayah sekitar dan Provinsi Kepulauan Riau, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Natuna sebesar 78,23 berada tepat di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,08 dan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam (82,64) dan Kota Tanjungpinang (81,14). Capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Natuna juga melampaui capaian nasional yang sebesar 74,39.

2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang multidemisional karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna untuk senantiasa berupaya menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.



Gambar II.11
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2023

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan pada rentang tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2010 berada pada angka 4,84 persen kemudian terjadi penurunan menjadi 4,34 persen pada tahun 2015. Terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 4,43 persen dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 5,25 persen. Peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Natuna selaras dengan komponen penyusunannya dimana juga terjadi peningkatan pada garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan.



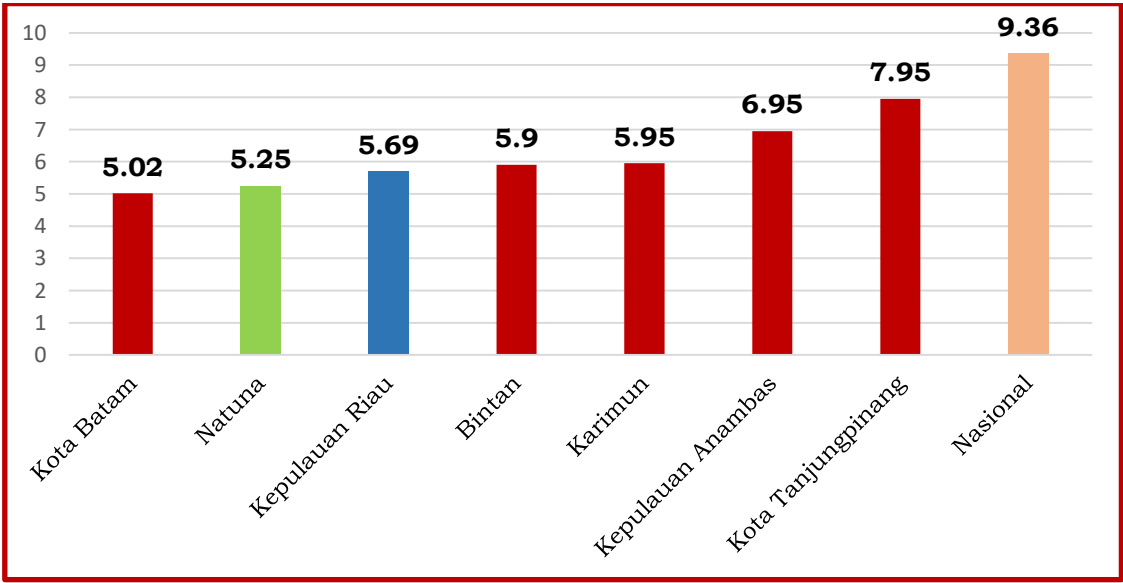
Perlunya pemerintah Kabupaten Natuna menekan peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna.

Tabel II.14
Kemiskinan di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	4,42	4,43	4,95	5,32	5,25
a. Garis Kemiskinan (Rupiah)	378.573	408.164	420.503	449.302	480.103
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	3,43	3,47	3,98	4,32	4,30
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,49	0,40	0,44	1,06	0,70
d. Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,05	0,07	0,25	0,14

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2023

Jika dilihat dalam waktu lima tahun terakhir, kemiskinan Kabupaten Natuna mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sempat mencapai angka 4,42 persen dan meningkat menjadi 5,25 persen di tahun 2023. Adapun puncak angka kemiskinan pada lima tahun terakhir berada pada tahun 2022 yang mencapai 5,32 persen. Meskipun mengalami kenaikan, namun secara perbandingan wilayah, kemiskinan Kabupaten Natuna masih cukup baik dibandingkan wilayah sekitarnya dimana Kabupaten Lingga yang memiliki kemiskinan tertinggi hingga mencapai 11,26 persen.

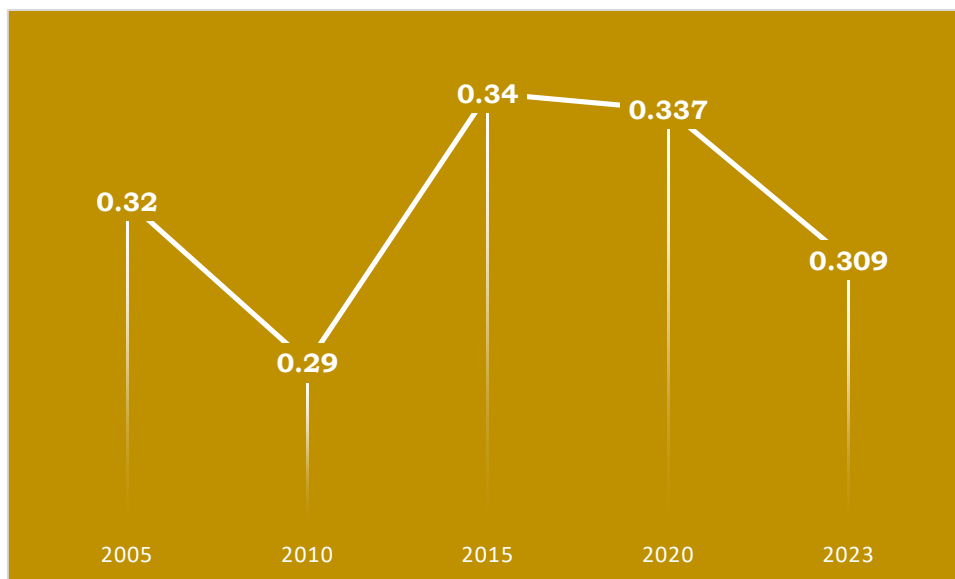


Gambar II.12
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2023 (%)
Sumber: BPS RI, 2024

2.2.1.5 Indeks Gini

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu mengurangi kesenjangan di lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini dapat diukur menggunakan indeks gini atau tingkat ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 mengartikan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1 maka ketimpangan telah terjadi. Indeks gini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *policy makers* dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan grafik di bawah diketahui bahwa pergerakan indeks gini Kabupaten Natuna pada rentang tahun 2005 hingga 2023 terjadi penurunan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2023. Pada tahun 2005 indeks gini Kabupaten Natuna berada pada angka 0,320 dan bergerak fluktuatif hingga mencapai 0,340 di tahun 2015 dimana angka tersebut menurun kembali hingga menjadi 0,309 pada tahun 2023.

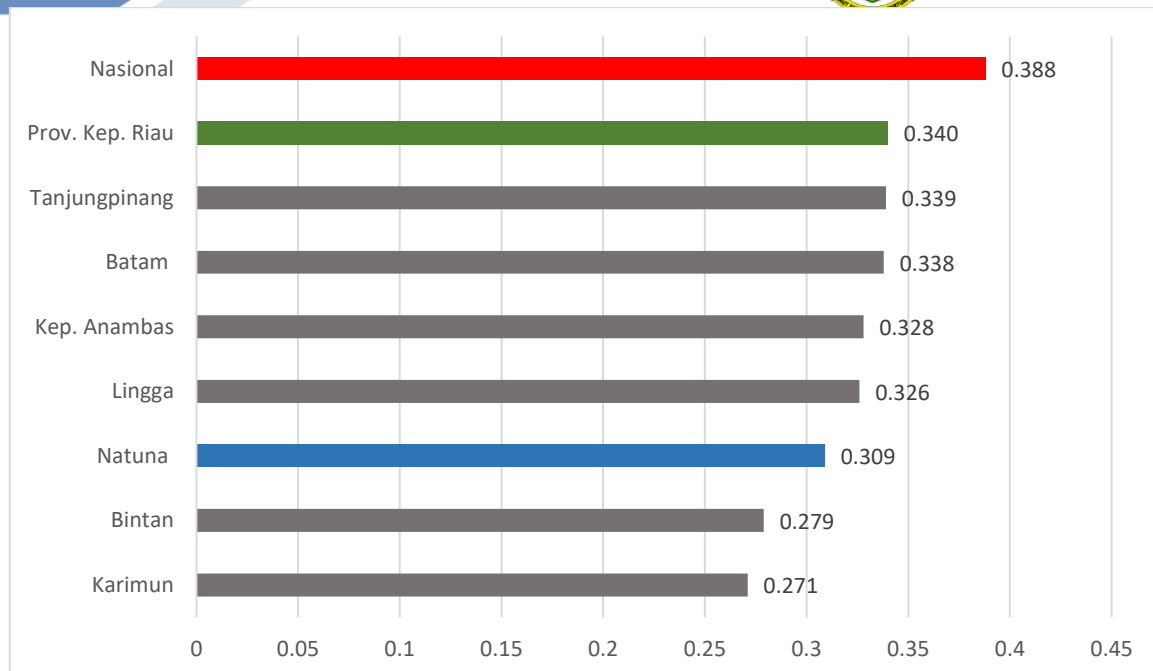


Gambar II.13

Indeks Gini Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Natuna, 2005-2023

Berdasarkan grafik di bawah, secara umum terjadi penurunan dimana sempat mengalami kenaikan di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 hingga mencapai 0,337 dan menurun kembali hingga mencapai 0,3091 di tahun 2023. Jika dibandingkan antar wilayah, maka Indeks Gini Kabupaten Natuna berada di peringkat 4 dari tujuh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna berada di bawah Kota Batam, Tanjungpinang, dan Kepulauan Anambas.



Gambar II.14

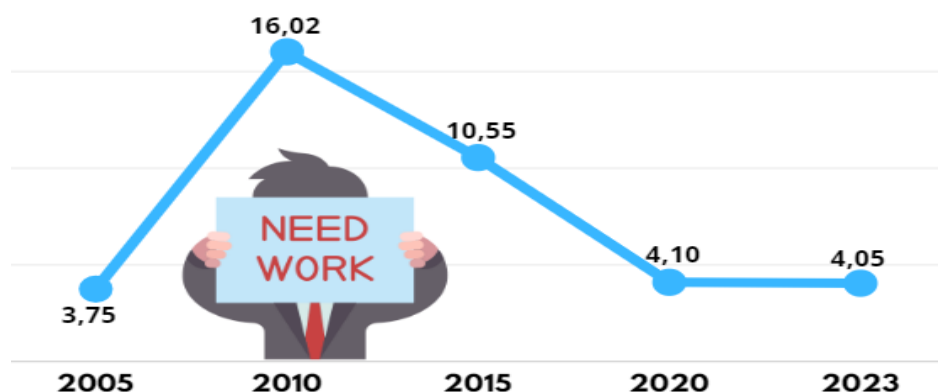
Indeks Gini Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023 dan Perbandingan Antar Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dan nasional Tahun 2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Natuna, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks rasio gini di Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar 0,309 di bawah Kabupaten Lingga yang mencapai 0,326. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Natuna berada pada status sedang dan tidak terlalu signifikan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Capaian ini cukup memuaskan karena rasio gini di Kabupaten Natuna lebih rendah bila dibandingkan dengan gini rasio di tingkat nasional yang sebesar 0,388 dan angka Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 0,340.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Natuna dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

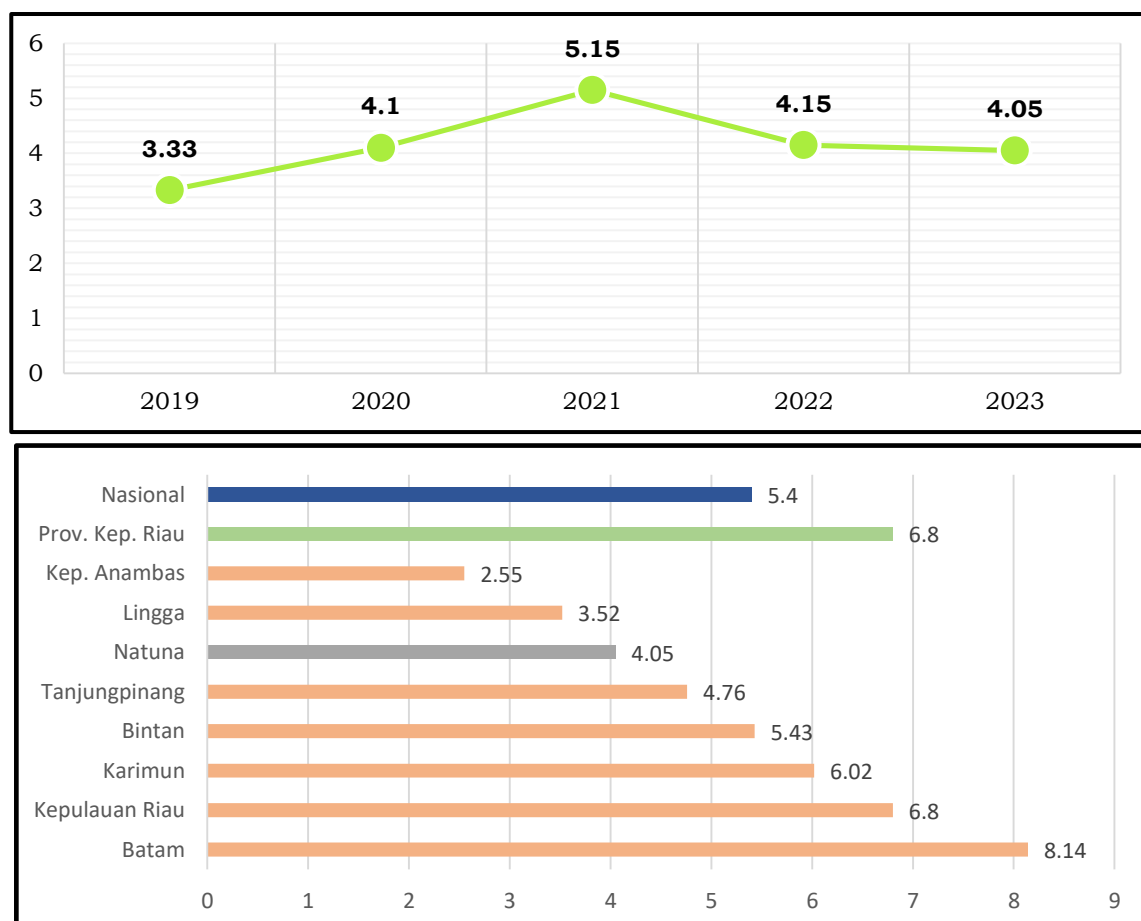


Gambar II.15

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2005-2023

Angka pengangguran di Natuna sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah mencapai posisi 16,02 persen di tahun 2010. Pengangguran mulai menurun hingga mencapai 4,05 persen di tahun 2023. Meskipun begitu, perlu ditelaah lebih dalam terkait tenaga kerja di Natuna, khususnya dalam hal kompetensi maupun keahlian sehingga terlihat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.



Gambar II.16
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional (%)

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2005-2023

Angka pengangguran di Natuna sendiri pergerakan fluktuatif dan mencapai kondisi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,15 persen. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga di tahun 2023 pengangguran menjadi 4,05 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka tingkat pengangguran di Kabupaten Natuna juga tergolong rendah. Pada tahun 2023, pengangguran di Kabupaten Natuna sebesar 4,05 persen berada di bawah rata-rata provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 6,80 persen dan angka Nasional sebesar 5,40 persen. Kondisi ini mengindikasikan bagusnya penyerapan angkatan kerja sehingga makin menurun tingkat penganggurannya.

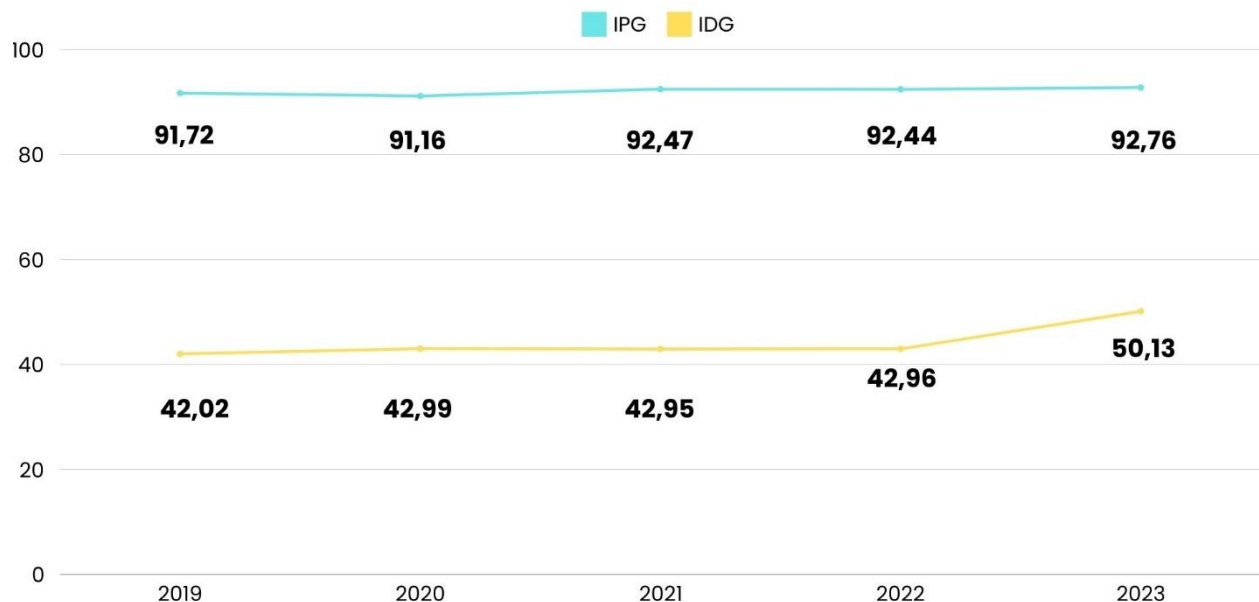
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

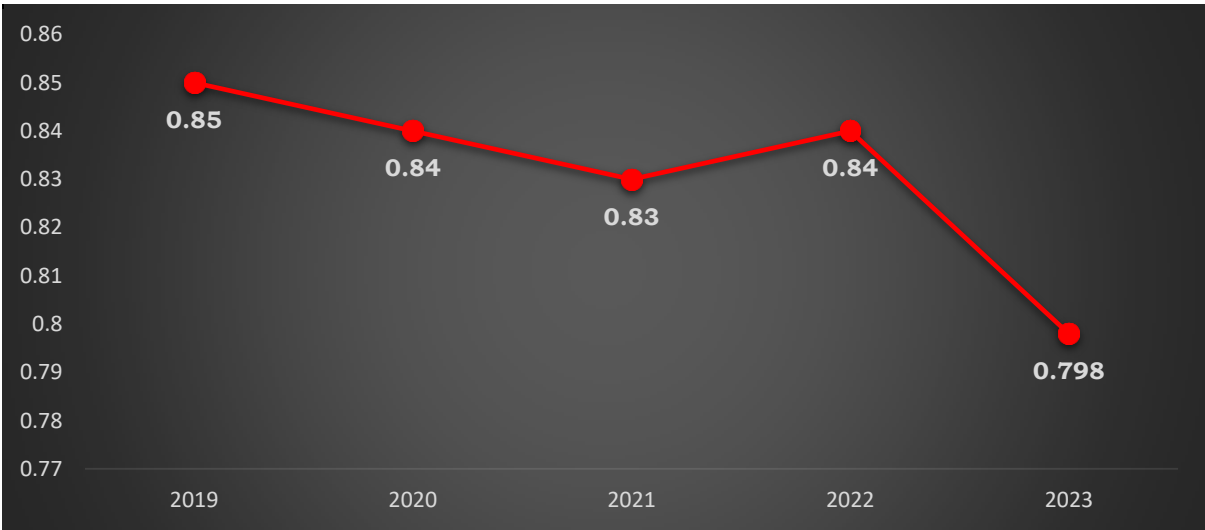
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Natuna sudah cukup tinggi dimana pada tahun 2019 memiliki capaian 91,72 dan meningkat menjadi 92,76 di tahun 2023. Namun pada indeks pemberdayaan gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 hanya mencapai 42,02 dan pada saat ini di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 50,13.



Gambar II.17
**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2023

Pada capaian indeks ketimpangan gender untuk mengukur ketidaksetaraan antara jenis kelamin dalam suatu wilayah, maka dapat terlihat capaian tahun 2019 menunjukkan angka 0,85 dan semakin menurun hingga tahun 2023 mencapai angka 0,798, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidaksetaraan gender mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi kenaikan pada beberapa tahun perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya pengarusutamaan gender karena ketimpangan gender yang semakin melebar pada tahun tertentu.

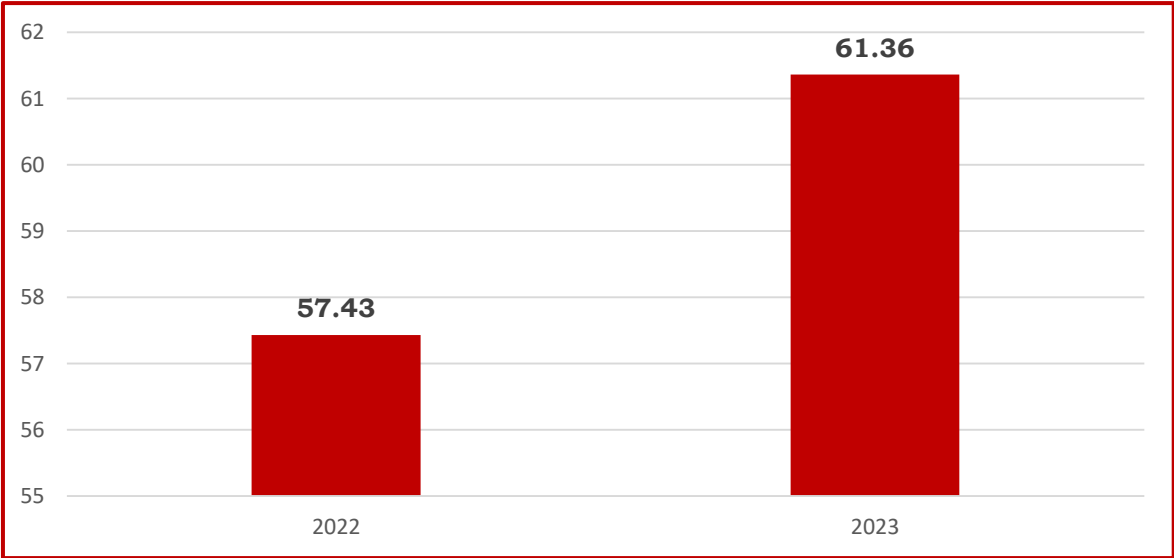


Gambar II.18
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024

Pembangunan kualitas keluarga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keharmonisan, dan keberdayaan anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan upaya untuk

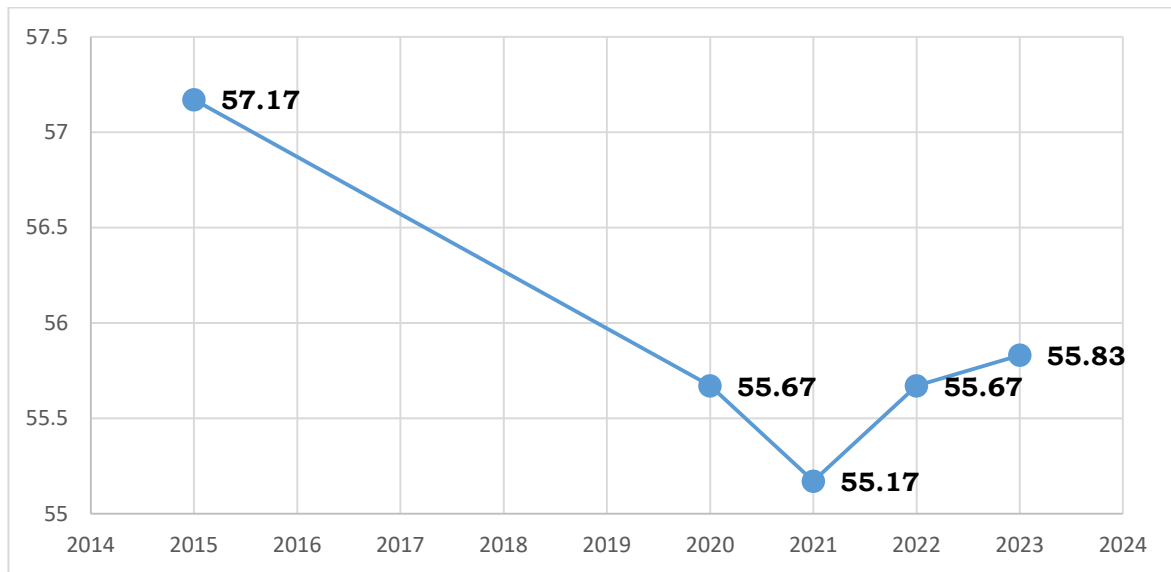
memperkuat hubungan antaranggota keluarga, meningkatkan komunikasi yang efektif, mempromosikan nilai-nilai positif, serta memberikan dukungan dan perlindungan yang saling menguatkan. Perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga menjadi poin penting dalam membangun peradaban masyarakat yang lebih baik melalui SDM yang unggul. Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Keluarga yang merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Adapun di Kabupaten Natuna mengalami kenaikan pada tahun 2023 yang terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2023 sebesar 61,36 jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 57,43. Kemudian salah satu Pembangunan kualitas keluarga terlihat dari indeks Pembangunan anak di Kabupaten Natuna mencapai 65,54.



Gambar II.19
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023
Sumber: BPPPAKB Kabupaten Natuna, 2024

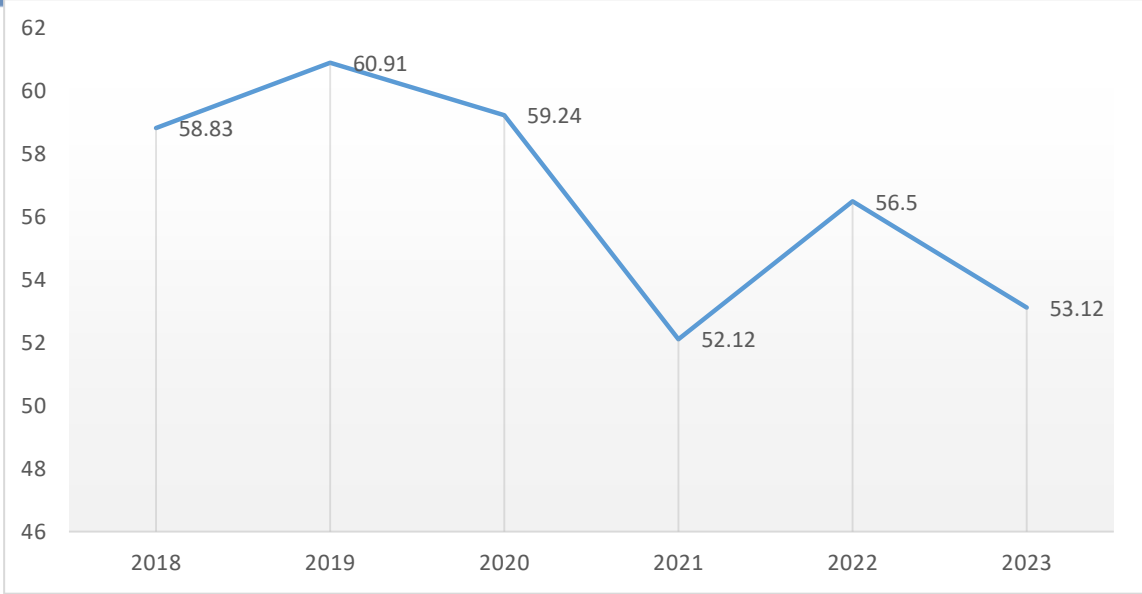
Pembangunan pemuda adalah esensial bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu bangsa karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan memegang kendali masa depan. Menginvestasikan dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda memastikan mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Selain itu, pembangunan pemuda yang inklusif dan holistik dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional di kancah global. Dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Memahami hal tersebut, salah satu indikator untuk melihat kualitas pemuda adalah melalui indeks Pembangunan pemuda, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Berdasarkan data capaian indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 57,17 menjadi

55,17 ditahun 2021 dan mulai mengalami peningkatan ditahun 2022 hingga 2023 yang mencapai 55,83.



Gambar II.20
Indeks Pembangunan Pemuda
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan sangat penting karena kebudayaan merupakan fondasi identitas dan jati diri suatu bangsa, yang mencerminkan nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pembangunan kebudayaan mendukung pelestarian dan pengayaan warisan budaya, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong rasa kebanggaan serta solidaritas nasional. Selain itu, kebudayaan berperan sebagai katalisator kreativitas dan inovasi, memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan. Dengan mengintegrasikan pembangunan kebudayaan dalam kebijakan dan program pembangunan, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berdaya saing di tingkat global. Memahami penjelasan tersebut, maka untuk melihat capaian Pembangunan kebudayaan dapat dilihat dari indeks Pembangunan kebudayaan. Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Natuna mengalami perkembangan yang fluktuatif, dari tahun 2018 hingga tahun 2013. Capain Indeks Pembangunan Kebudayaan dari tahun 2019 yang mencapai 60,91 hingga 2021 mengalami penurunan yang mencapai 52,12 kemudian meningkat ditahun 2022 dan 2023 hingga mencapai 53,12.



Gambar II.21
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3 ASPEK DAYA SAING

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas tenaga kerja.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Tabel II.15
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2010-2023 (Milyar Rupiah)

No	Indikator	2010	2015	2020	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	654,01	1.760,80	2.455,46	3.013,40
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	13.225,04	12.287,84	16.352,30
3	Industri Pengolahan	23,34	128,47	166,70	184,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	14,13	17,27	19,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,97	1,17	1,40
6	Konstruksi	62,03	1.230,96	1.664,05	1.824,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	481,88	716,83	890,22
8	Transportasi dan Pergudangan	-	114,11	126,28	171,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	76,18	101,04	117,97



No	Indikator	2010	2015	2020	2023
10	Informasi dan Komunikasi	-	89,83	147,41	168,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	21,21	30,75	33,16
12	Real Estate	-	98,20	139,15	166,99
13	Jasa Perusahaan	-	0,03	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	292,31	428,20	432,02
15	Jasa Pendidikan	-	29,37	43,12	49,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	49,98	66,25	77,93
17	Jasa lainnya	72,49	11,14	14,35	16,91
Produk Domestik Regional Bruto (dengan Migas)		1.077,39	4.421,47	18.405,91	23.519,88
Produk Domestik Regional Bruto (tanpa Migas)		N/A	N/A	6.145.66	7.199.72

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2023

Nilai PDRB ADHB (dengan Migas) Kabupaten Natuna memiliki pola peningkatan dari pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Peningkatan tersebut secara berturut-turut sebesar 1.077,39 milyar rupiah pada tahun 2010; Rp 4.421,47 milyar rupiah pada tahun 2015; 18.405,91 milyar rupiah pada tahun 2020; dan terakhir 23.519,88 milyar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan pada PDRB ADHB (tanpa Migas) cukup jauh dibandingkan dengan migas dimana pencapaian tahun 2023 sebesar 7.199,72 milyar rupiah. Dari pencapaian PDRB tersebut, kontribusi PDRB yang mendominasi berasal dari kategori Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Natuna.

Terlihat bahwa potensi ekonomi pada tahun awal perencanaan pembangunan didominasi oleh kategori lapangan usaha yaitu bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Diharapkan ke depan, kategori pembangunan unggulan daerah mampu bersaing dan lebih pemeratakan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Tentu saja perlu adanya transformasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan perekonomian yang tumbuh, stabil dan inklusif, khususnya dalam transformasi perekonomian berbasis sumber daya tak terbarukan.

Tabel II.16
Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna Tahun 2005-2023 (%)

No	Indikator	2010	2015	2020	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,95	9,8	13,34	12,81
2	Pertambangan dan Penggalian	76,77	75,36	66,76	69,53
3	Industri Pengolahan	0,71	0,72	0,91	0,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	6,1	6,88	9,04	7,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,24	2,69	3,89	3,78



No	Indikator	2010	2015	2020	2023
8	Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,62	0,69	0,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,43	0,55	0,50
10	Informasi dan Komunikasi	0,52	0,5	0,8	0,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,12	0,17	0,14
12	Real Estate	0,53	0,55	0,76	0,71
13	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,71	1,71	2,33	1,84
15	Jasa Pendidikan	0,14	0,16	0,23	0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,28	0,36	0,33
17	Jasa lainnya	0,06	0,06	0,08	0,07
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2005-2023

2. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Tabel II.17
PDRB per Kapita Kabupaten Natuna
Tahun 2019-2023

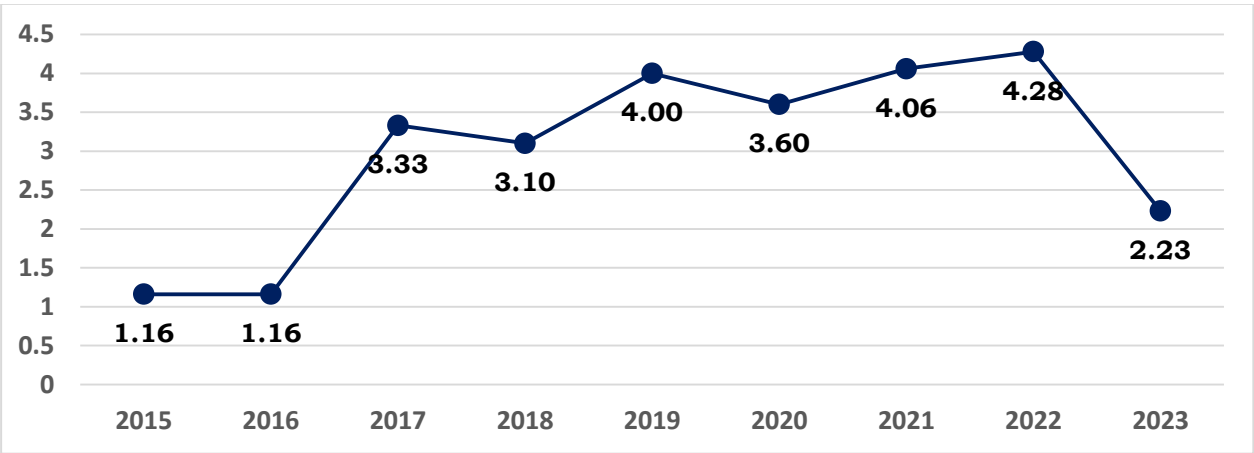
No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	- PDRB Dengan Migas (juta rupiah)	21.795.501	18.405.913	20.870.156	24.265.430	23.519.882
2	- PDRB Tanpa Migas (juta rupiah)	6.322.110	6.145.656	6.285.249	6.716.388	7.199.719
	Jumlah Penduduk	77.771	81.321	82.279	83.430	84.556
3	- PDRB Perkapita Dengan Migas	280,25	226,34	253,65	290,85	278,16
4	- PDRB Perkapita Tanpa Migas	81,29	75,57	76,39	80,50	85,15

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024, diolah



Pergerakan PDRB per kapita di Kabupaten Natuna dapat dilihat melalui tabel di atas, dimana diketahui bahwa PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2023. Dikarenakan dominasi dari komoditas minyak dan gas di Kabupaten Natuna, maka PDRB per kapita non migas dengan migas terpantau cukup jauh dan dari segi analisis kesejahteraan masyarakat, maka lebih relevan jika melihat pada PDRB non migas. Adapun pencapaian PDRB per Kapita non migas di Natuna pada tahun 2023 mencapai 85,15 juta rupiah per kapita dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,50 juta rupiah per kapita. Adapun PDRB per Kapita non migas tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.

Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 tidak stabilnya ekonomi yang diakibatkan banyak wirausaha yang belum siap dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Hal ini terlihat dari rasio kewirausahaan yang sempat menurun di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 dan 2022 sebagai dampak penanganan dan pemulihan pasca COVID-19. Namun di tahun 2023, terjadi penurunan kembali yang cukup signifikan hingga mencapai 2,23 dikarenakan adanya gejolak ekonomi baik regional maupun internasional.



Gambar II.22

Rasio Kewirausahaan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Natuna tahun 2024

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. berperan sebagai kelompok sasaran juga sebbagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

Daya saing SDM ini akan menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dimana berfokus pada analisis terkait kompetensi masyarakat Natuna. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia.



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Sedangkan harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Terlihat bahwa baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terlihat rata-rata lama sekolah Kabupaten Natuna mencapai 9,08 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas baru mengenyam pendidikan rata-rata selama 9,03 tahun atau lulus sekolah menengah pertama. Adapun harapan lama sekolah yang mencapai 13,93 tahun juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Natuna yang baru lahir di tahun 2023 memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga 13,93 tahun atau setara dengan perguruan tinggi semester empat.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Natuna meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 69,00. Capaian ini tergolong belum optimal sehingga perlu adanya akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Natuna yang lebih merata dan berkualitas.

Tabel II.18
Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan
di Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,72	8,73	8,92	8,96	9,08
2	Harapan Lama Sekolah	13,89	13,90	13,91	13,92	13,93
3	Indeks Pendidikan	NA	67,71	NA	NA	69,00
4	Umur Harapan Hidup	64,81	65,06	65,06	65,31	74,15
5	Indeks Kesehatan	NA	69,32	NA	NA	83,30

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019-2023, diolah

Selain itu bidang kesehatan juga menjadi komponen pembentuk IPM adalah indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang dapat mencerminkan gambaran umur yang mungkin akan dicapai oleh seorang bayi baru lahir. Indikator ini mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Adapun capaian angka harapan hidup di Kabupaten Natuna mencapai 74,15 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga usia 74-75 tahun. Pada analisis berikutnya, indikator ini digunakan untuk merumuskan indeks kesehatan dimana pada



tahun 2023, indeks kesehatan di Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83,30.

Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Natuna juga dapat dilihat dari angka literasi dan numerasi SD dan SMP yang diperoleh dari nilai raport ditahun 2022 dan 2023 seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.Berdasarkan data tersebut terlihat adanya peningkatan pada angka literasi dan numerasi baik pada tingkat SD maupun SMP ditahun 2022 dan 2023 yang mana angka literasi SD meningkat 9 poin ditahun 2023 hingga mencapai 59,14. Kemudian angka numerasi SD juga meningkat sebanyak 7 poin dari 37,66 menjadi 43,53. Selanjutnya angka literasi SMP mengalami peningkatan dari 58,36 menjadi 66,57 dan angka numerasi menurun dari 53,54 menjadi 44,13.

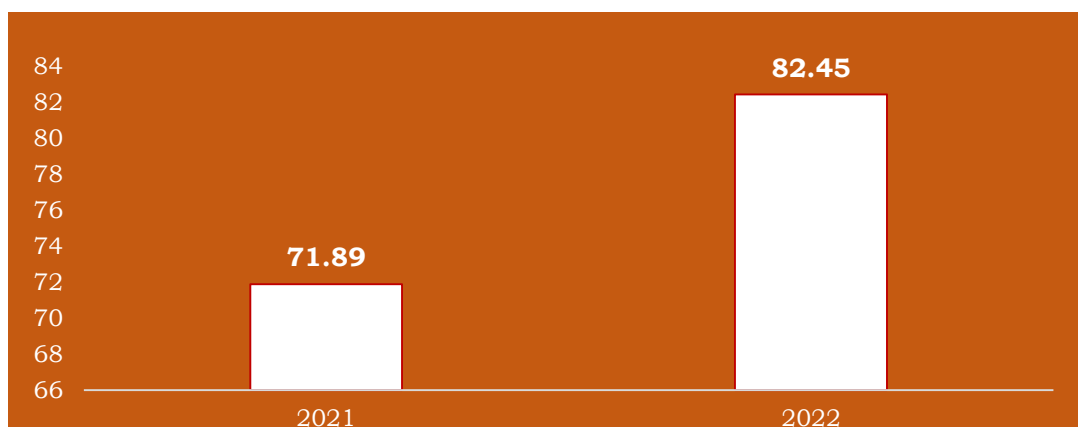
Tabel II.19
Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan 2023

No	Rincian Angka Literasi/ Numerasi	2022	2023
1	Angka Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	50,74	59,14
2	Angka Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	37,66	43,53
3	Angka Literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	58,36	66,57
4	Angka Numerasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional	53,54	44,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, 2022-2023, diolah

Pembangunan literasi masyarakat adalah proses yang berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang terkait dengan berbagai konteks kehidupan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan tingkat literasi di antara individu dan komunitas secara luas, dengan tujuan memberikan akses yang lebih baik terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang.

Dalam meningkatkan literasi masyarakat, pemerintah turut hadir dalam rangka memberikan dukungan baik dari sarana prasarana maupun dalam hal sosialisasi/bimbingan sehingga masyarakat tersadar akan artinya budaya literasi yang baik. Pencapaian pembangunan literasi di Kabupaten Natuna juga meningkat dimana pada tahun 2022 mencapai 82,45 setelah tahun 2021 hanya mencapai 71,89. Harapannya ke depan, kondisi ini terus ditingkatkan hingga merata di seluruh wilayah Natuna, mengingat masih banyak masyarakat yang terluar belum merasakan pendidikan yang lebih baik.

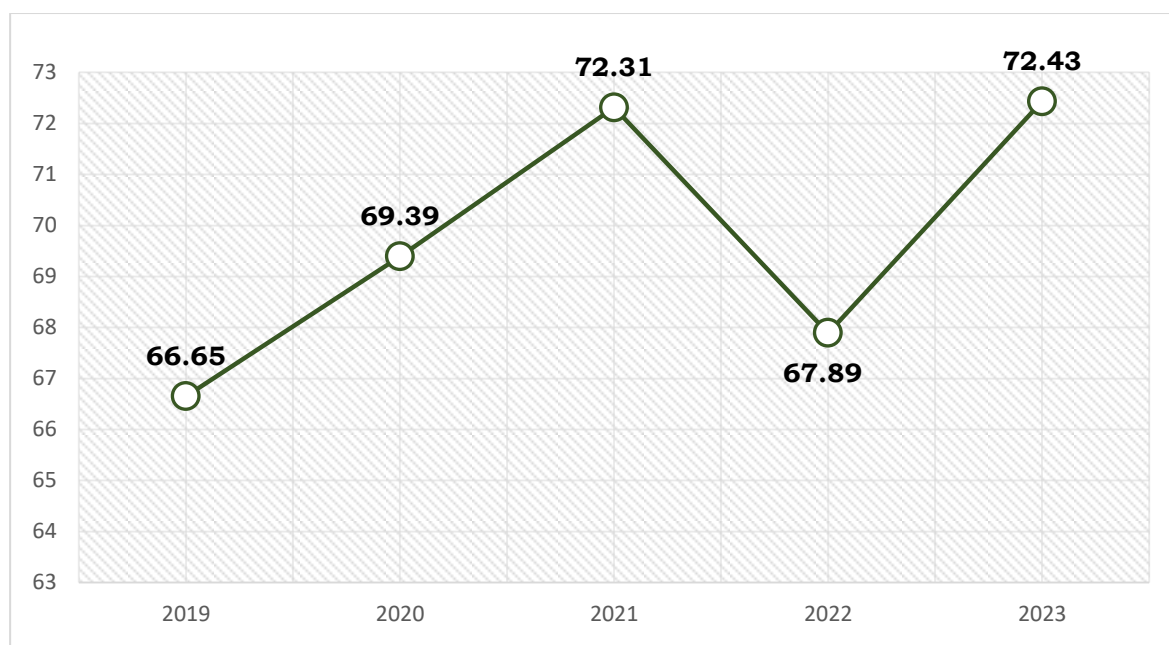


Gambar II.23

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Natuna
Tahun 2021-2022**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Natuna, 2023

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Natuna memiliki trend yang cukup baik mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami pergerakan meningkat namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup drastis sebanyak 4,42 persen dari 72,31 pada tahun 2021 menjadi 67,89 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja kembali meningkat menjadi 72,43 persen. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan angkatan kerja agar tidak menjadi pengangguran.



Gambar II.24

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2010-2024

Angka ketergantungan memperlihatkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka

yang tidak bekerja. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap pekerja. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

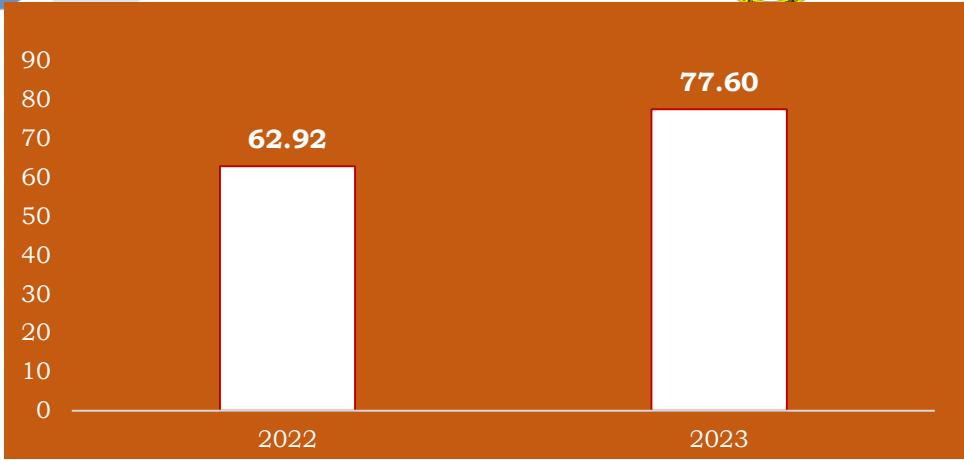


Gambar II.25
Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2019-2024

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial, karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Natuna berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Adapun pencapaian indeks infrastruktur Kabupaten Natuna pada tahun 2022 belum optimal dengan capaian sebesar 62,92 dan mengalami peningkatan ditahun 2023 menjadi 77,6. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Natuna menyajikan data tentang infrastuktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.



Gambar II.26

Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, 2023

1. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Natuna selama tahun 2021-2023 terus ditingkatkan kualitasnya baik sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pelayanan pendidikan di Kabupaten Natuna mengalami kenaikan meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Namun masih perlunya berbagai inovasi dalam pemerataan dan akses terhadap layanan pendidikan menjadi perhatian *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan.

Tabel II.20

Kondisi Infrastruktur Pendidikan
di Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023

Indikator	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah	85	85	86	39	40	41	26	26	24
Jumlah Guru	962	944	963	583	575	559	528	545	543
Jumlah Murid	9.516	9.375	9.220	4.480	4.399	4.296	4.011	3.980	4.140

Sumber: BPS Kabupaten Natuna Dalam Angka, 2022-2024

2. Infrastruktur Kesehatan

Berbeda dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan cenderung bersifat fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 terhadap indikator jumlah rumah sakit bersalin, jumlah klinik, jumlah puskesmas pembantu. Selain itu, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan pada jumlah perawat. Pada tahun 2023 angka infrastruktur bidang kesehatan mulai naik kembali meskipun tipis. Tahun 2023 Jumlah rumah sakit di Kabupaten Natuna berjumlah 2 unit, jumlah puskesmas 15 unit, jumlah tenaga kesehatan berjumlah 779 orang, jumlah dokter yang ada 58 orang, jumlah



bidan 249 orang, dan jumlah perawat yang ada di Kabupaten Natuna yaitu sebanyak 371 orang.

Tabel II.21
Kondisi Infrastruktur Kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	Jumlah Puskesmas	14	13	14	14	15
2	Jumlah Tenaga Kesehatan	505	474	531	809	779
	Jumlah Dokter	45	38	44	69	58
	Jumlah Bidan	153	167	191	260	249
	Jumlah Perawat	249	208	221	368	371

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Natuna 2023

3. Sarana Prasarana Dasar

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara. Sarana prasarana ini menjadi penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan sarana prasarana yang baik merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sarana prasarana yang penting untuk kehidupan masyarakat adalah perumahan dan permukiman dimana luasan kawasan kumuh perkotaan meningkat hingga mencapai 548,39 ha dengan persentase kawasan kumuh mencapai 20,76 persen.

Tabel II.22
Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan (ha)	183,58	183,58	183,58	170,72	548,39
2	Persentase kawasan kumuh	6,95%	6,95%	6,95%	6,46%	20,76%
3	Persentase kawasan kumuh yang tertata	-	-	7,53%	9,56%	5,53%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2023

Sarana dan prasarana lain yang perlu dalam pembangunan adalah terkait konektivitas dan perhubungan antar wilayah. Pada tahun 2023, Kabupaten Natuna memiliki panjang jalan total sebesar 722,140 km, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kewenangan. Dari total panjang jalan tersebut, sebanyak 464,08 km adalah jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Natuna.

Secara keseluruhan, panjang jalan di Kabupaten Natuna yang berada dalam kondisi baik sebanyak 359,13 km, kondisi sedang sebanyak 111,79 km, kondisi rusak sebanyak 127,91 km, dan kondisi rusak berat sebanyak 123,31 km. Secara umum, hampir seluruh kondisi jalan negara yang ada di

Kabupaten Natuna sudah berstatus baik. Sementara untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa/kelurahan masih terdapat bagian jalan yang berstatus rusak/rusak berat yang jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit.

Kabupaten Natuna yang merupakan kabupaten kepulauan yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk menjangkau antar kecamatan dan kabupaten, serta transportasi udara untuk menjangkau kabupaten/kota lainnya, terutama Kota Batam. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 2.248 unit kunjungan kapal pelayaran dalam negeri yang berlayar di wilayah Kabupaten Natuna dengan jumlah penumpang yang datang mencapai 54.318 orang dan jumlah penumpang yang berangkat mencapai 43.608 orang. Sementara itu, untuk transportasi udara, terdapat 419 penerbangan dengan total penumpang yang datang sebanyak 25.320 orang dan yang berangkat sebanyak 25.436 orang.

Dari sisi sarana prasarana telekomunikasi dan informasi, data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 145 menara BTS di seluruh wilayah Natuna dimana 11 diantaranya tidak aktif atau rusak. Operator di Malinau didominasi oleh Telkomsel dengan jumlah menara sebanyak 56 pada tahun 2023. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah perluasan jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Natuna cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ritel, real estate dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Dalam hal ini perlu diupayakan percepatan yang lebih terarah, terukur dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor.

Beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta melalui peningkatan Kerjasama dalam kegiatan pameran dan promosi investasi baik secara nasional dan internasional serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan mudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh instansi terkait. Disisi lain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha investasi di daerah Kabupaten Natuna.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan/non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elektronik (online) melalui portal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan BKPM sesuai peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS-RBA mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.

NSWI (*National Single Window for Investment*) merupakan sistem yang melakukan pendalaman pada layanan koneksi di setiap Perangkat Daerah (PD) yang ada di suatu daerah untuk kepentingan investasi. NSWI ini menjadi salah satu bagian dari INSW (Indonesia Nasional Single Window) yang terfokus pada layanan kepabeanan. Secara umum, INSW diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 mengenai system Nasional Indonesia yang bertugas untuk menyampaikan tahapan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk izin kepabeanan dan pengeluaran barang, merupakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.

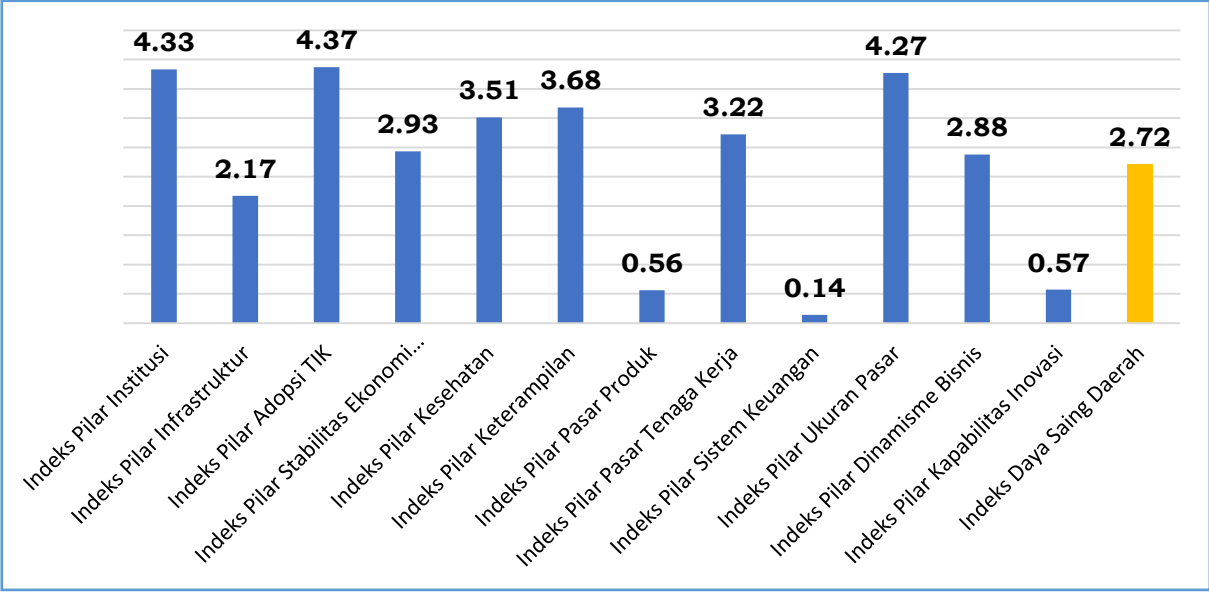
Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) tahun 2022 di Kabupaten Natuna sebesar 13,93 persen. Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada di daerah Kabupaten Natuna ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar) namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Natuna.

Salah satu upaya meningkatkan investasi dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Natuna adalah dengan menjaga kondusivitas iklim investasi daerah. Kondusivitas iklim investasi dibentuk dengan adanya kenyamanan investor dalam menanamkan modal, sehingga perlu adanya wilayah yang aman dan damai. Sepanjang tahun 2022, terdapat 64 kejadian tindak pidana di Kabupaten Natuna dengan *crime rate* mencapai 82 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dimana terjadi 70 tindak pidana dengan *crime rate* mencapai 84 per 100.000 penduduk. Dari 64 tindak pidana yang terjadi pada tahun 2022, hanya sebanyak 46 tindak pidana yang berhasil diselesaikan atau sebesar 71 persen, dimana angka ini mengalami penurunan tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72 persen.

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).



Secara umum, IDSD Kabupaten Natuna mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 1,84 dan meningkat menjadi sebesar 2,72 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, pilar tertinggi pada pencapaian IDSD Kabupaten Natuna adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,37 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,33. Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 0,14.



Gambar II.27
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Natuna Tahun 2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan memengaruhi arah kebijakan negara melalui proses pemilihan yang adil dan bebas. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan di wilayah tersebut semakin baik. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Natuna, dimana persentasi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum meningkat hingga mencapai 83,96 persen pada tahun 2023 dengan rincian pemilih pemilihan presiden sebesar 84,49 persen; pemilihan legislatif sebesar 81,08 persen; dan pemilihan kepala daerah emncapai 86,30 persen.

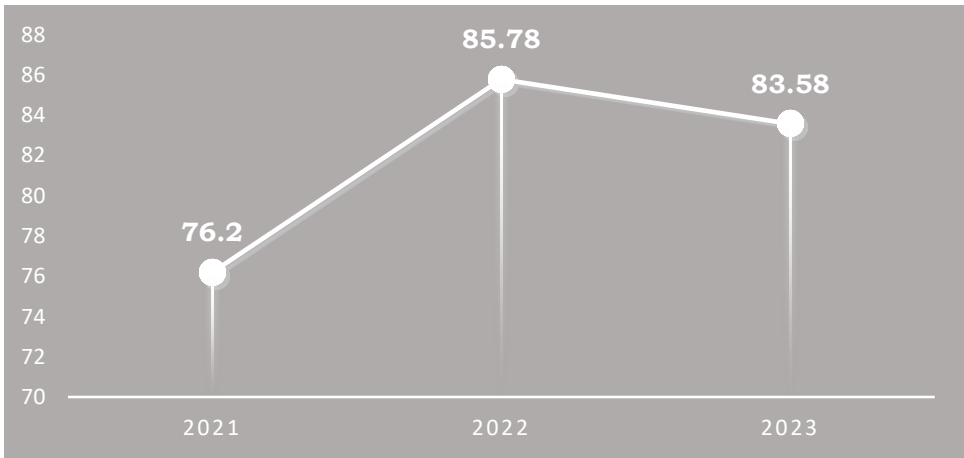
Tabel II.23
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
Kabupaten Natuna Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	80.19	80,19	83,96	83,96	83,96
	a) Pilpres	84,49	84,49	84,49	84,49	84,49
	b) Pileg	81,08	81,08	81,08	81,08	81,08
	c) Pemilukada	75,00	75,00	86,30	86,30	86,30

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Natuna, 2024

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga kondusivitas dan harmoni di masyarakat yang beragam. Hal ini membutuhkan

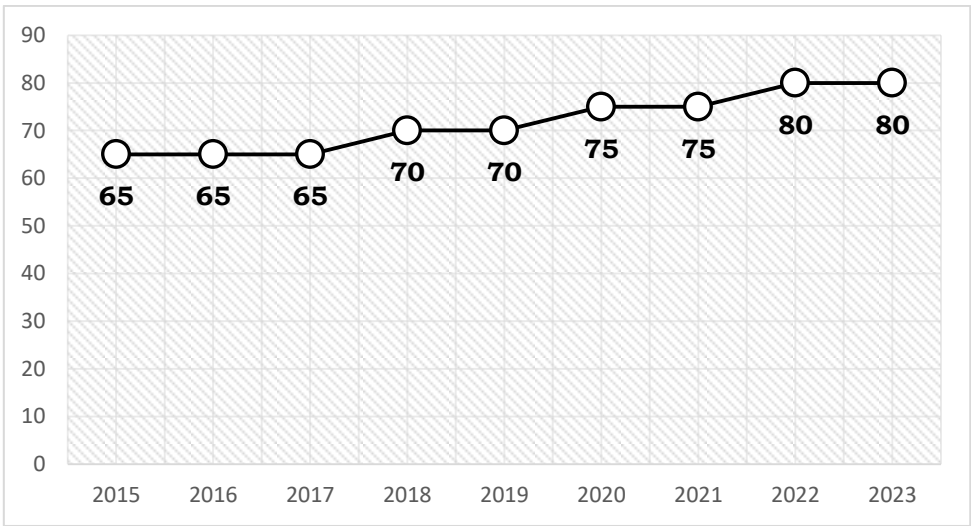
kesadaran, penghargaan, dan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan individu-individu dalam komunitas. Adapun di Kabupaten Natuna yang terdapat berbagai suku, budaya dan agama memiliki kerukunan umat beragama yang cukup baik dimana pada tahun 2023 mencapai 83,58. Meskipun angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan tahun 2021 angka ini meningkat cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keadaan di Kabupaten Natuna terkait dengan SARA cukup kondusif. Hal ini juga terlihat pada indikator prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang capaiannya semakin meningkat dari tahun 2015 hingga 2023 yang mencapai 80 persen. Kemudian terkait dengan kondusifitas daerah dapat terlihat pada indikator angka kriminalitas yang sempat meningkat ditahun 2019 yang mencapai 132 poin dan menurun hingga ditahun 2023 yang mencapai 65 poin.



Gambar II.28

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Natuna Tahun 2021-2023

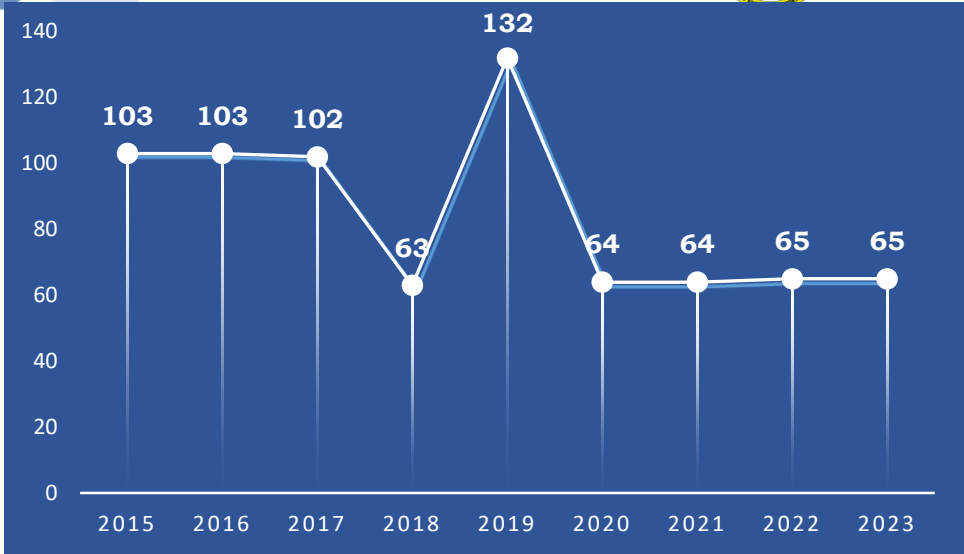
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Natuna, 2024



Gambar II.29

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Natuna, 2024



Gambar II.30
Angka Kriminalitas Kabupaten Natuna Tahun 2015-2023
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Natuna, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Penggambara keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.24
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 DOFD menutupi kebutuhan mencapai angka 4,95 persen yang berarti masuk dalam kategori Sangat Kurang. Memasuki tahun 2019 DOFD Kabupaten Natuna turun menjadi 4,18 persen kemudian ditahun 2020 naik tipis menjadi 5,56 persen. Pada tahun 2021 DOFD kembali turun menjadi 4,71 persen dan pada



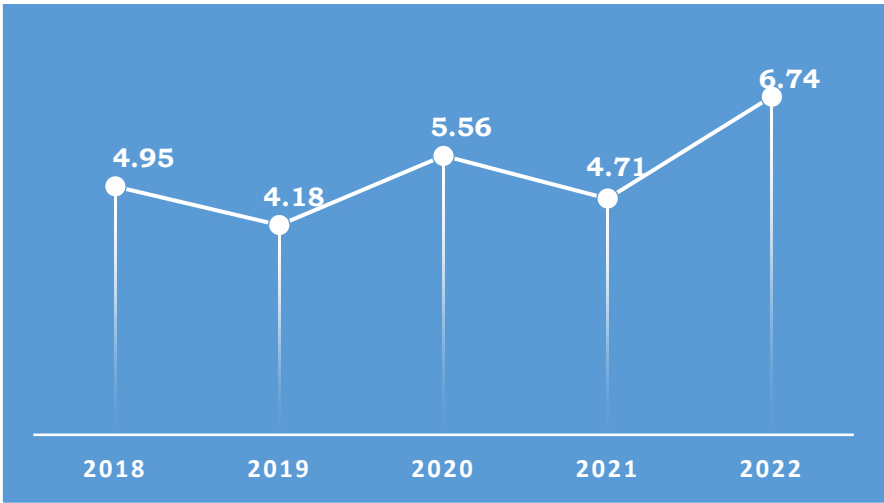
tahun 2022 kembali naik menjadi 6,74 persen. Untuk mengurangi angka ketergantungan kepada bantuan pusat, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari DOFD Kabupaten Natuna yang semakin meningkat.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Natuna yang sebesar 6,74 persen masih masuk kategori **Sangat Kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori baik dan sangat baik, maka Pemerintah Kabupaten Natuna harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat maupun provinsi akan semakin berkurang. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Natuna periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.25
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Natuna, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	969.215,00	1.350.964,00	926.421,00	901.397,44	989275,28
Pendapatan Asli Daerah	47.953,00	56.417,00	51.528,27	42.430,22	66.678,87
Persentase	4,95	4,18	5,56	4,71	6,74

Sumber: DPPKAD Kabupaten Natuna, 2022 (diolah)



Gambar II.31
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018-2022 (%)

Sumber: Bappeda dan Litbang, Kabupaten Natuna 2023

Salah satu indikator dalam melihat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan melihat nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dimana pada tahun 2022, Kabupaten Natuna mencapai nilai 73,84. Angka ini mengalami kenaikan tipis dibanding tahun 2021 yang mencapai 73,75. Kemudian di tahun 2023 nilai SAKIP Kabupaten Natuna mencapai 73,98.

Dari sisi implementasi reformasi birokrasi pada kinerja pemerintah Kabupaten Natuna terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun



sebelumnya yaitu tercapai pada angka 60,10 (B), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi tercapai pada angka 60,31 (B). Hasil capaian pada tahun 2021 dan 2022 ini meningkat jika dibandingkan angka Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 58,12. Namun pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Natuna mencapai titik tertinggi selama lima tahun terakhir dengan capaian sebesar 72,55.

Tabel II.26
Indikator Tata Kelola Pemerintahan
Kabupaten Natuna, Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi,	54,59	58,12	60,24	60,1	72,55
2	Indeks Pelayanan Publik,	3,43	3,35	3,87	4,16	2,84
3	Indeks Inovasi Daerah	-	2,333	49,05	39,16	37,1
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,	29,71	3,10	2,24	2,50	3,19

Sumber: Sekretariat Daerah; Bappeda dan Litbang; Diskominfo, Kabupaten Natuna 2024

Dari sisi pelayanan publik, maka pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari indeks persepsi kualitas pelayanan publik dimana pada tahun 2023 capaian Kabupaten Natuna mengalami penurunan cukup signifikan menjadi sebesar 2,84 dibanding tahun 2022 yang mencapai 4,16. Penurunan ini juga terlihat dari indeks inovasi daerah yang menurun hingga mencapai 37,10 pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing memiliki capaian 49,05 dan 39,16.

Dari sisi peningkatan digitalisasi layanan pemerintah maupun untuk kinerja internal, dapat terlihat dari capaian Indeks SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Natuna pada tahun 2021 mencapai 2,24 dengan status kategori “cukup” dan meningkat menjadi 2,50 dengan status yang sama. Adapun pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai Indeks SPBE sebesar 3,19. Kenaikan ini mengindikasikan terus berkembangnya digitalisasi dalam pengelolaan pembangunan, khususnya pada pelayanan publik kepada masyarakat Natuna.

**2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NATUNA 2005-2025**

Pembangunan Kabupaten Natuna pada periode sebelumnya di terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025. Pada tahap pembangunan ini, Kabupaten Natuna memiliki visi **“Menjadi NATUNA MAS”**. Pada gambaran umum ini, akan dijabarkan mengenai evaluasi perencanaan pembangunan periode tersebut. Hal ini bertujuan untuk menilai capaian pembangunan serta menjadi gambaran perbaikan di periode selanjutnya. Hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Natuna
pada Periode RPJPD 2005-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Kinerja (2022)	Proyeksi* Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,4	73,47	74,67	7,41
2	Angka Kemiskinan	%	8,74	5,32	5,00	-39,10
3	Angka Pengangguran	%	3,75	4,15	3,00	10,66
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,88	2,80	6,00	-52,38
5	Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)	Juta Rp per Kapita	12,36 juta	78,25	82,50	533,09
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	-	0,32)	0,291	0,280	-9,06

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Natuna 2005-2025

Mengacu pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa seluruh indikator makro Kabupaten Natuna pada periode RPJPD 2005-2025 diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Ketimpangan Pendapatan, dan PDRB per Kapita. Dari ketujuh indikator tersebut terdapat dua indikator yang tidak ditemukan yakni pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan. Pendapatan perkapita tidak dapat ditemukan karena Badan Pusat Statistik tidak melakukan survei pada tahun berkenaan sedangkan ketiadaan ketimpangan pendapatan. Melalui tabel tersebut, dapat terlihat bahwa ketercapaian indikator makro Kabupaten Natuna pada periode RPJPD 2005-2025 adalah 100 persen.

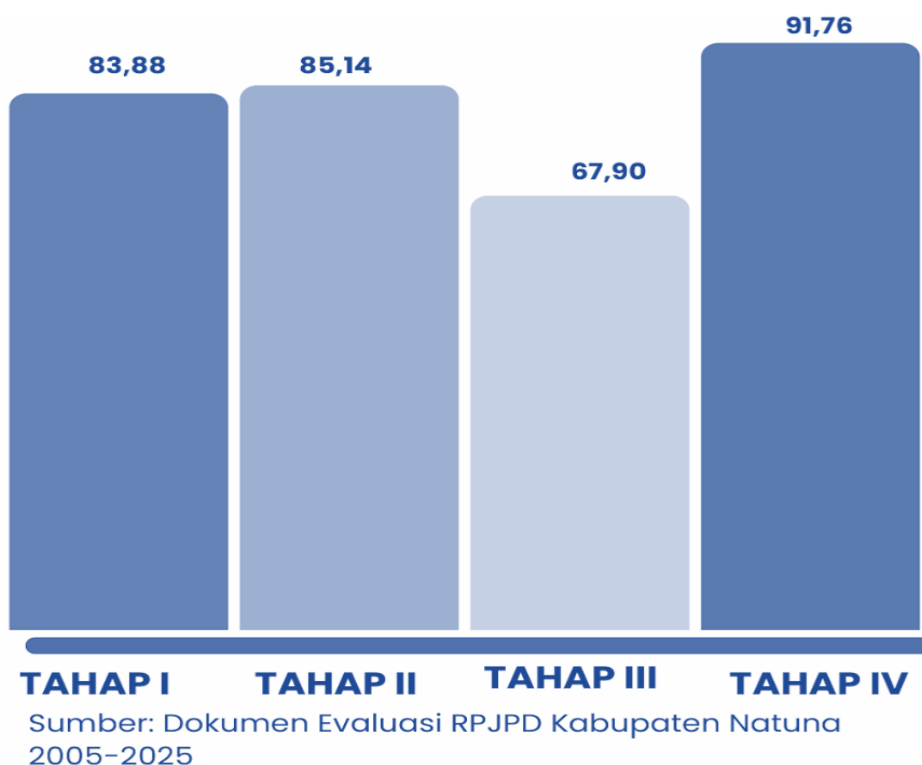
Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2005-2010, tahap kedua 2010-2015, tahap ketiga 2015-2021, tahap keempat 2021-2025. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja RPJPD ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II.28
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja RPJPD Kabupaten Natuna
Tahun 2005– 2025

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil dari evaluasi kinerja sasaran pokok di setiap tahapan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar II.32

Evaluasi RPJPD Kabupaten Natuna Setiap Tahapan RPJPD 2005-2025

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa capaian pada tahap I sebesar persen dengan kategori capaian. Capaian kemudian mengalami di tahap kedua yakni menjadi persen dengan kategori capaian. Selanjutnya, pada tahap ketiga kembali meningkat dan menjadi capaian tertinggi dari setiap tahapan akhir sebesar persen. Rata-rata capaian kinerja sasaran pokok pada RPJPD ini adalah persen masuk ke dalam kategori. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Natuna 2005-2025 berjalan secara optimal.

Adapun faktor pendorong pada implementasi pembangunan Kabupaten Natuna ialah sebagai berikut:

1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum
Karakter dan jati diri budaya Melayu yang mampu meningkatkan suasana kondusif di masyarakat. Selain itu didukung dengan tidak adanya demonstrasi atas kebijakan pemerintah kabupaten dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mempengaruhi kehidupan bermasyarakat Kabupaten Natuna dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Aspek Kualitas Sumber Daya Manusia
Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk di tingkat SD, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Pengangguran diantaranya adanya trend kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Natuna sudah sejalan dengan angka harapan hidup tingkat Provinsi dan Nasional. Pemerintah



Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk memberikan beasiswa khususnya di bidang kesehatan, perikanan, guru, maupun ilmu eksakta. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilakukan Disnakertrans Kabupaten Natuna di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengoptimalkan skill dan kemampuan usia tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

3. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Beberapa factor yang berpengaruh dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi maupun opini BPK terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Natuna adalah meningkatnya rasio temuan BPK/RI yang ditindaklanjuti dengan realisasi kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Natuna yang tercermin dari pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan.

4. Aspek Kesejahteraan

Upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator berupa angka kemiskinan di Kabupaten Natuna didukung dengan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Natuna senantiasa digiatkan setiap tahun untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk miskin dan upaya pengentasan kemiskinan.

5. Aspek Perekonomian

Upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator berupa angka kemiskinan di Kabupaten Natuna didukung dengan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Natuna senantiasa digiatkan setiap tahun untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk miskin dan upaya pengentasan kemiskinan.

6. Aspek Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna didukung oleh beberapa factor yang mendasari, diantaranya adalah akses darat di beberapa wilayah sudah cukup memadai untuk menjadi alternatif menuju pelabuhan, dan pemerataan jaringan listrik sudah 100% menjangkau seluruh wilayah di Natuna meskipun di beberapa kecamatan belum optimal teraliri listrik selama 24 jam.

7. Aspek Kualitas Lingkungan Hidup

Potensi investor yang masuk ke Natuna cukup tinggi sehingga secara khusus perlu adanya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Natuna sehingga dapat mengantisipasi adanya degradasi lingkungan yang mengancam potensi di Kabupaten Natuna khususnya di bidang lingkungan hidup.

Walaupun begitu, pada implementasi pembangunan Kabupaten Natuna tetap terdapat faktor yang menghambat atau kendala ketercapaian program. Adapun faktor penghambat pada pembangunan sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pandemi Covid19 yang menurunkan angka perekonomian dan memiliki efek samping berupa kesenjangan ekonomi sehingga menimbulkan tindak kriminalitas.

2. Aspek Kualitas Sumber Daya Manusia

Beberapa factor penghambat yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, Rasio ketersediaan sekolah/penduduk di tingkat SD, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Pengangguran diantaranya adanya rasionalisasi anggaran dari pemerintah yang menyebabkan program pendidikan, kesehatan dan perekonomian tidak berjalan optimal. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi belum diimbangi dengan kemampuan ekonomi keluarga untuk menuntut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta penyuluhan tentang pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan faktor lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, dan kondisi perekonomian menyebabkan usia harapan hidup belum optimal.

3. Aspek Tataa Kelola Pemerintahan

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam belum optimalnya indeks reformasi birokrasi maupun opini BPK terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Natuna adalah Belum optimalnya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program program reformasi birokrasi. Implementasi kebijakan juga masih belum berjalan secara efektif dimana adanya pembatasan penyelenggaraan urusan dengan terbitnya UU 23/2014 yang menyebabkan kinerja pemerintah belum optimal.

4. Aspek Kesejahteraan

Upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator berupa angka kemiskinan di Kabupaten Natuna mengalami adanya hambatan seperti adanya pengaruh peningkatan garis kemiskinan (GK) dari pendapatan masyarakat, perekonomian Kabupaten Natuna masih bergantung pada sektor migas. Belum adanya lembaga seperti BUMD yang membantu proses transaksional sehingga SDM di OPD maupun pelaku ekonomi kinerjanya tidak optimal.

5. Aspek Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sector-sektor unggulan daerah dalam rangka mensejahterakan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Natuna mengalami adanya hambatan yang disebabkan oleh kurangnya akselerasi dalam peningkatan kualitas perekonomian makro. Selain itu adanya pandemi yang

menurunkan sektor perekonomian Kabupaten Natuna sehingga realisasi laju pertumbuhan ekonomi rendah. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang difokuskan pada perekonomian tradisional dirasa masih belum mampu meningkatkan perekonomian Natuna secara umum. Di bidang industri, beberapa permasalahan industri kecil menengah (IKM) terletak pada penguatan kualitas SDM yang masih lemah serta, minimnya dukungan pada sentra produk, serta penguatan mutu dan kontinuitas produk industri.

6. Aspek Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna terhalang oleh beberapa factor yang mendasari, diantaranya adalah ketimpangan golongan yang masih masuk ke sektor "moderat"(indeks gini 0,32-0,34) dan cenderung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun karena peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Berbagai kendala, khususnya kendala geografis, menjadi hambatan dalam pemerataan berbagai program pembangunan daerah karena wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar adalah kepulauan sehingga mempengaruhi proses pemerataan pembangunan infrastruktur maupun pemerataan aksesibilitas daerah.

7. Aspek Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup antar wilayah yang berbeda-beda serta geografis dan topografi yang berbeda sehingga menyebabkan kenaikan kualitas lingkungan hidup belum merata yang ditunjukkan dengan status indeks mutu air dan juga indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Natuna.

Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat rekomendasi bagi perumusan RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2025-2045, yaitu:

- a. Optimalisasi dalam pemerataan hasil pembangunan harus ditingkatkan oleh stakeholder mengingat capaian Indeks Gini yang masih perlu diturunkan kembali melalui peningkatan kesejahteraan berkeadilan. Hal ini juga terlihat dari masih belum tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat pada capaian akhir pembangunan sehingga untuk mewujudkannya perlu berfokus pada kebijakan bersangkutan.
- b. Kondisi pada poin a tidak terlepas dari belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan, khususnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Meskipun seluruh kecamatan sudah terakses jalan, namun jika dilihat hingga level kelurahan/desa maka belum seluruhnya memiliki akses pelabuhan, mengingat Natuna merupakan wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kebijakan dalam optimalisasi konektivitas dan aksesibilitas wilayah, khususnya akses melalui jalur laut perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.
- c. Pencapaian yang belum optimal dan perlu tindak lanjut lainnya adalah urusan pembangunan lingkungan hidup. Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih 83,33 persen (kategori Tinggi) dirasa

masih belum memuaskan pemerintah mengingat Kabupaten Natuna memiliki SDA yang melimpah. Adanya aktivitas ekonomi di seluruh sektor pembangunan, menjadikan potensi kerusakan lingkungan hidup meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dalam pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi sekaligus memperketat pengawasan kepada pengusaha yang bergerak di sektor pembangunan dengan potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

- d. Indeks Reformasi Birokrasi pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang memiliki capaian yang belum optimal dengan besaran capaian 82,35 (kategori Tinggi). Jika melihat dari kondisi tata kelola pemerintahan, belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi setiap kebijakan pembangunan menjadi poin penting belum terealisasinya reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ke depan, perlu adanya sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus mengoptimalkan dan mengefektifkan setiap penggunaan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan baik dari skala kelurahan/desa hingga perangkat daerah.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan memengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang memengaruhi laju



pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat memengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi memengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memerhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Kabupaten Natuna memiliki luas 264.145,56 km² dengan rincian 262.167,07 km² perairan (lautan) dan 1.978,49 Km² daratan. Tahun 2023 Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk 84,561 ribu penduduk. Kabupaten Natuna didominasi oleh sektor ekonomi Pertambangan dan Penggalian dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kedua sektor tersebut memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 106.131 jiwa di tahun 2045. Jika dilihat dari peningkatannya, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Natuna mengalami perlambatan yang mengindikasikan berjalannya program keluarga berencana dalam mengatur keluarga sejahtera dan sehat. Pada tahun 2045 juga kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna meningkat dengan capaian 51,55 jiwa/km².

Tabel II.29
Proyeksi Penduduk
Kabupaten Natuna, Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131

Sumber:Provinsi Kepulauan Riau, data diolah, 2023

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2023, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 105,78 dan terus menurun hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 104,10. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2045 nanti, diantara 100 perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.



Tabel II.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Natuna, Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	43,48	44.710	47.583	50.181	52.527	54.572
Perempuan	41.08	42.241	44.960	47.413	49.626	51.559
Rasio	105.78	105.71	105.32	104.95	104.56	104.10

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2023; data diolah

Terlihat pada struktur umur penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun), meskipun begitu jumlah penduduk usia non produktif juga terus mengalami peningkatan baik usia non produktif muda maupun struktur usia non produktif tua.

Pada proyeksi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna 2025-2045, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka di bawah 50 yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Natuna selama pelaksanaan pembangunan jangka panjang berada pada jendela kesempatan bonus demografi. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.

Tabel II.31
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Natuna 2025-2045

PARAMETER	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Komposisi Umur					
0-14	23,361	23,650	23,599	23,420	23,234
15-64	58,441	62,264	65,912	68,809	71,031
65+	5,148	6,628	8,083	9,924	11,867
Dependency Ratio	48.78	48.63	48.07	48.46	49.42

Sumber: Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna

Bonus demografi dapat menjadi akselerator bagi pencapaian pembangunan suatu wilayah. Bonus demografi memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara jika potensinya dimanfaatkan secara efektif. Dengan jumlah besar tenaga kerja relatif terhadap jumlah dependen, negara atau wilayah tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, konsumsi, dan investasi. Namun, manfaat ini tidak terjadi secara otomatis dan memerlukan kebijakan dan investasi yang tepat dalam pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan ekonomi.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja



dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Natuna, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya,memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri.

Tabel II.32
Proyeksi Kebutuhan Listrik Natuna, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Jumlah Rumah	NA	17.390	18.509	19.519	20.430	21.226
Proyek Kebutuhan Listrik (Juta VA)	NA	54,78	58,30	61,48	64,36	66,86

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah



Berdasarkan SNI 03-1733-2004 daya listrik minimum 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga dan 40 persen dari total kebutuhan rumah tangga di gunakan untuk kebutuhan sarana lingkungan dengan begitu menghasilkan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Natuna yaitu sebesar 54,78 juta VA di tahun 2025 dan 58,30 juta VA di 5 tahun selanjutnya, di tahun 2035 meningkat lagi menjadi 61,48 juta VA lalu di tahun 2040 adalah 64,36 hingga di tahun 2045 menjadi 66,86 juta VA. Kebutuhan sarana dan prasarana listrik ini berguna sebagai antisipasi sebagai jasa penyedia listrik untuk bisa mempersiapkan energi dengan besaran seperti pada tabel.

2. Air Minum/Bersih
- Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Tabel II.33
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Natuna, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Juta Liter)	NA	3.808,45	4.053,38	4.274,62	4.474,26	4.648,54

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah

Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada SNI 19-6728.1.2002 dengan asumsi kebutuhan air minum 120 l/jiwa dalam satu hari, menghasilkan proyeksi di tahun 2025 kebutuhan air minum adalah 3.808,45 juta liter hingga di tahun 2045 meningkat menjadi 4.648,54 juta liter.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan.
- Perhitungan kebutuhan unit rumah tempat tinggal menggunakan asumsi 5 jiwa dalam satu rumah yang menghasilkan perhitungan kebutuhan di tahun 2025 sebanyak 21.882 unit dan mengalami peningkatan kebutuhan unit rumah di tahun 2045 menjadi 25.978 unit.



Tabel II.34
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Natuna, 2005-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	20.856	21.882	22.550	23.833	24.808	25.978

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah

4. Fasilitas Pendidikan
- Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan pendidikan, didapatkan kebutuhan sarana prasarana pendidikan lebih rendah dibandingkan kondisi eksisting saat ini sehingga proyeksi kebutuhan disamakan dengan eksisting. Kebijakan lebih lanjut terkait kondisi pendidikan pada Kabupaten Natuna lebih diarahkan pada peningkatan mutu dan pemerataan aksesibilitas pendidikan.

Tabel II.35
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Natuna, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	75	75	77	78	79	80
- SD/MI	86	86	86	87	87	87
- SMP/MTs	41	42	42	42	43	44

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah

5. Fasilitas Kesehatan
- Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat. Penghitungan fasilitas kesehatan yang sesuai standar berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pada tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana rumah sakit sebanyak 2 unit dimana kondisi ini merupakan kondisi eksisting sehingga kebutuhan rumah sakit menggunakan



kondisi eksisting (jumlah hitungan dari SNI 03-1733-2004 lebih rendah dibandingkan eksisting. Sedangkan pada fasilitas kesehatan lainnya, terjadi kenaikan dibandingkan kondisi saat ini dimana untuk unit puskesmas memiliki kebutuhan sebanyak 19 unit pada tahun 2045 yang disesuaikan dengan jumlah kecamatan saat ini. Adapun kebutuhan fasilitas kesehatan ada tahun 2045 seperti klinik bersalin sebanyak 4 unit; praktek dokter sebanyak 21 unit; dan apotek/rumah obat sebanyak 4 unit.

Tabel II.36
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Natuna

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
- Puskesmas	15	15	17	19	19	19
- Klinik Bersalin	NA	3	3	3	3	4
- Praktek Dokter	NA	17	19	20	20	21
- Apotek/Rumah Obat	3	3	3	3	3	4

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah dan sampah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, secara otomatis timbulan sampah, khususnya sampah rumah tangga akan mengalami peningkatan. Adapun proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Natuna hingga 2045 diperkirakan mencapai 96,84 juta liter per tahun. Diharapkan perkiraan timbulan sampah ini dapat menjadi acuan kebijakan dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana.

Tabel II.37
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Natuna

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	84.561	86.951	92.543	97.594	102.153	106.131
Proyeksi Timbulan Sampah (Juta Liter)	NA	79.34	84.45	89.05	93.21	96.84
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (Unit)	NA	1	1	1	1	1

Sumber: SNI 03-1733-2004, Data proyeksi BPS Kabupaten Natuna, data diolah

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

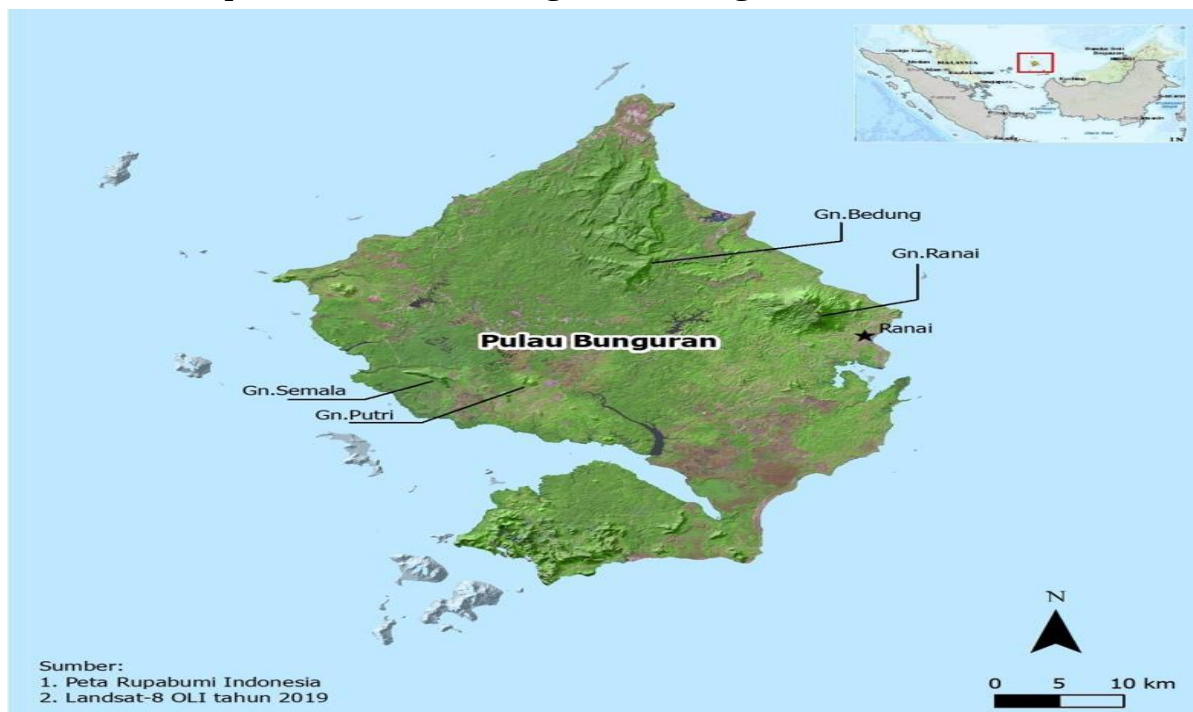
2.7.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna

2.7.1.1 Karakteristik Spasial Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna memiliki luas 264.145,56 km² dimana sebagian besar terdiri dari perairan yakni seluas 262.197,07 km² dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 1.978,49 km².

Kabupaten Natuna memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 %) yang berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni (82,47%). Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan. Secara administrative Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Subi dan Serasan Timur.

Secara topografis, Kabupaten Natuna terdiri dari tanah berbukit dan gunung batu. Daratan rendah dan landai pada umumnya terdapat di pinggiran pantai. Kondisi fisik Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Hampir 10% dari wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakan daratan rendah dan landai terutama di pinggiran pantai, 65% berombak dan 25% berbukit sampai bergunung. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3-959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2-5 meter.



Gambar II.33

Peta Rupa Bumi Kabupaten Natuna

Keterangan: diakses pada tahun 2019

2.7.1.2 Perkembangan Spasial Kabupaten Natuna

Secara normatif, pengembangan spasial Kabupaten Natuna tidak terlepas dari rancangan regulasi terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Natuna. Sebelumnya, instrument RTRW Kabupaten Natuna tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031. Namun saat ini terdapat perubahan terbaru atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna tahun 2021-2041.

Perubahan tersebut merupakan bentuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pasca evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perubahan ini tentu mengacu pada upaya untuk memperbaharui berbagai kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini dan perkiraan pada masa mendatang. Salah satu poin penting perubahan adalah tujuan penataan ruang wilayah dengan adanya penambahan sektor pembangunan dalam upaya perwujudan ruang Natuna sehingga menjadi:

“Mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, berdaya saing berbasis agrominawisata, pertambangan, industri, serta pertahanan dan keamanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Hirarki Struktur Ruang Kabupaten Natuna

Perubahan ataupun revisi terhadap dokumen rencana tata ruang Kabupaten Natuna tentunya akan berimplikasi terhadap Struktur, Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna. Berikut ini merupakan hirarki struktur penataan ruang Kabupaten Natuna berikut fungsi yang dimilikinya. Dalam kerangka sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD) dan spasial (RTRW), maka indikasi struktur ruang Kabupaten Natuna dalam Hirarki Struktur Ruang dapat menjadi bingkai arahan agar rancangan skenario pembangunan dalam RPJPD sesuai dengan RTRW.

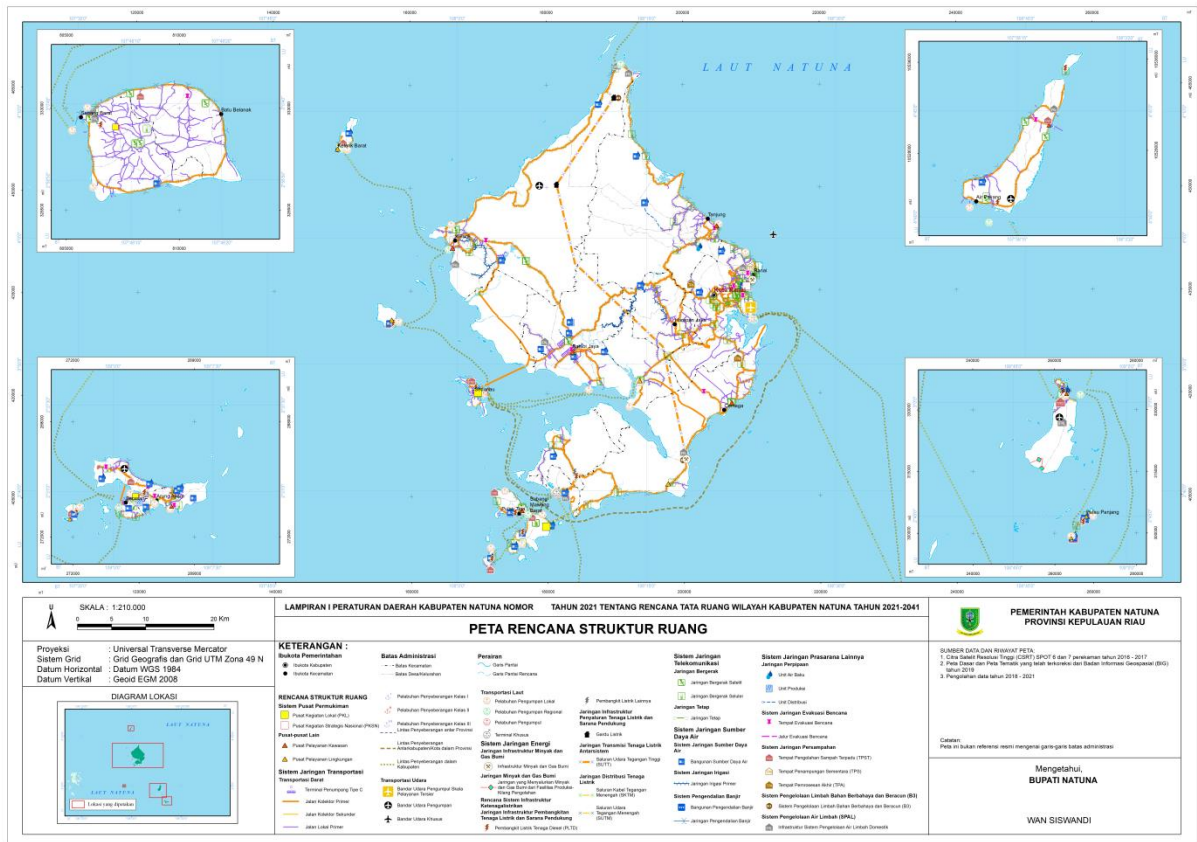
Ditinjau dalam perspektif struktur kota Kabupaten Natuna, maka susunan sistem pusat pengembangan wilayah terdiri penetapan sistem pusat permukiman sebagai berikut:

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) •Kecamatan Bunguran Timur
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) •Kecamatan Serasan
•Kecamatan Bunguran Barat
•Kecamatan Pulau Tiga
•Kecamatan Midai
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) •Kecamatan Bunguran Utara
•Kecamatan Bunguran Batubi
•Kecamatan Bunguran Selatan
•Kecamatan Pulau Laut
•Kecamatan Subi
•Kecamatan Bunguran Timur Laut
•Kecamatan Serasan Timur
•Kecamatan Pulau Tiga Barat
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) •Kecamatan Pulau Seluan
•Kecamatan Bunguran Barat
•Kecamatan Bunguran Selatan



- Kecamatan Pulau Panjang
- Kecamatan Pulau Panjang
- Kecamatan Serasan

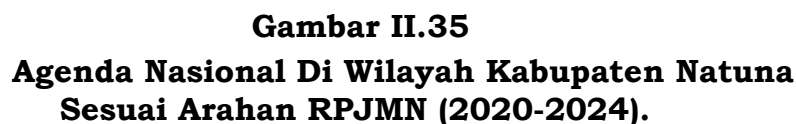
Berikut merupakan gambaran atas hirarki struktur penataan ruang di Kabupaten Natuna:



Gambar II.34
Hirarki/Struktur Tata Ruang Kota Di Kabupaten Natuna

Sebagai salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), maka Kabupaten Natuna memiliki arahan/mandate pengembangan sesuai dengan agenda nasional (*State spaces*). Oleh karenanya, Kabupaten Natuna merupakan wilayah proyeksi dari program dan kebijakan nasional. Secara umum pengembangan infrastruktur vital di bidang energi maupun konektivitas transportasi di Kabupaten Natuna merupakan bagian dari agenda nasional. Infrastruktur dasar lainnya juga tercakup dalam program nasional.

Berikut ini merupakan gambaran dari agenda nasional di wilayah Kabupaten Natuna sesuai arahan RPJMN (2020-2024).



Arahan RTRW Provinsi Kepulauan Riau Terkait Kabupaten Natuna

1. Pelabuhan Penyeberangan Penagi – Kab. Natuna
2. Pelabuhan Penyeberangan Selat Lampah – Kab. Natuna
3. Sarana penimbunan minyak dan gas (migas) yang meliputi terminal minyak dan gas (Selat Lampah)
4. Jaringan Transmisi Minyak dan Gas Bumi:
 - West Natuna Transport System (WNTS) Tite In ke Pulau Pemping – Jaringan Tanjung Ugang Batam;
 - Natuna Blok D-Aita (East Natuna) – Kabupaten Natuna – Kabupaten Kepulauan Anambas – Kota Batam – Kota
5. Penyediaan sarana prasarana pembangkit, transmisi dan distribusi meliputi PLTD Ranai, PLTD Kelarik, PLTD Sedanau, PLTD Midai, PLTD Serrasan, PLTD di Pulau Subi, PLTD Pulau Laut, PLTD Pulau Tiga, PLTS Komunal Pulau Subi, PLTS Komunal Pulau Tiga
6. Pengembangan Sistem Jaringan Ketenagalistrikan:
 - Gardu induk/Hubung di Natuna terdiri atas gardu induk di Kelarik dan Ranai;
 - Pemenuhan kebutuhan gas bagi pembangkit dari pipa cabang West Natuna Transportation System (WNTS)-Pulau Pemping-Tanjung Ugang;
7. Instalasi pengolahan air (IPA) di Pulau Bunguran, Pulau Midai
8. Pelabuhan Perikanan Samudera
9. Pelabuhan Perikanan Pantai
10. Kawasan Industri Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga
11. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekwilata, dan wisata minat khusus
12. Kawasan Konservasi Perairan: Bunguran Urara, Bunguran Timur, Pulau Tiga, dan Sedanau
13. Kabupaten Natuna sebagai Kawasan Minapolitan
14. Kabupaten Natuna sebagai Kawasan Minapolitan
15. Kabupaten Natuna sebagai Kawasan Minapolitan
16. Kabupaten Natuna sebagai Kawasan Minapolitan

Gambar II.36
Arahan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
terkait pengembangan wilayah Kabupaten Natuna

- a. Kawasan Perkotaan Ranai
- b. Kawasan Minapolitan
- c. Kawasan Agropolitan
- d. Kawasan Peternakan

Kecamatan Bunguran Timur
Kecamatan Pulau Tiga
Kecamatan Bunguran Batubi
Kecamatan Bunguran Utara
Kecamatan Bunguran Tengah
Kecamatan Bunguran Barat



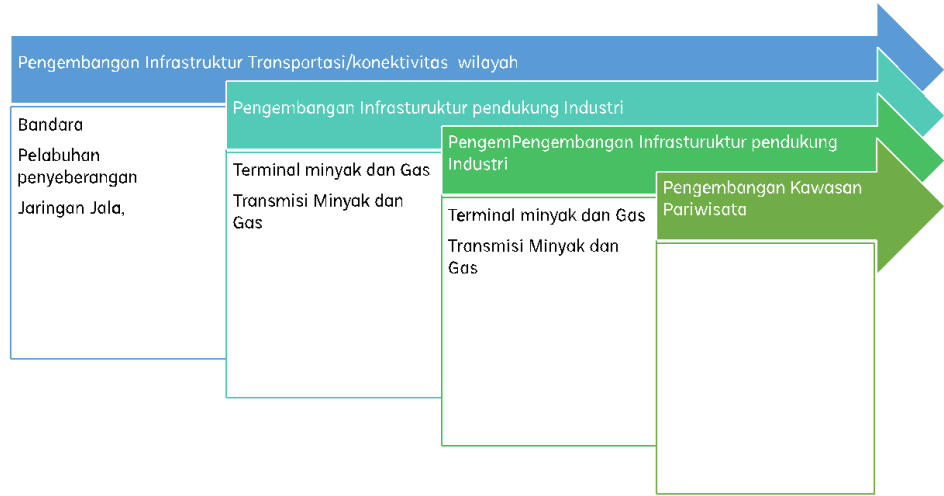
e. Kawasan Sentra Budidaya Perikanan

f. Kawasan Pariwisata

g. Kawasan Industri

- Kecamatan Bunguran Selatan
- Kecamatan Bunguran Tengah
- Kecamatan Bunguran Timur Laut
- Kecamatan Bunguran Barat
- Kecamatan Pulau Tiga
- Kecamatan Pulau Tiga Barat
- Kecamatan Bunguran Selatan
- Kecamatan Pulau Tiga
- Kecamatan Bunguran Timur
- Kecamatan Bunguran Timur Laut
- Kecamatan Serasan
- Kecamatan Serasan Timur
- Kecamatan Bunguran Barat
- Kecamatan Bunguran Utara
- Kecamatan Midai
- Kecamatan Subi
- Kecamatan Pulau Laut
- Kecamatan Bunguran Selatan
- Kecamatan Pulau Tiga
- Kecamatan Pulau Tiga Barat
- Kecamatan Bunguran Utara

Secara prinsip, substansi yang tertuang dalam arahan penataan struktur ruang Kabupaten Natuna, terdiri atas prioritas pengembangan wilayah sebagai berikut:



Gambar II.37
Indikasi Arahan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

2.7.1.3 Pola Ruang Kabupaten Natuna

Berikutnya, realisasi atas struktur ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis di Kabupaten Natuna perlu ditinjau dari daya dukung ruang spasial



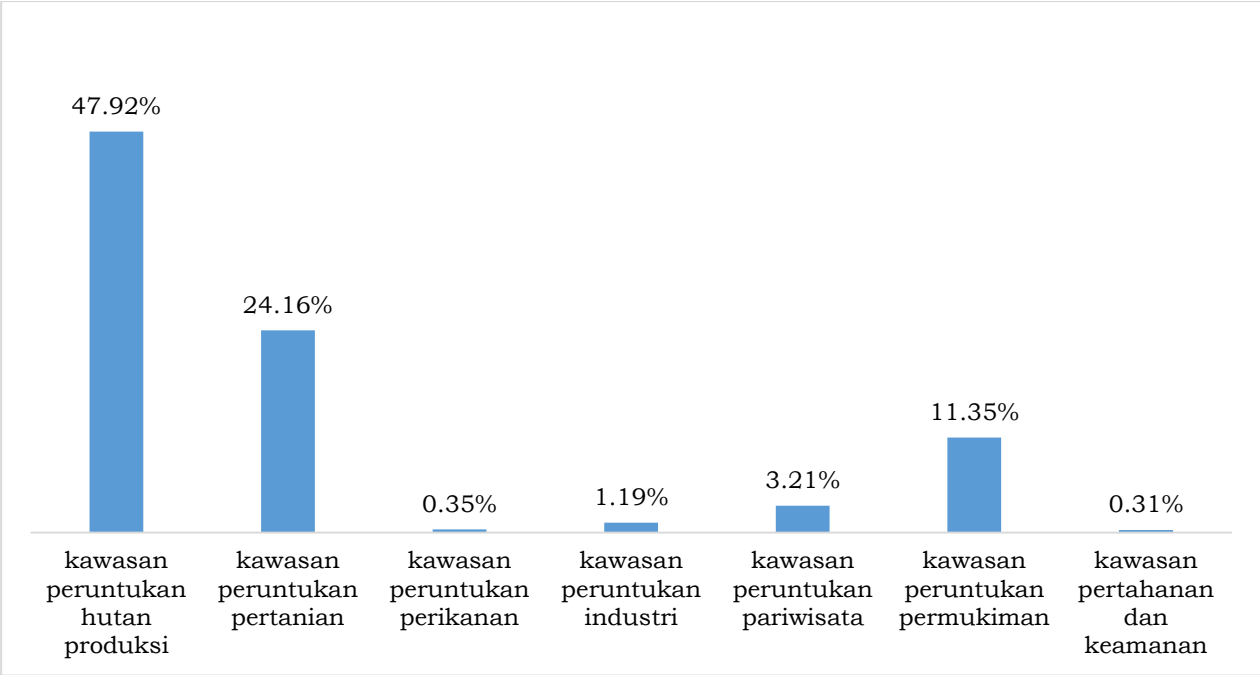
Kabupaten Natuna. Daya dukung atas Tujuan dan struktur tersebut dapat ditinjau dari alokasi pola ruang Kabupaten Natuna.

Secara umum, proporsi terbesar dalam alokasi pola ruang budidaya di Kabupaten Natuna terdiri atas alokasi untuk Kawasan peruntukkan hutan produksi (47,92%), kawasan peruntukan pertanian (24,16%) serta kawasan peruntukan permukiman (11,35%).

Adapun rencana alokasi pola ruang bagi peruntukkan kawasan industri adalah sebesar 2.349 Ha atau sekitar 1,19% dari total luas wilayah. Luasan tersebut lebih besar dari KEK Galang Kota Batam yang hanya seluas 1.800 Ha. Adanya alokasi industri Kabupaten Natuna tersebut mendukung uraian tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna sebagai salah satu wilayah industri kedepannya. Apabila

Tabel II.38
Alokasi Pola Ruang Kawasan Budidaya

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	kawasan peruntukan hutan produksi	94.797	47,92%
2	kawasan peruntukan pertanian	47.804	24,16%
3	kawasan peruntukan perikanan	699	0,35%
4	kawasan peruntukan industri	2.349	1,19%
5	kawasan peruntukan pariwisata	6.360	3,21%
6	kawasan peruntukan permukiman	22.458	11,35%
7	kawasan pertahanan dan keamanan	619	0,31%

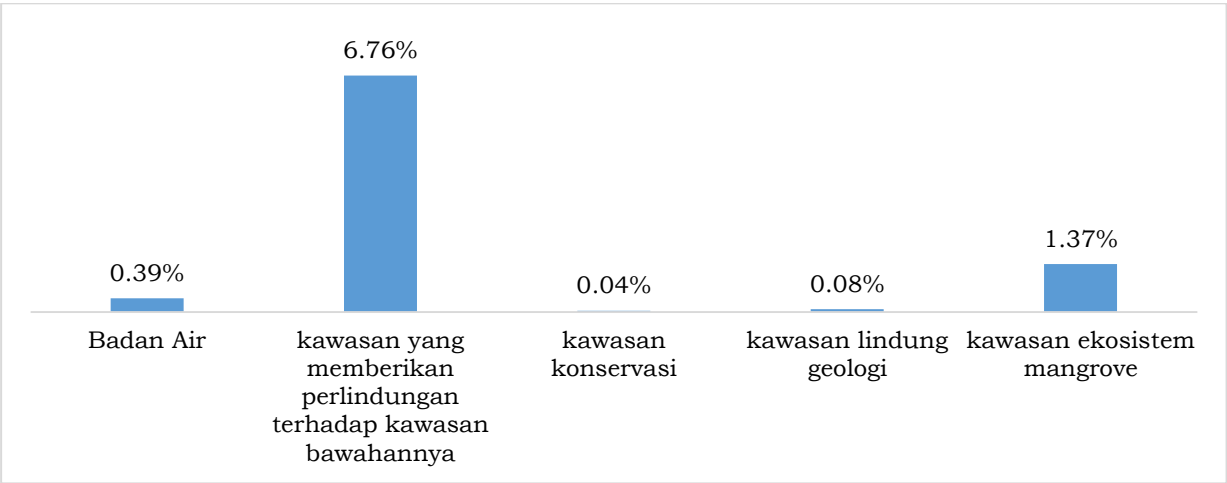


Gambar II.38
Grafik Alokasi Pola Ruang di Kabupaten Natuna

Selain alokasi bagi kawasan budidaya, Kabupaten Natuna juga mengalokasikan ruang untuk Kawasan konservasi atau Kawasan Lindung. Salah satu alokasi terbear dalam kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

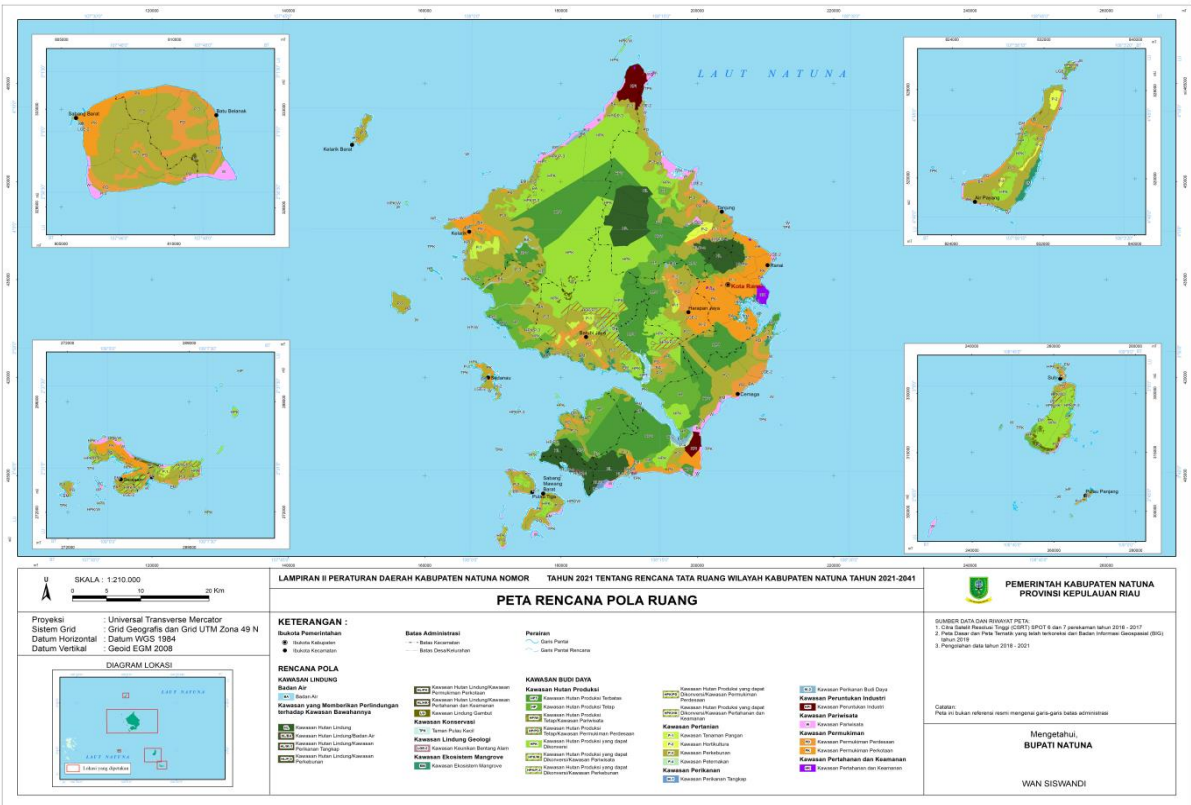
Tabel II.39

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
1	Badan Air	768	0,39%
2	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	13.383	6,76%
3	kawasan konservasi	70	0,04%
4	kawasan lindung geologi	150	0,08%
5	kawasan ekosistem mangrove	2.711	1,37%



Gambar II.39

Berikut merupakan peta pola ruang Kabupaten Natuna:



Gambar II.40



Adapun secara strategi prioritas pengembangan sektor ekonomi berdasarkan daya dukung spasial bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan hutan produksi
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat
- d. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan
- e. Mengembangkan industri pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja
- f. Mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata

Arahan lebih mendetail mengenai kinerja RTRW Kabupaten Natuna dapat diidentifikasi pada tabel kinerja berikut ini:



Tabel II.40
Kinerja RTRW Kabupaten Natuna

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
A.	Terwujudnya Struktur Ruang			
1	Terwujudnya sistem pusat permukiman	Terbangunnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	● Kecamatan Bunguran Timur	
		Terbangunnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	● Kecamatan Serasan ● Kecamatan Bunguran Barat ● Kecamatan Pulau Tiga ● Kecamatan Midai	
		Terbangunnya Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	● Kecamatan Bunguran Utara ● Kecamatan Bunguran Batubi ● Kecamatan Bunguran Selatan ● Kecamatan Pulau Laut ● Kecamatan Subi ● Kecamatan Bunguran Timur Laut ● Kecamatan Serasan Timur ● Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		Terbangunnya Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	● Kecamatan Pulau Seluan ● Kecamatan Bunguran Barat ● Kecamatan Bunguran Selatan ● Kecamatan Pulau Panjang ● Kecamatan Pulau Panjang ● Kecamatan Serasan	
2	Terwujudnya sistem jaringan transportasi	Terbangunnya sistem jaringan jalan	● Jaringan Jalan Kolektor	
			● Jaringan Jalan Lokal	
			● Terminal Penumpang Tipe C - Kecamatan Bunguran Timur	
		Terbangunnya sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan	● lintas penyeberangan antarprovinsi - Dompak' (Tanjungpinang-Tambelan-Sintete-Serasan-Penagi (Kabupaten Natuna).	
			● lintas penyeberangan antar kabupaten/Kota - Dompak (Tanjungpinang)-Letung (Kuala Marasj-Tarempa-Sedanau-Penagi (Kabupaten Natuna)	
			● lintas penyeberangan dalam Kabupaten - Selat Lampa-Sabang Mawang-Sededap - Selat Lampa-Tanjung Kumbik - Selat Lampa-Midai - Midai-Subi - Subi-Pulau Panjang-Kerdau - Subi-Serasan - Serasan-Batu Berian - Sedanau-Kelarik-Seluan-Selaut - Sedanau-Batubi - Teluk Buton-Pulau Laut - Penagi-Subi - Penagi-Serasan - Binjai-Sedanau - Sedanau-Selat Lampa	
			● Pelabuhan laut - pelabuhan pengumpul ○ Kecamatan Pulau Tiga - pelabuhan pengumpan regional ○ Kecamatan Bunguran Timur ○ Kecamatan Bunguran Utara	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			- o Kecamatan Subi - o Kecamatan Pulau Seluan - o Kecamatan Pulau Laut - o Kecamatan Bunguran Utara - o Kecamatan Pulau Tiga - o Kecamatan Serasan - pelabuhan pengumpan lokal - o Kecamatan Pulau Seluan - o Kecamatan Bunguran Utara - o Kecamatan Bunguran Timur Laut - o Kecamatan Bunguran Timur - o Kecamatan Bunguran Barat - o Kecamatan Serasan - o Kecamatan Serasan Timur - o Kecamatan Bunguran Barat - o Kecamatan Bunguran Batubi - o Kecamatan Pulau Tiga - o Kecamatan Pulau Tiga Barat - o Kecamatan Subi - o Kecamatan Pulau Panjang - o Kecamatan Midai - o Kecamatan Suak Midai - o Kecamatan Pulau Laut - terminal khusus pelabuhan minyak dan gas bumi - o Kecamatan Pulau Tiga	
		Terbangunnya Bandar udara umum dan bandar udara khusus	• Bandar Udara Pengumpul - Kecamatan Bunguran Timur	
			• Bandar Udara Pengumpan - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Serasan - Kecamatan Subi - Kecamatan Pulau Laut	
			• Bandar Udara Khusus - Kecamatan Bunguran Timur	
3	Terwujudnya sistem jaringan energi	Terbangunnya jaringan infrastruktur minyak dan gas	• Infrastruktur Minyak dan gas bumi - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan	
			• Jaringan minyak dan gas bumi - Kecamatan Subi	
		Terbangunnya jaringan ketenagalistrikan	• infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) - o Kecamatan Bunguran Timur - o Kecamatan Pulau Tiga - o Kecamatan Bunguran Barat - o Kecamatan Midai - o Kecamatan Serasan - o Kecamatan Subi - o Kecamatan Pulau Laut - o Kecamatan Pulau Tiga Barat - o Kecamatan Pulau Panjang - o Kecamatan Pulau Seluan - Pembangkit listrik lainnya - o Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan - o Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Penarik di	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			Kecamatan Bunguran Selatan	
			• Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung - jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem - o Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Penarik - Harapan Jaya-Kelarik-Teluk Buton - jaringan distribusi tenaga listrik - o Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM) - o Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) - gardu listrik - o gardu listrik kawasan bandar udara Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara - o gardu listrik kawasan industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara	
4	Terwujudnya sistem jaringan telekomunikasi	Terbangunnya jaringan tetap	• jaringan kabel telepon perkotaan Ranai • jaringan kabel telepon Ranai-Sungai Ulu-Kelarik • jaringan kabel telepon Ranai-Teluk Buton • jaringan kabel telepon Ranai-Sungai Ulu-Selat Lampa • jaringan kabel fiber optic perkotaan Ranai di Kecamatan Bunguran Timur • jaringan kabel fiber optic Pulau Sedanau di Bunguran Barat • jaringan kabel fiber optic Pulau Serasan di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur • jaringan kabel fiber optic Pulau Midai di Kecamatan Midai dan Suak Midai • jaringan kabel fiber optic Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut • jaringan kabel fiber optic Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi • jaringan kabel fiberoptic Pulau Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat • jaringan kabel fiber optic Pulau Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga • jaringan kabel fiber optic Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Utara (Kelarik) • jaringan kabel fiber optic Kecamatan Bunguran Timur-Kecamatan Bunguran Timur Laut-Kecamatan Bunguran Utara (Teluk Buton) • jaringan kabel fiber optic Kecamatan Bunguran Timur-Kecamatan Bunguran Selatan-Kecamatan Bunguran Barat-Kecamatan Pulau Tiga	
		Terbangunnya jaringan bergerak	• Base Transceiver System (BTS) - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Utara	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			- Kecamatan Pulau Seluan - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Midai - Kecamatan Suak Midai - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Subi - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur	
			• Very Small Aperture Terminal (VSAT) - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Pulau Tiga - Kecamatan Bunguran Pulau Tiga Barat - Kecamatan Midai - Kecamatan Suak Midai - Kecamatan Subi - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur.	
5	Terwujudnya sistem jaringan sumber daya air	Terbangunnya sumber air untuk irigasi	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Tengah • Kecamatan Bunguran Batubi • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Subi • Kecamatan Serasan Timur	
		Terbangunnya sistem pengendalian banjir	• Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Pulau Seluan • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Pulau Tiga • Kecamatan Pulau Tiga Barat • Kecamatan Pulau Panjang • Kecamatan Subi • Kecamatan Midai • Kecamatan Suak Midai • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur	
		Terbangunnya bangunan sumber daya air	• Embung - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Pulau Seluan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
6	Terwujudnya sistem jaringan prasarana lainnya		- Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Subi - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Midai	
			• Bendung - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Bunguran Barat	
		Terbangunnya sistem penyediaan air minum	• Unit Air Baku - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Pulau Seluan - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Midai	
			• Unit Produksi - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Subi - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Midai	
			• Unit Distribusi - Seluruh Kecamatan	
		Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	• Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Midai - Kecamatan Subi - Kecamatan Serasan	
		Terbangunnya sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Pulau Tiga	
		Terbangunnya sistem jaringan persampahan wilayah	• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) - Kecamatan Bunguran Timur	



KINERJA WAJIB SESUAI RTRW				
NO	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL	LOKASI	KETERANGAN
			• Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) - Pulau Serasan - Pulau Sedanau - Pulau Subi - Pulau Midai - Pulau Sabang Mawang - Pulau Laut - Pulau Seluan - Pulau Panjang - Pulau Kerdau - Pulau Batu Berian Besar - Pulau Selaut - Pulau Tanjung Kumbik - Pulau Sededap	
			• Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPS) - Kecamatan Bunguran Timur	
		Terbangunnya sistem jaringan evakuasi bencana	• Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Bunguran Batubi • Kecamatan Midai • Kecamatan Suak Midai • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur	
B.	Terwujudnya Pola Ruang			
1	Terwujudnya kawasan peruntukan lindung	Terlindunginya kawasan badan air	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Bunguran Batubi • Kecamatan Bunguran Tengah • Pulau Subi • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur • Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Pulau Tiga	Luas = 768 Ha
		Terlindunginya kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya	• Kawasan Hutan Lindung - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Pulau Tiga	Luas = 11.969 Ha
			• Kawasan Lindung Gambut - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Suak Midai - Kecamatan Subi - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur	
		Terlindunginya kawasan konservasi	• Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur	Luas = 70 Ha



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			• Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Pulau Seluan • Kecamatan Pulau Tiga • Kecamatan Pulau Tiga Barat • Kecamatan Pulau Panjang • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur • Kecamatan Subi	
		Terlindunginya kawasan lindung geologi	• Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Tengah • Kecamatan Serasan Timur • Kecamatan Midai • Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Serasan	Luas = 150 Ha
		Terlindunginya kawasan ekosistem mangrove	• Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Batubi • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Pulau Tiga • Kecamatan Pulau Tiga Barat • Kecamatan Pulau Panjang • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur • Kecamatan Subi	Luas = 2.711 Ha
2	Terwujudnya kawasan peruntukan budi daya	Terbangunnya kawasan peruntukan hutan produksi	• Hutan Produksi Terbatas - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Tiga	Luas = 34.059 Ha
			• Hutan Produksi Tetap - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi	Luas = 15.246 Ha
			• Hutan Produksi yang dapat Dikonversi - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Tiga	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			- Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi - Kecamatan Midai	
		Terbangunnya kawasan peruntukan pertanian	• kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi	Luas = 1.898 Ha
			• kawasan peruntukan hortikultura - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Pulau Laut	Luas = 763 Ha
			• kawasan peruntukan perkebunan - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi - Kecamatan Midai - Kecamatan Pulau Seluan - Kecamatan Suak Midai	Luas = 44.954 Ha
			• kawasan peruntukan peternakan - Kecamatan Bunguran Selatan	Luas = 189 Ha
		Terbangunnya kawasan peruntukan perikanan	• perikanan tangkap - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Serasan - Kecamatan Subi - Kecamatan Suak Midai	Luas = 170 Ha
			• Perikanan budi daya - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah	Luas = 529 Ha
		Terbangunnya kawasan peruntukan industri	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Batubi • Kecamatan Pulau Tiga • Kecamatan Serasan • Kecamatan Subi	Luas = 2.349 Ha



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			• Kecamatan Midai	
		Terbangunnya kawasan peruntukan pariwisata	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut • Kecamatan Bunguran Timur • Kecamatan Bunguran Selatan • Kecamatan Bunguran Barat • Kecamatan Pulau Laut • Kecamatan Pulau Tiga • Kecamatan Pulau Tiga Barat • Kecamatan Pulau Panjang • Kecamatan Serasan • Kecamatan Serasan Timur • Kecamatan Subi • Kecamatan Midai • Kecamatan Pulau Seluan • Kecamatan Suak Midai	Luas = 6.360 Ha
		Terbangunnya kawasan peruntukan permukiman	• kawasan permukiman perkotaan - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Midai - Kecamatan Serasan - Kecamatan Suak Midai	Luas = 14.144 Ha
			• Kawasan permukiman perdesaan - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Batubi - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Bunguran Tengah - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat - Kecamatan Pulau Panjang - Kecamatan Subi - Kecamatan Pulau Seluan - Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Midai - Kecamatan Suak Midai	Luas = 8.314 Ha
		Terbangunnya kawasan pertahanan dan keamanan	• Seluruh Kecamatan	Luas = 619 Ha
C.	Terwujudnya Kawasan Strategis			
1	Terwujudnya kawasan strategis Nasional		• Pulau Kecil Terluar - Pulau Subi Kecil - Pulau Sekatung - Pulau Sebetul - Pulau Semiun - Pulau Tokong Boro - Pulau Senua - Pulau Kepala.	
			• Kawasan Perbatasan Negara - Kecamatan Bunguran Utara - Kecamatan Bunguran Timur Laut - Kecamatan Bunguran Timur - Kecamatan Bunguran Selatan - Kecamatan Bunguran Barat - Kecamatan Pulau Laut - Kecamatan Pulau Tiga - Kecamatan Pulau Tiga Barat	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			- Kecamatan Serasan - Kecamatan Serasan Timur - Kecamatan Subi	
2	Terwujudnya kawasan strategis provinsi	Terbangunnya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	• Kecamatan Bunguran Utara • Kecamatan Bunguran Timur Laut	
3	Terwujudnya kawasan strategis kabupaten	Terbangunnya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	• kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara • kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi • kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur	
		Terbangunnya kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	• Kampung Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat • Kampung Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur	

2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Natuna

Secara teoritis, pusat pertumbuhan atau growth pole merupakan suatu teori sekaligus konsep yang telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan dalam suatu wilayah. Teori Growth Pole, atau Pole Pertumbuhan, adalah konsep ekonomi regional yang pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi Perancis, François Perroux, pada tahun 1950-an. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pola pertumbuhan ekonomi regional dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Teori Growth Pole mengajukan bahwa dalam suatu wilayah atau daerah tertentu, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendorong (propeler) bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya. Pusat pertumbuhan ini dapat muncul karena adanya investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang berkembang pesat di wilayah tersebut.

Isitlah propeler atau pendorong digunakan karena Pole pertumbuhan dianggap sebagai motor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Pusat pertumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, merangsang aktivitas ekonomi, dan mendorong pengembangan infrastruktur di sekitarnya.

Memandang kerangka teoritis di atas, Growth Pole atau pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (derah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota

tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut.

Identifikasi terhadap pusat pertumbuhan di tingkat wilayah Kabupaten/kota, dalam hal ini kabupaten Natuna tentunya dapat ditinjau dari embrio pusat-pusat pertumbuhan yang secara umum telah menunjukkan identitas sebagai pusat pertumbuhan secara empiris. Selain itu ditinjau dari pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, identifikasi pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau dari penetapan Sistem pusat dalam hirarki struktur penataan ruang serta penetapan kawasan strategis yang secara yuridis dapat berupa Kawasan Strategid Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

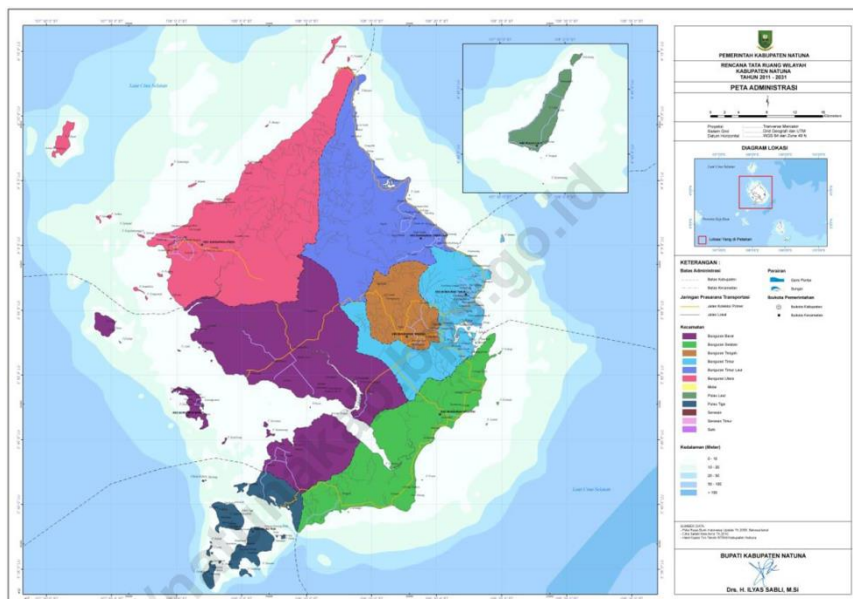
Oleh karenanya, tinjauan kedudukan Kabupaten Natuna perlu dilihat dari sudut pandang nasional dan regional secara konstelatif. Identifikasi kemudian dilanjutkan untuk meninjau pusat-pusat pertumbuhan dalam skala kewilayahan dalam batas administrasi Kabupaten Natuna.

2.7.3 Kedudukan Kabupaten Natuna Kawasan Strategis Nasional

Secara nasional, Kabupaten Natuna adalah salah satu wilayah perbatasan di Indonesia. Kabupaten Natuna terletak di wilayah perbatasan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar, maka kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya telah ditetapkan sesuai PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional menjadi salah satu **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan, di mana usaha dan atau kegiatannya berdampak besar terhadap kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan internasional, nasional serta regional.

Beberapa kriteria kawasan tertentu yang dapat terpenuhi di Kawasan Natuna antara lain karena mempunyai: Potensi Sumber Daya Alam yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan Politik ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan dan keamanan serta pengembangan wilayah sekitarnya. Potensi Sumber Daya Alam yang besar serta kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lain, baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitar maupun wilayah negara.

Secara geografis, posisi dan letak Kabupaten Natuna sangat menguntungkan karena berada pada posisi silang jalur Pelayaran Internasional. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Sebagai wilayah yang berada pada posisi silang jalur Pelayaran Internasional, Natuna memiliki arti penting dalam perekonomian.



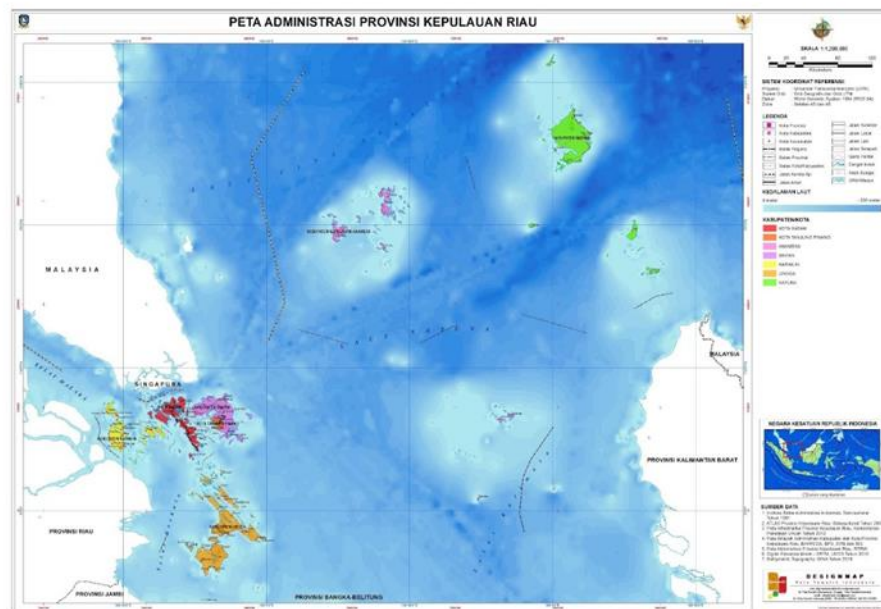
Gambar II.41

Kedudukan Geografis Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Secara regional, Kabupaten Natuna merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Arah kebijakan pembangunan secara regional dalam kerangka Provinsi Riau mencakup penetapan fungsi Pusat-Pusat Kegiatan baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan sentra- sentra produksi, dimana Kabupaten Natuna juga memainkan peranan krusial. Selain itu konektivitas antar wilayah melalui pengembangan dan peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah hinterland serta pengembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah perbatasan menjadi bagian tidak terpisahkan.

Dalam Perda Rtrw Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 Kabupaten Natuna sendiri memiliki kedudukan strategis secara sebagai **Pusat Kegiatan Strategis Nasional** dan **Pusat Kegiatan Lokal**. Adapun secara terperinci pusat kegiatan di Provinsi Riau terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Kawasan Perkotaan Batam.
0. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 1. Kawasan Perkotaan Tanjungpinang, Daik Lingga, Dabo – Pulau Singkep, Tarempa, dan Tanjung Balai Karimun.
0. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
Kawasan Perkotaan Batam, **Ranai** dan Tarempa.
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
Perkotaan Tanjung Batu, Moro, Meral, Bandar Seri Bintan, Tanjung Uban, Kijang, Letung, Tebangladan, Sedanau, **Serasan**, Senayang, Pancur, Tambelan, **Midai**, dan **Pulau Tiga**



Gambar II.42
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

Adapun peranan bagi Kabupaten Natuna dalam hal ini kawasan strategis perkotaan Ranai sebagai PKSN antara lain:

- . Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna
- . Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara.
- . Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional.
- . Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional.
- . Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global.
- . Simpul transportasi laut nasional dan internasional.
- . Simpul transportasi udara nasional.
- . Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional.
- . Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan.
- . Pusat perdagangan dan jasa skala regional.

Selanjutnya, implikasi penetapan Kabupaten Natuna sebagai PKSN, maka rencana pembangunan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Natuna berdasarkan arahan rencana secara regional (Provinsi Kepulauan Riau) antara lain mencakup:

1. Pengembangan Jaringan pipa minyak dan gas bumi :
 1. Natuna-Singapura (WNTS);
 1. West Natuna Transport System (WNTS) Tie in ke Pulau Pemping – Jaringan Tanjung Uncang Batam; dan
 1. Natuna Blok D-Alfa (East Natuna) – Kabupaten Natuna – Kabupaten Kepulauan Anambas – Kota Batam – Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan – Kabupaten Karimun -Duri (Riau);
 1. Rencana Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal di Kota Batam, Kabupaten Bintan yang dapat diangkut dengan kapal tanker, pipa dan truk untuk kebutuhan Kabupaten Karimun



Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan provinsi-provinsi lainnya;

1. Sarana penimbunan minyak dan gas (migas) yang meliputi terminal minyak dan gas yang terdapat di Kota Batam (Pulau Sambu, Kabil, Janda Berhias, Kepala Jeri, dan Tanjung Sauh), Kabupaten Bintan (Kijang dan Tanjung Uban) Kabupaten Natuna (Selat Lampa), Kabupaten Kepulauan Anambas (Pulau Matak dan Pulau Jemaja, Kabupaten Karimun (Pulau Karimun dan Pulau Karimun Anak), dan Kabupaten Lingga
2. Pengembangan Zona Lindung:
 1. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Natuna, meliputi perairan di sekitar Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga dan Sedanau, juga kawasan-kawasan binaan COREMAP, dan kawasan pengembangannya;
3. Pengembangan Kawasan Budidaya:
 1. Kawasan perikanan budidaya air laut meliputi pengembangan kawasan peruntukan perikanan ditujukan untuk pengembangan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.
 1. Kawasan perikanan budidaya air tawar
 1. Kawasan perikanan budidaya air payau
 1. Kawasan minapolitan
 1. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata, dan wisata minat khusus;
 1. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri Serantas di Kecamatan Pulau Tiga).

2.7.4 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Penguatan terhadap kedudukan normatif Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Natuna ditinjau dari penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 9 tahun 2018 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Natuna. Penguatan ini selaras dengan kondisi empiris dan perencanaan spasial Kabupaten Natuna. Adanya KSCT dimaksudkan agar prioritas pengembangan pusat pertumbuhan potensial di Kabupaten Natuna diselenggarakan sesuai dengan potensi kewilayahan dan unggulan setiap kawasan dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya spesifik.

Adapun penjabaran Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Natuna meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Ranai
2. Kawasan Minapolitan
3. Kawasan Agropolitan
4. Kawasan Peternakan
5. Kawasan Sentra Budidaya Perikanan
6. Kawasan Pariwisata



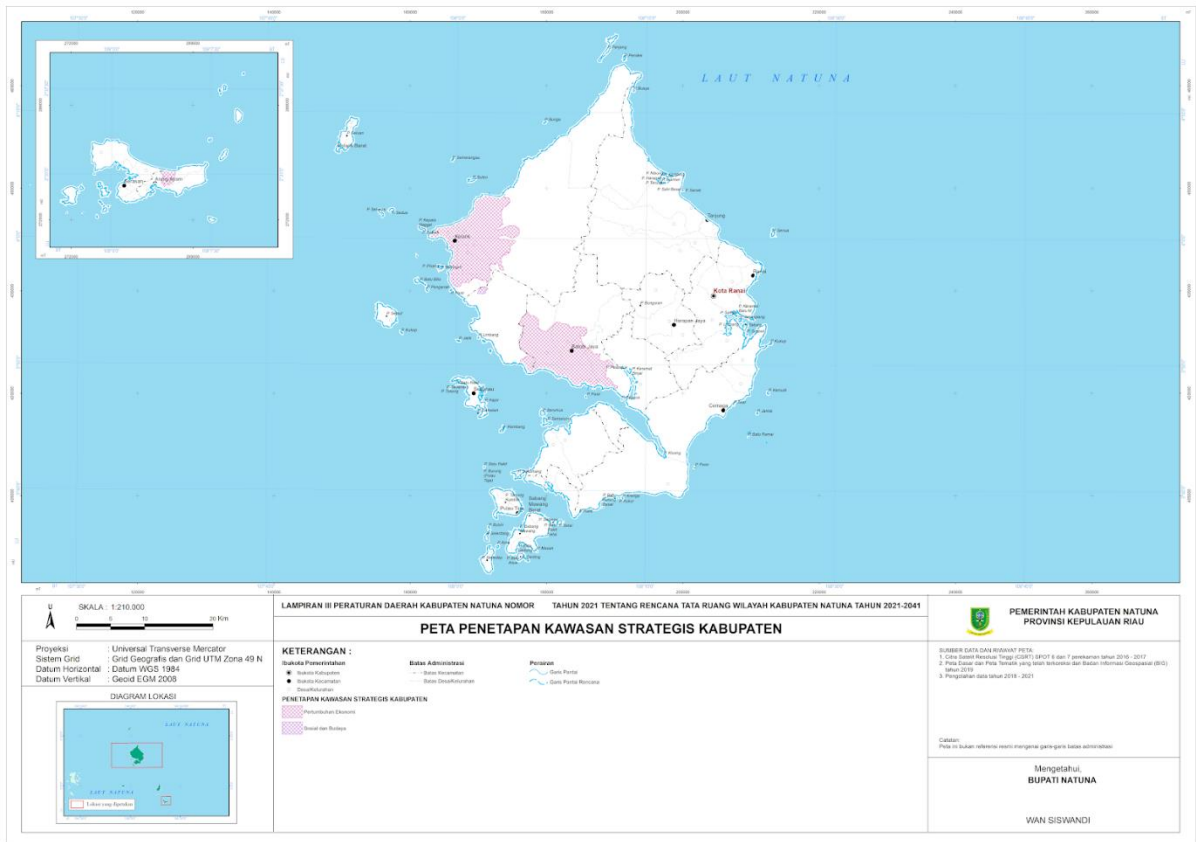
7. Kawasan Industri

Lebih detail terkait dengan lokasi geografis KSCT dan Jenis kawasan dapat ditinjau pada tabel berikut ini :

Tabel II.41			
Sebaran Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Natuna			
NO	KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	KSCT dari sudut pandang kepentingan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Ranai	Kecamatan Bunguran Timur
		Kawasan Minapolitan	Kecamatan Pulau Tiga
		Kawasan Agropolitan	Kecamatan Bunguran Batubi
			Kecamatan Bunguran Utara
			Kecamatan Bunguran Tengah
		Kawasan Peternakan	Kecamatan Bunguran Barat
			Kecamatan Bunguran Selatan
			Kecamatan Bunguran Tengah
			Kecamatan Bunguran Timur Laut
		Kawasan Sentra Budidaya Perikanan	Kecamatan Bunguran Barat
			Kecamatan Pulau Tiga
			Kecamatan Pulau Tiga Barat
		Kawasan Pariwisata	Kecamatan Bunguran Selatan
			Kecamatan Pulau Tiga
			Kecamatan Bunguran Timur
			Kecamatan Bunguran Timur Laut
			Kecamatan Serasan
			Kecamatan Serasan Timur
			Kecamatan Bunguran Barat
			Kecamatan Bunguran Utara
			Kecamatan Midai
			Kecamatan Subi
			Kecamatan Pulau Laut
		Kawasan Industri	Kecamatan Bunguran Selatan
			Kecamatan Pulau Tiga
			Kecamatan Pulau Tiga Barat
			Kecamatan Bunguran Utara

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 9 tahun 2018 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)

Berikut merupakan peta sebaran Kawasan Strategis Kabupaten Natuna sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna tahun 2021-2041:



Gambar II.43
Peta Sebaran Kawasan Strategis Kabupaten Natuna
Sumber: Lampiran Dokumen RTRW Kabupaten Natuna tahun 2021-2041

Dari telaah terhadap pusat pertumbuhan di Kabupaten Natuna, pada prinsipnya Kabupaten Natuna diorientasikan sebagai kawasan perbatasan internasional yang memiliki nilai geopolitis simpul transportasi energi bagi kepentingan kerjasama internasional. Namun, ditinjau dari arahan pengembangan secara meso dan mikro, maka Kabupaten Natuna secara spasial diarahkan sebagai pusat pengembangan Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri. Pusat pertumbuhan dengan karakteristik pelayanan, perdagangan dan simpul jasa juga diarahkan di Kawasan Perkotaan Ranai yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna menjadi “*gap expectation*” antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan, dapat dikatakan perbedaan kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi empiris saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Natuna memiliki tantangan dan permasalahan pembangunan. Dari beberapa hasil capaian pembangunan, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan itu, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan. Selain permasalahan, dengan memperhatikan berbagai kajian dan telaahan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu regional, nasional, maupun internasional yang menjadi suatu kesatuan peluang dalam penyelenggaraan pembangunan untuk dapat merumuskan pembangunan Kabupaten Natuna selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Setiap peluang yang mampu mempercepat capaian pembangunan harus dimanfaatkan secara optimal, sedangkan ancaman yang bersifat destruktif harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai *early warning* dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan Kabupaten Natuna. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis ini akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2025-2045.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen publik dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna diformulasikan melalui pendekatan yang menggabungkan aspek teknokratik dan partisipatif. Pendekatan teknokratik diterapkan melalui analisis data, evaluasi kondisi daerah, dan diskusi teknis bersama pakar dalam bidang terkait sedangkan pendekatan partisipatif diwujudkan melalui penghimpunan aspirasi

masyarakat. Rumusan ini dianalisis secara obyektif, menghasilkan 5 (lima) permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna sebagai berikut:



Gambar III.1.
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Natuna

Permasalahan pembangunan Kabupaten Natuna dalam RPJPD Tahun 2025-2045, selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan proses mengelola dan membangun sumber daya daerah yang potensial antara Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan/aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya permasalahan pokok, ”belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri”, yang disebabkan oleh akar permasalahan sebagai berikut:

a) **Belum maksimalnya pengelolaan ekonomi unggulan daerah**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu dari indikator laju pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB Kabupaten Natuna.

Dari data BPS Kabupaten Natuna laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tahun 2019 terjadi perlambatan yakni sebesar 1,75 persen sehingga pada tahun 2020 nilai LPE Kabupaten Natuna mengalami kontraksi akibat adanya pandemi COVID-19. Kondisi kontraksi dan fluktuasi ekonomi di Kabupaten Natuna dapat menimbulkan permasalahan pengangguran, penurunan pendapatan, penurunan investasi, serta penurunan motivasi berwirausaha bagi pelaku Usaha Mikro.

Seiring dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, LPE Kabupaten Natuna pada tahun 2023 masih lebih lambat dibandingkan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2023 sebesar 3,81 persen jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Natuna merupakan peringkat terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi masyarakat dan investasi, ketidakseimbangan perdagangan, dan adanya krisis keuangan. Sejak pandemi COVID-19, banyak usaha industri rumah tangga yang terbatas dalam melakukan produksi karena keterbatasan akses transportasi yang memengaruhi pasokan bahan baku produksi. Selain penyebab tersebut, belum optimalnya pengembangan sector ekonomi unggulan di Kabupaten Natuna juga menjadi pemicu dalam perlambatan proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna pada distribusi PDRB pada sector lapangan usaha pada beberapa dekade terakhir, beberapa sector unggulan Kabupaten Natuna adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan perdagangan. Pada tahun 2023 distribusi sector pertanian sebesar 11,49; sector pertambangan dan penggalian sebesar 72,44; Konstruksi 6,95 dan perdagangan sebesar 3,35. Jika melihat perkembangannya ditahun 2022 dan 2023 maka pada sector-sektor ini mengalami perlambatan. Memahami hal ini, dalam pembangunan berkelanjutan tidak bisa untuk mengandalkan kontribusi dari pertambangan dan penggalian, yang nantinya akan habis. Dengan ini maka perlu adanya pengembangan pada sector unggulan lain yang diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama pada sector pertanian, sector industry dan pariwisata (sector penyediaan akomodasi dan makan minum).

Dengan berdasarkan capaian ditahun 2023, sektor industri di Kabupaten Natuna masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kegiatan industri yang dominan adalah industri rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan industri di Kabupaten Natuna masih jauh dari sasaran yang diinginkan, terutama disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini memberikan pengaruh pada perwujudan masyarakat yang mandiri. Masyarakat mandiri dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang bergerak secara simultan terhadap sektor riil khususnya sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian, industri dan UMKM. Melihat permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal sehingga perekonomian Kabupaten Natuna semakin meningkat dan menguat.

2. Belum Optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak utama dalam pembangunan daerah. Mobilitas peran dan fungsi SDM diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Natuna.

Dengan adanya permasalahan pokok, "belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan", yang disebabkan oleh akar permasalahan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing

Belum maksimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing di Kabupaten Natuna terkait erat dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih membutuhkan peningkatan signifikan. IPM Natuna dipengaruhi oleh tiga indikator utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan daya saing SDM. Fasilitas pendidikan yang terbatas di wilayah terpencil, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, serta minimnya keterampilan teknis dan vokasional membuat peningkatan kualitas SDM berjalan lambat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang mempengaruhi pencapaian IPM secara keseluruhan. Pembangunan SDM dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Keberhasilan pembangunan SDM dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 78,23 sesuai kategori UNDP (*United Nations Development Program*) capaian ini masuk dalam kategori **tinggi**. Dalam rangka melihat posisi IPM Kabupaten Natuna di wilayah Kepulauan Riau maka perlu perbandingan dengan daerah sekitar. Capaian IPM Kabupaten Natuna tahun 2023 masih berada di bawah IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan. Rendahnya IPM di Kabupaten Natuna disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan serta kualitas produktivitas masyarakat. Dari aspek kesehatan, keterbatasan layanan kesehatan di beberapa daerah terpencil juga mempengaruhi komponen umur harapan hidup sebagai salah satu indikator IPM. Selain itu, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan gizi belum merata, sehingga menghambat tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Di sektor ekonomi, masih banyak tenaga kerja yang kurang memiliki keterampilan produktif yang dibutuhkan di pasar, baik dalam bidang perikanan, pariwisata, maupun jasa. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan agar SDM di Natuna mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan IPM di masa mendatang.

b. Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing

Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing di Kabupaten Natuna menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal, yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, akses ke program pelatihan dan pendidikan vokasional masih terbatas, sehingga banyak angkatan kerja yang hanya memiliki keterampilan dasar dan sulit bersaing dalam sektor-sektor strategis seperti perikanan, pariwisata, dan jasa. Rendahnya ketersediaan lapangan kerja formal di daerah juga memperburuk situasi, membuat sebagian

masyarakat bergantung pada pekerjaan informal dengan pendapatan tidak stabil.

Dengan melihat capaian angka pengangguran di Kabupaten Natuna kemudian membandingkan angka pengangguran dengan capaian Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Natuna yang mencapai 4,05 ditahun 2023 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Lingga. Memperhatikan kondisi angka pengangguran diatas, maka harapannya kedepan pemerintah Kabupaten Natuna mampu meningkatkan kualitas SDM. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan agar mampu bersaing dengan kabupaten dan kota sekitar. Mengingat bahwa akan ada persaingan/kompetitif dalam mencari pekerjaan yang kemungkinan SDM dari luar juga masuk ke Kabupaten Natuna. Sehingga kualitas daya saing SDM Kabupaten Natuna harus menjadi perhatian agar masyarakat Kabupaten Natuna mampu memenuhi *skill*/kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan mampu bersaing dengan SDM dari luar daerah.

3. Tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas ekonomi yang terjadi. Dengan adanya potensi tersebut maka setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Kabupaten Natuna baik dalam upaya peningkatan ekonomi maupun peningkatan infrastruktur harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga kesehatan lingkungan. Dengan adanya permasalahan pokok, "tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi", yang dipicu oleh akar permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup

Adanya potensi kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan ekonomi dapat diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan rincian komponen pembentuknya Kabupaten Natuna. Berdasarkan data capaian lingkungan hidup Kabupaten Natuna. Pada tahun 2022 IKLH Kabupaten Natuna mencapai sebesar 73,9. **Kemudian pada tahun 2023 capaian IKLH sebesar 74,29** Sesuai dengan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021, maka IKLH Kabupaten Natuna masuk pada kategori, "**Baik**". Dengan ini, mengindikasikan perlunya peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Komponen dari kualitas lingkungan hidup terdapat pada kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Akibat dari dampak aktivitas ekonomi, kondisi kualitas air di Kabupaten Natuna bergerak secara fluktuasi. Penurunan ini disebabkan oleh aktivitas perekonomian termasuk industrialisasi, transportasi, dan pola konsumsi energi yang dapat berpengaruh pada emisi gas dan partikel yang memengaruhi kualitas air dan udara.

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Tingginya potensi degradasi lingkungan sebagai dampak ekonomi adalah masalah yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan menjadi kunci yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menyeimbangkan potensi ekonomi dan ekosistem lingkungan hidup.

4. Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu komitmen yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang artinya pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya permasalahan pokok, "belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas", disebabkan oleh akar permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Kabupaten Natuna

Memahami bahwa pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mampu memaksimalkan aktivitas dan produktivitasnya sehari-hari. Pemerataan pembangunan dapat dikatakan mengarah pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pemukiman layak huni, fasilitas publik yang mampu dijangkau masyarakat sehingga mempermudah aksesibilitas atau mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam pembangunan pemerataan infrastruktur diharapkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang dan wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan sesuai dengan arahan RTRW dan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan kualitas infrastruktur adalah indeks infrastruktur.

Pada tahun 2022, indeks infrastruktur Kabupaten Natuna mencapai 70,10, yang artinya masih perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama pada daerah yang masih sangat minim fasilitasnya. Hal ini diperkuat dengan kondisi Panjang jalan di Kabupaten Natuna dengan kondisi rusak berat ditahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 yang mencapai 75,17 Km dan meningkat di tahun 2022 mencapai 200,35 Km. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas infrastruktur, khususnya pada pembangunan jalan. Dengan ini pemerintah Kabupaten Natuna perlu mengoptimalkan pembangunan jalan sebagai sarana prasarana vital. Jalan merupakan salah satu infrastruktur vital yang harus diupayakan untuk mencapai kondisi optimal agar dapat menunjang segala sektor yang ada di daerah.



Tabel III.1
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Natuna (km) Tahun 2021-2022

Kondisi Jalan	Tingkat Kewenangan Pemerintahan							
	Negara		Provinsi		Kabupaten/Kota		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Baik	88,81	88,81	57,76	57,76	197,44	186,01	344,01	332,58
Sedang	25,58	25,58	45,66	45,66	47,87	61,98	119,11	133,22
Rusak	0,4	0,34	38,95	38,95	143,6	15,75	182,95	55,04
Rusak Berat	0	-	0,96	0,96	75,17	200,35	76,13	201,31
Jumlah	114,79	114,73	143,33	143,33	464,08	464,09	722,2	722,15

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna

Pemerataan pembangunan infrastruktur akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga hal ini mampu menggiring perpindahan penduduk yang akan mempengaruhi persebaran dan kepadatan penduduk, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel III.2
Persebaran kepadatan penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
1	Midai	265,07
2	Suak Midai	139,29
3	Bunguran Barat	32,55
4	Bunguran Utara	11,58
5	Pulau Laut	62,00
6	Pulau Tiga	94,53
7	Bunguran Batubi	17,86
8	Pulau Tiga Barat	123,71
9	Pulau Seluan	-
10	Bunguran Timur	195,47
11	Bunguran Timur Laut	18,90
12	Bunguran Tengah	45,67
13	Bunguran Selatan	15,28
14	Serasan	121,65
15	Subi	21,75
16	Serasan Timur	112,74
17	Pulau Panjang	-
Natuna		42,74

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat persebaran penduduk terlihat sangat timpang, paling tinggi kepadatan penduduk didaerah kecamatan bunguran timur yang mencapai sebesar 195,47 Km². Kemudian paling minim kepadatan penduduknya ada dikecamatan Bunguran Utara yang mencapai 11,58 Km². Besarnya kepadatan penduduk memberikan makna bahwa disini

pembangunan infrastruktur cukup memadai, jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan demikian, diharapkan nantinya pembangunan infrastruktur mampu merata diseluruh wilayah sehingga kepadatan dan persebaran penduduk tidak hanya dilingkup beberapa daerah namun mampu merata diseluruh wilayah.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan layak

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kualitas pendidikan, kondisi ekonomi, aksesibilitas, kesehatan, dan sanitasi yang tidak layak. Dengan adanya permasalahan pokok, "belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan" yang disebabkan oleh akar permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna, kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 yang berada pada angka 5,25 persen. Masyarakat yang miskin dapat diartikan masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, karena keterbatasan pendapatan. Salah satu cara umum untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan garis kemiskinan atau batas kemiskinan, yang menetapkan tingkat pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pendapatan seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, mereka dianggap sebagai kelompok yang miskin. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai salah satu gambaran dari kemiskinan maka dapat dilihat pada indikator PDRB Perkapita Kabupaten Natuna tahun 2023 yang mencapai Rp278.157,88,-. Dalam rangka mengetahui posisi capaian Kabupaten Natuna maka perlu adanya perbandingan PRDB Perkapita dari Kabupaten sekitar Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Natuna masih dibawah PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kepulauan anambas masih lebih tinggi daripada Kabupaten Natuna.

Salah satu dampak dalam pemerataan pembangunan daerah distribusi pendapatan yang relative merata atau kesenjangan pendapatan antar daerah relatif rendah. Adanya kesenjangan yang besar antara pendapatan yang tinggi dan rendah dapat menjadi indikator masalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh adanya kesenjangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Kesenjangan pemerataan pendapatan dapat dilihat dari capaian indeks gini. Nilai indeks gini rasio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan. Dengan ketentuan kategori sebagai berikut $G < 0,35$ kategori ketimpangan Rendah, $0,35 \leq G \leq 0,5$ kategori ketimpangan Sedang, $G > 0,5$ kategori ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna pada tahun 2022 nilai indeks gini mencapai 0,291 dan ditahun 2023 meningkat menjadi 0,309. Sesuai pernyataan diatas, maka pada tahun 2022 dan 2023 indeks gini Kabupaten Natuna berada pada kategori “**ketimpangan rendah**”. Meskipun masuk dalam kategori ketimpangan rendah, namun masih adanya ketidakmerataan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Natuna. Berdasarkan capaian indeks gini Kabupaten Natuna ditahun 2023 yang mengalami peningkatan. Dengan ini mengindikasikan peningkatan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Natuna. Kemudian pada perbandingan Kab/Kota maka dapat diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Natuna masih lebih tinggi daripada Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan. Hal ini mengindikasikan pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Natuna masih belum maksimal. Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Dengan demikian perhatian Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk lebih mempertajam kebijakan dalam pembangunan perekonomian makro dan mikro serta pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

6. Belum Optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pada sistem birokrasi suatu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya permasalahan pokok, “belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital” yang disebabkan oleh akar permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum maksimalnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah

Salah satu tolok ukur akuntabilitas kinerja daerah dapat digambarkan melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Berdasarkan data capaian IRB Kabupaten Natuna terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Natuna tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercapai pada angka 60,10 (B), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Reformasi Birokrasi tercapai pada angka 60,24 (B). Kemudian IRB Kabupaten Natuna meningkat ditahun 2023 hingga mencapai 72,55. Dengan adanya penurunan IRB ditahun 2022 mengindikasikan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah. Salah satu indikator dalam melihat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan melihat nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dimana pada tahun 2022, Kabupaten Natuna mencapai nilai 73,84 dan ditahun 2023 mencapai 73,98 dengan kategori BB (Sangat Baik). Namun pencapaian ini masih belum mencapai nilai maksimal/kategori sangat memuaskan, sehingga perlu optimalisasi kinerja dan akuntabilitas agar penyelenggaraan pemerintah daerah mampu menjadi pendorong dan pendukung yang kuat dalam percepatan pembangunan daerah.

b. Belum optimalnya kinerja pelayanan publik berbasis IT

Belum optimalnya kinerja pelayanan publik berbasis teknologi informasi (IT) di Kabupaten Natuna menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan sistem digital dalam pelayanan, masih terdapat kendala dalam infrastruktur IT yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan akses internet dan perangkat keras yang tidak memadai menghambat efektivitas layanan publik. Selain itu, banyak pegawai pemerintah yang belum terampil dalam menggunakan teknologi baru, yang mengakibatkan rendahnya adopsi sistem digital dalam pelayanan sehari-hari. Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari indeks persepsi kualitas pelayanan publik dimana pada tahun 2022 capaian Kabupaten Natuna mengalami penurunan cukup signifikan menjadi sebesar 70,90 dibanding tahun 2021 yang mencapai 93,50. Pelayanan publik sangat berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Dari sisi peningkatan digitalisasi layanan pemerintah maupun untuk kinerja internal, dapat terlihat dari capaian Indeks SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Natuna pada tahun 2021 mencapai 2,24 dengan status kategori “cukup” dan meningkat menjadi 2,50, dan ditahun 2023 meningkat mencapai 3,19. Dengan standar nilai maksimal indeks SPBE mencapai 5, dapat diartikan capaian indeks SPBE Kabupaten Natuna masih belum maksimal. Belum optimalnya capaian indeks SPBE ini disebabkan karena penerapan arsitektur SPBE belum dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, di mana masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. Proses birokrasi yang masih bersifat konvensional juga menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, kurangnya integrasi antara berbagai sistem layanan yang ada menambah kompleksitas dan membuat masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur IT yang lebih baik, pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi, dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi agar pelayanan publik di Kabupaten Natuna menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Dari penjabaran permasalahan pokok dan permasalahan diatas, maka dapat dirangkum permasalahan RPJPD Kabupaten Natuna disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.3
Keterkaitan permasalahan pokok dan permasalahan RPJPD
Kabupaten Natuna

Permasalahan Utama	Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan
Belum optimalnya transformasi pembangunan yang komprehensif berbasis potensi sumber daya daerah menuju Natuna Maju, Sejahtera, Berdaya saing, Mandiri, dan Berkelanjutan	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri	Belum maksimalnya pengelolaan ekonomi unggulan daerah
	Belum Optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan	Belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
		Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing
	Tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi	Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Belum maksimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Kabupaten Natuna
	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan layak	Belum maksimalnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
	Belum Optimalnya perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital	Belum maksimalnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah
		Belum optimalnya kinerja pelayanan publik

3.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merujuk pada persoalan-persoalan yang menjadi sorotan penting di tingkat internasional, nasional, dan regional karena pentingnya kondisi saat ini serta dampaknya terhadap pembangunan daerah di masa depan. Dalam konteks ini, penting bagi isu-isu strategis untuk menjadi landasan utama dalam perencanaan prioritas program pembangunan jangka panjang, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan lebih terarah, akurat, dan efisien. Ketika isu-isu strategis diberikan prioritas dalam penanganan dan antisipasinya, hal ini dapat menjadi keunggulan dalam akselerasi pencapaian pembangunan Kabupaten Natuna. Isu strategis RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui isu internasional (Megatren global 2045), isu nasional (RPJPN), isu strategis daerah (RPJPD Provinsi dan KLHS RPJPD).



Gambar III.2.
Kerangka Logis Isu Strategis Kabupaten Natuna

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis internasional merujuk pada permasalahan atau peristiwa yang memiliki dampak besar secara global atau antar negara. Telaah terhadap isu-isu strategis internasional memiliki tujuan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Tindakan ini membantu Indonesia untuk aktif berperan dalam forum-forum internasional, meningkatkan kerja sama dengan negara lain, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi transformasi global saat ini. Transformasi global tersebut merupakan perubahan skala besar, berjangka waktu panjang, bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disruptsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:



Gambar III.3.
Megatren Global 2045

a. Perkembangan Demografi

Perkembangan demografi global memiliki dampak krusial terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari *World Population Prospects*, jumlah penduduk global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7 miliar individu. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang terus menerus, diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar individu pada tahun 2050. Pertumbuhan ini menghadirkan sejumlah tantangan penting, termasuk isu ketahanan sumber daya alam, percepatan urbanisasi, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Natuna akan mencapai 103.575 jiwa. Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah.

b. Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi

Perkembangan geopolitik dan geoekonomi dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan tersebut adalah eskalasi persaingan antar negara. Persaingan geopolitik khususnya di kawasan Indo-Pasifik semakin meningkat dan meluas. eskalasi geopolitik melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Eskalasi geopolitik berpengaruh pada Kabupaten Natuna, mengingat daerah perbatasan. Laut Natuna Utara, yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, adalah salah satu perairan strategis di wilayah perbatasan Indonesia. Keberadaan Laut Natuna Utara juga membawa sejumlah tantangan, antara lain terhadap keamanan laut perbatasan yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Pemerintah Pusat dengan strategis. Tantangan muncul ketika beberapa negara tetangga mengakui secara sepihak perairan di Indonesia. Laut Natuna Utara memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi signifikan dalam konteks regional dan global. Perairan ini terletak di jalur strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga mengendalikan wilayah ini dapat memberikan keunggulan strategis dalam navigasi laut dan perdagangan internasional.

c. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Tahun 2045 populasi Kabupaten Natuna akan selalu mengalami peningkatan, dengan rasio ketergantungan mencapai 49,42. Diperlukan antisipasi terhadap konsekuensi dari pertumbuhan populasi dan ekonomi, dengan memperhatikan tantangan yang muncul seiring pertumbuhan kelas menengah.

Kelas menengah merujuk pada segmen sosial atau ekonomi yang berada di tengah antara kelompok yang lebih tinggi (*upper class*) dan kelompok yang lebih rendah (*lower class*) dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah sering dianggap sebagai sinyal positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu ancaman yang muncul adalah ketidakseimbangan yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Meskipun kelas menengah bertumbuh, namun ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin. Pemerintah Kabupaten Natuna harus mengambil langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

d. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan jumlah penduduk berarti meningkatnya persaingan dalam penggunaan sumber daya alam, seperti energi dan air minum. Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Natuna pada tahun 2045 mencapai 65,25 Juta VA, mengalami kenaikan sebesar 21,18 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara proyeksi kebutuhan air minum pada tahun 2045 mencapai 4.536,59 juta liter. Situasi ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan persaingan dalam ekonomi secara simultan dapat menyebabkan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Penyebabnya meliputi peningkatan permintaan, kemajuan teknologi, keterbatasan sumber daya, ketidakpastian terkait perubahan lingkungan. Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

e. Perubahan Iklim

Proyeksi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Natuna dalam dua dekade mendatang menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 94,51 juta liter. Potensi degradasi lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna dapat berkontribusi terhadap *global warming*.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia

dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah menyepakati Pakta Iklim Glasglow pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-26 COP (*Conference of the Parties*) di Glasgow, Skotlandia Tahun 2021. Pakta Iklim Glasgow ini dapat mempertahankan harapan dunia dalam menghindari dampak buruk pemanasan global.

Tiga kesepakatan yang berpengaruh pada pakta ini adalah menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, menjaga suhu bumi tidak naik 1,50 Celsius, dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam *Nationally Determined Contribution* atau NDC tiap negara pada 2022.

Hal paling penting dari COP26 adalah adanya kemauan dan kesediaan banyak negara menghentikan pemakaian batu bara sebagai sumber energi. Negara dan lembaga juga setuju menghentikan pembiayaan eksploitasi energi fosil. Bagi Indonesia hasil Pakta Iklim Glasgow ini penting karena menyangkut dua penyebab utama krisis iklim yakni pemakaian energi fosil dan deforestasi. Kombinasi keduanya menyumbang 80% emisi global dan di Indonesia 71%.

Dengan dihasilkannya *output* ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Natuna.

f. Pergeseran Tata Kelola Keuangan

Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan gangguan dalam sektor layanan keuangan. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, seperti munculnya bank digital. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, perubahan ini juga berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menjaga stabilitas keuangan.

g. Peningkatan Urbanisasi

Urbanisasi merupakan proses migrasi penduduk dari wilayah pedesaan menuju kawasan perkotaan. Proses ini seringkali dipicu oleh peluang ekonomi yang tersedia, akses yang lebih baik terhadap layanan seperti pendidikan dan kesehatan, dan gaya hidup yang berbeda yang cenderung lebih tersedia di kota. Dampak dari urbanisasi meliputi pertumbuhan pesat kota, peningkatan kepadatan populasi di wilayah perkotaan, perkembangan infrastruktur, dan

perubahan sosial serta ekonomi. Meskipun urbanisasi bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keragaman budaya, tetapi juga membawa tantangan seperti krisis perumahan, kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial-ekonomi antara penduduk kota dan desa, serta tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna perlu melakukan upaya yang memadai dalam perencanaan yang efektif, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan di masa depan.

h. Perubahan Konstelasi Perdagangan

Pergeseran peningkatan kontribusi negara-negara berkembang dalam ekonomi global telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berfokus di wilayah Asia-Afrika. Di Kabupaten Natuna yang mayoritas aktivitasnya terkait dengan sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian, terdapat potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi.

i. Perkembangan Teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah

otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

Kemajuan teknologi telah menciptakan dampak yang besar secara global, mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dengan signifikan. Perkembangan teknologi telah sejalan dengan konsep *Society 5.0*, di mana masyarakat hidup beriringan dengan teknologi. Namun, manfaat teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya berpotensi tetapi juga menjadi tantangan di masa depan. Menurut laporan dari Goldman Sachs, teknologi akan menggantikan 300 juta lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini menandakan adanya kemungkinan otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia. Selain itu, tantangan lain meliputi isu privasi dan keamanan data, ketergantungan yang meningkat, perubahan nilai etika, transformasi pola pendidikan, serta dampaknya terhadap konsumsi energi dan limbah elektronik. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJPN Tahun 2045 sebagai berikut:

Visi Indonesia 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Gambar III.4.

Visi Indonesia 2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

Dengan visi diatas, maka diperlukan komitmen dan kejelasan apa aja yang harus dicapai sebagai 'goals' visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- Pendapatan Per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia international meningkat
- Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Berdasarkan visi dan misi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:



Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Transformasi Sosial

Menciptakan manusia Indonesia unggul



Transformasi Ekonomi

Membawa Indonesia keluar *Middle Income trap*/MIT



Transformasi Tata Kelola

Menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif

Arah (Tujuan) Pembangunan



Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif



Transformasi Ekonomi

- IE4 Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah perlu didukung oleh landasan transformasi sebagai faktor pemampung

Landasan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Menciptakan lingkungan strategis yang kondusif serta kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di Global



Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang antara aspek Sosial Budaya dan Ekologi sebagai penguat transformasi

Arah (Tujuan) Pembangunan

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketahanan dan Kondusifitas Daerah

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Gambar III.5.

17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna telah terintegrasi dengan agenda transformasi RPJPN. Hal ini terlihat pada sinkronisasi transformasi RPJPN dengan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Natuna.

Transformasi ekonomi mengacu pada permasalahan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, permasalahan ini diantisipasi dengan mengangkat isu transformasi ekonomi berkelanjutan.

Transformasi sosial dan tata kelola mengacu pada permasalahan belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, yang diantisipasi melalui isu peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya serta isu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, transformasi sosial juga terintegrasi dengan permasalahan belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan layak,

permasalahan ini dikolaborasikan dengan isu strategis akselerasi pengentasan kemiskinan struktural.

Agenda landasan transformasi ketahanan sosial dan ekologi, mengarah pada permasalahan tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi yang diantisipasi melalui stabilitas ketahanan pangan dan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Kombinasi landasan transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi serta kerangka implementasi transformasi pembangunan merata dan berkualitas mengarah pada permasalahan belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, secara komprehensif diantisipasi melalui isu percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan isu pemekaran wilayah guna pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.

Mengacu pada penjelasan di atas, permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045 telah terintegrasikan dengan transformasi RPJPN 2025-2045.

3.2.3. Isu Strategis Daerah

1. Telaahan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045

Pencapaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh pencapaian Kabupaten/Kota dalam lingkup provinsi tersebut. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Natuna harus memperhatikan kebijakan pembangunan provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang harus diperhatikan sebagai berikut.

• Isu Strategis RPJPD Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau telah merumuskan isu strategis yang terklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) isu, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia
2. Penguatan Ekonomi Daerah.
 - Pembangunan ekonomi berbasis keunggulan maritim
 - Stabilitas pertahanan dan keamanan maritim
 - Penguatan pembangunan ekonomi syariah
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
4. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
5. Penguatan Budaya Lokal
6. Keberlanjutan Lingkungan
7. Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan

Ketujuh isu Provinsi Kepulauan Riau secara komprehensif telah berkesinambungan dengan isu strategis RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045. keterkaitan isu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel III.4
Keterkaitan Isu RPJPD Provinsi Kepulauan Riau
dengan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045

ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN NATUNA
Keberlanjutan Lingkungan	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
Penguatan Ekonomi Daerah	
Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural dan menjaga ketahanan pangan
Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan	Percepatan Penyediaan Infrastruktur menuju Pemerataan Pembangunan Yang Berkualitas
Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya
Penguatan Budaya Lokal	

Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 yakni **”KEPRI PERMATA BIRU 2045: PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM BERBUDAYA MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, diupayakan dengan misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan Sejahtera
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern
- 4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah
- 5) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender
- 6) dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu
- 7) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*
- 8) Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif

2. Telaahan KLHS RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. Undang-Undang ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945. Salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses analisis yang mendalam terkait dengan dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program tertentu yang akan dilaksanakan dalam suatu wilayah atau proyek. KLHS dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kewajiban untuk menyusun KLHS sebagai bagian integral dari RPJPD. Dengan demikian, implementasi KLHS bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola yang diperkirakan muncul, dengan harapan bahwa hal ini akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Mengacu penilaian KLHS, dirumuskan isu utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Natuna dengan penilaian berdasarkan pasal 20 ayat (2) Permen LHK No. P 69/2017 yang disesuaikan dengan Permendagri 07/2018 dengan mempertimbangkan unsur karakteristik wilayah, potensi dampak, keterkaitan isu strategis pembangunan berkelanjutan, keterkaitan materi muatan kebijakan, muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hasil KLHS dari kebijakan. Dirumuskan 5 (lima) Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, kesehatan, dan listrik;
- 2. Belum optimalnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan;
- 3. Belum optimalnya pengentasan daerah tertinggal;
- 4. Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam;
- 5. Belum optimalnya pulau/kawasan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

Telaahan isu KLHS secara komprehensif berkesinambungan dengan permasalahan dan isu RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045 yang keterkaitannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel III.5
Keterkaitan Isu KLHS RPJPD dengan Permasalahan dan Isu RPJPD
Kabupaten Natuna 2025-2045

KLHS-RPJPD KABUPATEN NATUNA	RPJPD KABUPATEN NATUNA 2025-2045	
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
4. Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam;	1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri	1. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
	3. Tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi	4. Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural dan menjaga ketahanan pangan
3. Belum optimalnya pengentasan daerah tertinggal;	5. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan layak	
2. Belum optimalnya layanan air baku, air minum aman, sanitasi layak, air limbah terpusat dan kualitas	4. Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur	2. Percepatan penyediaan infrastruktur



KLHS-RPJPD KABUPATEN NATUNA	RPJPD KABUPATEN NATUNA 2025-2045	
ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
pengelolaan lumpur tinja perkotaan;	yang berkualitas	menuju pemerataan pembangunan yang berkualitas
5. Belum optimalnya pulau/kawasan 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	6. Belum Optimalnya perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital	3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Belum optimalnya akses pelayanan penduduk miskin melalui jaminan sosial, kesehatan, dan listrik;	2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan	5. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya

Tindak lanjut dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 menekankan pada beberapa hal penting, yakni fokus pada isu-isu utama pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan kondisi lokal, penetapan indikator kinerja yang akurat, prioritas pencapaian target nasional, memusatkan perhatian terhadap isu strategis yang disesuaikan dengan keadaan khusus Kabupaten Natuna. Selain itu, juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala, penguatan kapasitas, keterlibatan aktif masyarakat, serta keterbukaan dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Natuna. Keseluruhan saran bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, keterlibatan *stakeholder*, dan monitoring yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Natuna.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Natuna

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu strategis untuk Kabupaten Natuna yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Natuna menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dan beralih ke sektor-sektor yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya kelautan dan perikanan, Natuna memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi biru melalui perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari. Namun, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang menghambat pembangunan di masa depan. Dalam upaya menuju ekonomi berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan digitalisasi turut berperan penting. Infrastruktur logistik yang baik akan memperlancar distribusi komoditas dan mempermudah akses pasar, terutama untuk produk perikanan

dan sektor unggulan lainnya. Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendukung ketahanan energi, dan meminimalkan jejak karbon. Penerapan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan perikanan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Transformasi ekonomi berkelanjutan ini juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan keterampilan dan akses modal akan memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Natuna berperan dalam menciptakan kebijakan inklusif dan insentif bagi investasi hijau, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, transformasi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan berketahanan, sekaligus menjaga ketersediaan pangan dan energi untuk generasi mendatang.

2. Percepatan Penyediaan Infrastruktur menuju Pemerataan Pembangunan Yang Berkualitas

Percepatan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Natuna menjadi isu strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berkualitas, terutama mengingat tantangan geografis berupa pulau-pulau yang tersebar dan aksesibilitas terbatas. Infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan layanan publik. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah membuat distribusi pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, tidak merata. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah dan mendorong investasi lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, percepatan infrastruktur juga berkaitan dengan upaya meningkatkan konektivitas antarpulau serta kesiapan menghadapi dinamika ekonomi dan sosial di masa depan. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik akan memperkuat integrasi wilayah dan memperlancar arus barang serta orang. Dengan infrastruktur yang memadai, wilayah-wilayah terpencil di Natuna dapat lebih berdaya saing, dan akses ke pasar maupun layanan dasar menjadi lebih efisien. Langkah ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan, tetapi juga mendukung kualitas kehidupan masyarakat dan mempercepat transformasi ekonomi menuju keberlanjutan. Salah satu hal mendasar perlunya pemerataan infrastruktur di Kabupaten Natuna adalah masih adanya ketimpangan antar daerah di Kabupaten Natuna, dalam rangka percepatan pembangunan perlu adanya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah di Kabupaten Natuna membutuhkan percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur berkualitas agar mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pemekaran, layanan publik diharapkan lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, listrik, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang memadai. Tanpa

infrastruktur yang merata, pemekaran berisiko menciptakan ketimpangan antara wilayah induk dan kecamatan baru, menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memahami hal ini, maka pembangunan infrastruktur haruslah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga dengan pemenuhan infrastruktur yang layak dan sesuai, masyarakat akan merasa nyaman dengan tercipta berbagai kemudahan dalam beraktivitas. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata diharapkan mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Kabupaten Natuna.

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Natuna menjadi sangat relevan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan dengan akses geografis yang menantang, digitalisasi pelayanan publik dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan perizinan. Namun, penerapan TIK di Natuna masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan rendahnya literasi digital di beberapa kalangan masyarakat. Terkait dengan tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur TIK, terutama di kecamatan dan pulau-pulau terpencil, agar layanan daring dapat diakses dengan mudah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) menjadi prioritas agar mereka mampu mengoperasikan sistem digital secara efektif. Peluncuran platform layanan terpadu dan transparan juga dibutuhkan guna meminimalkan praktik korupsi dan birokrasi berbelit, sehingga mendorong tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Digitalisasi tata kelola ini berperan penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain memberikan layanan lebih cepat dan efisien, penerapan TIK mendukung prinsip *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem berbasis data dan aplikasi, proses pengambilan keputusan dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan penyedia layanan internet juga menjadi penting agar infrastruktur digital dapat beroperasi secara berkelanjutan. Melalui transformasi digital ini, Natuna diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

4. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Struktural dan menjaga ketahanan pangan

Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural dan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Natuna merupakan isu penting dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemiskinan

struktural di Natuna tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi. Sebagai daerah kepulauan, tantangan geografis turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan dan pertanian yang masih menjadi tumpuan ekonomi lokal. Memahami kebutuhan dasar manusia terkait dengan pangan, ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus dalam mengatasi kemiskinan, mengingat masih adanya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Produksi pangan lokal, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, belum optimal karena terbatasnya teknologi dan keterampilan petani serta nelayan. Selain itu, kondisi cuaca dan akses logistik yang tidak menentu menjadi kendala dalam distribusi pangan, terutama di pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, diperlukan program intervensi yang mengintegrasikan penguatan sektor pangan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, seperti penyediaan bibit unggul, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan. Akselerasi pengentasan kemiskinan di Natuna juga membutuhkan sinergi dengan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur pertanian dan perikanan, serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk menciptakan peluang baru bagi masyarakat miskin. Selain itu, pentingnya dukungan dalam bentuk jaringan distribusi pangan dan akses pasar akan membantu memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data yang terintegrasi akan sangat membantu dalam mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan serta menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Natuna.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Sumber daya manusia menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. SDM berkualitas dan unggul tentunya akan membantu mendorong pembangunan suatu daerah menjadi lebih baik. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti kondisi Pendidikan dan Kesehatan di wilayah tersebut. Pembangunan berkelanjutan terkait kualitas Sumber Daya Manusia juga tertuang dalam prioritas konsepsi SDGs dimana tujuan yang harus dicapai adalah memastikan kesamaan kualitas Pendidikan dan memprioritaskan peluang pembelajaran untuk semua pihak.

Dalam era globalisasi saat ini, interaksi dengan budaya luar, dapat berdampak pada pergeseran nilai budaya dan karakter di Kabupaten Natuna. Karakter dan budaya merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memiliki karakter budaya yang baik, maka akan berdampak pada kehidupan sosial sesama manusia dan akan mendorong kondisi masyarakat menjadi lebih mandiri dan maju yang mana hal tersebut juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Kabupaten Natuna.



Penting untuk diingat bahwa pengaruh budaya luar tidak selalu bersifat negatif. Beberapa aspek budaya luar dapat memberikan peluang dan manfaat positif, seperti peningkatan akses terhadap pengetahuan dan teknologi, diversifikasi ekonomi, dan pertumbuhan kebudayaan yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan terhadap integrasi budaya luar perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan di Kabupaten Natuna.

Dengan penjabaran berbagai isu global, isu nasional dan isu daerah maka dalam rangka memastikan bahwa isu global memiliki keterkaitan dalam perumusan isu daerah, maka keterkaitan antar isu tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.6
Keterkaitan Isu Global, Isu Provinsi Kepulauan Riau, Isu Strategis Kabupaten Natuna dan Faktor Penentu

ISU INTERNASIONAL DAN NASIONAL (ISU GLOBAL)	ISU STRATEGIS RPJPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN NATUNA	FAKTOR PENENTU
1.Perkembangan Demografi 2. Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi 3. Pertumbuhan Kelas Menengah (Middle Class) 4. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Perubahan Iklim 6. Pergeseran Tata Kelola Keuangan 7. Peningkatan Urbanisasi 8.Perubahan Konstelasi Perdagangan 9. Perkembangan Teknologi	Keberlanjutan Lingkungan	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan	Kebijakan dan komitmen yang tinggi Pemerintah daerah dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan
	Penguatan Ekonomi Daerah		Optimalisasi pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan
	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural dan menjaga ketahanan pangan	Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat
	Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan	Percepatan Penyediaan Infrastruktur menuju Pemerataan Pembangunan Yang Berkualitas	Penguatan koordinasi dan pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi unggulan daerah
			Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur kepelosok daerah
	Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pemantapan sistem tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pemanfaatan IT
	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang merata
	Penguatan Budaya Lokal		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat yang merata
			Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN NATUNA

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Natuna memiliki populasi penduduk yang beragam. Kabupaten Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Kompleksitas dinamika penduduk di Kabupaten Natuna membutuhkan skema perencanaan yang tepat untuk menciptakan pembangunan daerah berorientasi pada kepentingan publik. Pembangunan Kabupaten Natuna merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional sekaligus menjadi panduan implementasi Pemerintahan Kabupaten Natuna. Induk perencanaan pembangunan daerah ada pada pembangunan jangka panjang dalam periodisasi 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD menjabarkan visi dan misi yang akan menjadi pijakan calon kepala daerah selanjutnya dalam merumuskan visi dan misi dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun. RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Kabupaten Natuna memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan nasional “Indonesia Emas 2045”. Sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), pencapaian pembangunan di Kabupaten Natuna diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dan bahkan pada tingkat nasional.

Pada dokumen RPJPD, Bab IV membahas secara terperinci visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna yang didapatkan melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan memperhatikan analisis kondisi *eksisting*, permasalahan dan isu strategis serta dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Visi RPJPD disusun dengan pendekatan partisipatif penjangkaran aspirasi masyarakat melalui pengisian kuesioner. Upaya untuk mewujudkan visi dilakukan melalui penetapan misi-misi yang tercantum dalam RPJPD. Mengingat kondisi saat ini, diperlukan berbagai transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan untuk memperbaiki permasalahan serta menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Natuna. Visi Kabupaten Natuna menjadi gambaran ideal di masa depan. Sebagai dasar perencanaan, visi ini menciptakan kejelasan arah untuk *stakeholders*, melebihi realitas saat ini. Artikulasinya memberikan petunjuk konkret untuk mencapai masa depan yang dirumuskan secara partisipatif. Visi menjadi pedoman kepala daerah dalam merumuskan visi lima tahun RPJMD.



Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang perlu dilakukan secara komprehensif dan konsisten. Proses ini diupayakan dengan penjangkaran aspirasi kolaborasi *pentahelix*, yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan menyebar kuesioner melalui tautan natunakab.pembangunan2045.id. Partisipasi ini dilakukan secara terbuka untuk mencerminkan harapan kemajuan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan. Selain pendekatan partisipatif, perumusan visi dan misi Kabupaten Natuna juga melihat dokumen lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

4.1. VISI KABUPATEN NATUNA

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna diharapkan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Visi RPJPN 2025-2045 yaitu Indonesia Emas 2045 (Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan) berlandaskan pada kekuatan modal dasar, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Selain itu, visi tersebut bercermin pada isu megatren global dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya.

Dalam perumusan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna, penting untuk menyelaraskan visi daerah dengan visi pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Visi RPJPN 2025-2045, yaitu "Indonesia Emas 2045" (Negara Nusantara yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan), memberikan dasar untuk pengembangan visi Kabupaten Natuna. Implementasi di lapangan, Kabupaten Natuna telah memulai penyusunan visi pembangunan jangka panjang dengan menghimpun aspirasi dari masyarakat melalui natunakab.pembangunan2045.id.

Perumusan Visi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) sebagai alat yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk menguraikan visi pembangunan jangka panjang yang diinginkan untuk suatu wilayah. Tabel perumusan Visi RPJPD ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang berorientasi pada visi jangka panjang Kabupaten Natuna berikut ini:

Tabel IV.1
Perwujudan Visi Kabupaten Natuna 2025-2045

Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
Belum optimalnya transformasi pembangunan yang komprehensif berbasis potensi sumber daya daerah menuju Natuna Maju, Berdaya saing, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan	Maju	NATUNA BIRU Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan
	Berdaya Saing	
	Sejahtera	
	Mandiri	
	Berkelanjutan	

Melalui analisis hasil kuesioner partisipasi masyarakat, kerangka logis menyusun Visi RPJPD Kabupaten Natuna juga mempertimbangkan visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD yang tergambarkan sebagai berikut:



Gambar IV.1

Kerangka Logis Perumusan Visi Kabupaten Natuna 2025-2045

Dalam tujuan RTRW disebutkan bahwa tujuan RTRW Kabupaten Natuna adalah “Mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, berdaya saing berbasis agrominawisata, pertambangan, industri, serta pertahanan dan keamanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambarkan dalam *logframe* di atas dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu dan tantangan global serta harapan masyarakat berdasarkan hasil penjarangan aspirasi dan tujuan RTRW, ditetapkan visi pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2045 yaitu:

NATUNA BIRU

“Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan”

Dalam visi RPJPD Kabupaten Natuna memiliki Tagline "**Natuna Biru**" dalam visi daerah Kabupaten Natuna merupakan cerminan dari visi Provinsi Kepulauan Riau yang mengusung tagline "Kepri Permata Biru". Kedua tagline ini menggambarkan karakteristik geografis wilayah yang didominasi oleh perairan berwarna biru, menandakan keindahan serta kekayaan laut yang



menjadi aset utama. "Natuna Biru" tidak hanya mengilustrasikan keindahan alam bawah laut dan pantai yang mempesona, tetapi juga menggambarkan komitmen daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan laut serta memanfaatkan potensi maritim secara berkelanjutan. Dengan demikian, tagline ini menjadi simbol identitas daerah yang mengarahkan pembangunan Kabupaten Natuna untuk lebih fokus pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Kata "**maritim**" dalam visi Kabupaten Natuna mencerminkan orientasi strategis daerah terhadap pemanfaatan dan pengelolaan potensi kelautan yang melimpah. Visi ini menekankan pentingnya pembangunan berbasis maritim yang mencakup berbagai aspek seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri kelautan. Kabupaten Natuna, dengan letak geografisnya yang strategis di jalur perdagangan internasional dan kekayaan sumber daya alam laut, berkomitmen untuk menjadikan maritim sebagai pilar utama ekonomi daerah. Selain itu, visi maritim ini juga mencakup upaya pelestarian ekosistem laut melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, kata "maritim" dalam visi Kabupaten Natuna menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi laut untuk kemakmuran bersama. Selanjutnya pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna yang “Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan” secara keseluruhan pembangunan Kabupaten Natuna harus berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur, dan memperkuat konektivitas transportasi dan teknologi informasi, Natuna dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik investasi, yang nantinya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal agar tercipta kemandirian daerah. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat Natuna siap menghadapi tantangan global. Upaya perlindungan lingkungan juga harus diutamakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat yang kaya di Kabupaten Natuna. Visi RPJPD ini mempunyai harapan pembangunan Kabupaten Natuna yang maju dengan pengelolaan Sumber Daya daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan.

Penjelasan pokok visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Perumusan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN VISI
NATUNA BIRU “Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan”	Maju	Maju mencerminkan tekad untuk mengembangkan wilayahnya ke arah kemajuan yang berkelanjutan, yang mana pembangunan Ekonomi berbasis maritim melalui pemanfaatan SDA dan potensi unggulan daerah didukung Teknologi Informasi dan pembangunan infrastruktur yang merata. Kemajuan merujuk pada



VISI	POKOK VISI	PENJELASAN VISI
		pertumbuhan ekonomi, serta mencakup peningkatan sektor pariwisata, infrastruktur, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) kelautan secara berkelanjutan. Visi ini mengimplikasikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya signifikan tetapi juga inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat.
	Berdaya Saing	Berdaya Saing bermakna, pembangunan kualitas SDM yang unggul, dan tangguh dalam meningkatkan daya saing daerah, sehingga akan tercipta generasi yang kompetitif dalam dunia kerja dan usaha. Kabupaten Natuna yang berdaya saing ditandai oleh adanya kemampuan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui inisiatif strategis, menonjolkan fokus utama pada pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kapasitas tenaga kerja. Berdaya saing fokus pada pengembangan SDM melalui akselerasi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
	Sejahtera	Sejahtera bermakna Pembangunan yang komprehensif dan inklusif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang didukung dengan pemerataan pembangunan. Dengan sejahtera diharapkan Kabupaten Natuna mampu berupaya memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam visinya, Kabupaten Natuna yang sejahtera menekankan pada penciptaan kesejahteraan menyeluruh. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan adil dan merata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	Mandiri	Manidiri bermakna, penguatan kemampuan Kabupaten Natuna dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Mandiri mencerminkan tekad untuk membangun wilayahnya menjadi entitas yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Pilar utama dalam perwujudan kemandirian ini melalui



VISI	POKOK VISI	PENJELASAN VISI
		pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. Dengan pemerintahan bersih juga menjadi fokus untuk memastikan integritas dalam penyelenggaraan administrasi, mengurangi risiko praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menghambat proses pembangunan.
	Berkelanjutan	Berkelanjuta bermakna, pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan SDM yang selaras, serasi serta seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. berkelanjutan menegaskan komitmen untuk membangun sebuah wilayah yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial bagi penduduknya. Dalam visi ini, Kabupaten Natuna bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek kebijakan dan tindakan pemerintah, dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

4.2. SASARAN VISI KABUPATEN NATUNA

Sasaran visi adalah langkah-langkah konkret yang ditetapkan untuk mencapai aspirasi yang terkandung dalam visi suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Natuna, sasaran visi mencakup berbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Tujuan utama dari penetapan sasaran-sasaran ini adalah untuk memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, sasaran visi menjadi panduan yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan daya saing wilayah, dan mencapai pembangunan yang inklusif serta berkeadilan di Kabupaten Natuna. Pengukuran capaian visi Kabupaten Natuna dapat diukur menggunakan beberapa indikator yang tersaji pada gambar IV.3 di bawah ini,

Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, serta konsep arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2045 dan sinergitas visi jangka panjang, maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 dibuat persandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 dengan sasaran visi nasional dan Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:



Tabel IV.3

Persandingan Indikator Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025-2045				RPJPD KABUPATEN NATUNA 2025-2045				
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Data Dasar 2023	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	267,53 – 268,13	1.289,73 – 1558,62	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	278,157	298,702-299,500	409,408-410,505
	b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru	45,49	107,21		Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	9,67	9,99	14,27
	c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	41,01-41,29	47,19 – 50,17		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	0,78	0,86-1,00	2,28-3,00
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	4,4-4,9	0,07 – 0,32	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	4,74-5,00	1,70-1,99
	b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,321-0,334	0,254 – 0,298		Rasio gini (Indeks)	0,309	0,288-0,305	0,266-0,280
	c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,64	1,9		Kontribusi PDRB Kabupaten Natuna terhadap Provinsi(%)	7,13	7,27	12,06
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,84	4,00	Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,77	2,84	4,00



RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025-2045				RPJPD KABUPATEN NATUNA 2025-2045				
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Data Dasar 2023	Baseline 2025	Target 2045
meningkat									Laju Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas (%))	0,96	1,50-1,99	3,50-4,99
					Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25-5,53	2,00-3,00					
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,60	0,75	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	78,23	79,53	88,63
Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	96,37	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (Tahunan)	NA	0,06	5,48
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,27	83,59		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,29	81,27	83,59

4.3. MISI KABUPATEN NATUNA

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam perumusan misi RPJPD Kabupaten Natuna berdasarkan dari visi diatas berdasarkan hasil kesepakatan bersama, maka dari Visi terdiri dari beberapa “pokok visi” kemudian pokok visi ini memiliki sasaran terhadap beberapa stakeholder pembangunan (masyarakat, pemerintah daerah dan Pelaku Ekonomi) yang akan menjadi rujukan dalam perumusan kalimat misi, yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4

Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Natuna

Pokok-Pokok Visi	Masalah Pokok	Misi
Berdaya Saing	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengawal pelaksanaan pembangunan	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera
Sejahtera	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan layak	
Maju	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri	Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas
Mandiri	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan Kestinambungan Pembangunan yang Adaptif
Berkelanjutan	Tingginya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi	Mewujudan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu
	Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan

Terkait dengan Visi “NATUNA BIRU” Kabupaten Maritim yang Maju Berdaya Saing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan dan sesuai dengan hasil perumusan misi diatas, sebagai berikut:

1. MISI 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera

Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat unggul dan sejahtera. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, misi ini juga mengedepankan

nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberagaman dalam segala aspek kehidupan sosial, dengan mengupayakan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam upaya peningkatan kualitas hidup layak masyarakat Kabupaten Natuna secara menyeluruh dalam aspek kehidupan sosial yang didukung pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

2. MISI 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis maritim yang inklusif dan berkualitas. Langkah-langkah strategis termasuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut, pemetaan potensi ekonomi maritim lokal, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah tersebut. Dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang berbasis ekonomi maritim yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, merata dan berkeadilan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan penguatan jejaring kerja sama antar *stakeholder* untuk memastikan partisipasi yang merata dalam perkembangan sektor kelautan. Dengan demikian, Kabupaten Natuna bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas, memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh komunitasnya.

3. MISI 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan Kestinambungan Pembangunan yang Adaptif

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berlandaskan kesinambungan pembangunan yang adaptif merupakan fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan responsivitas lembaga pemerintahan. Langkah-langkah strategis melibatkan penguatan kapasitas institusi, penyempurnaan regulasi, serta penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang efisien. Selain itu, misi ini meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang berkesinambungan dengan implementasi reformasi birokrasi yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang didukung digitalisasi dalam pelayanan publik.

Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip kesinambungan dan adaptabilitas, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

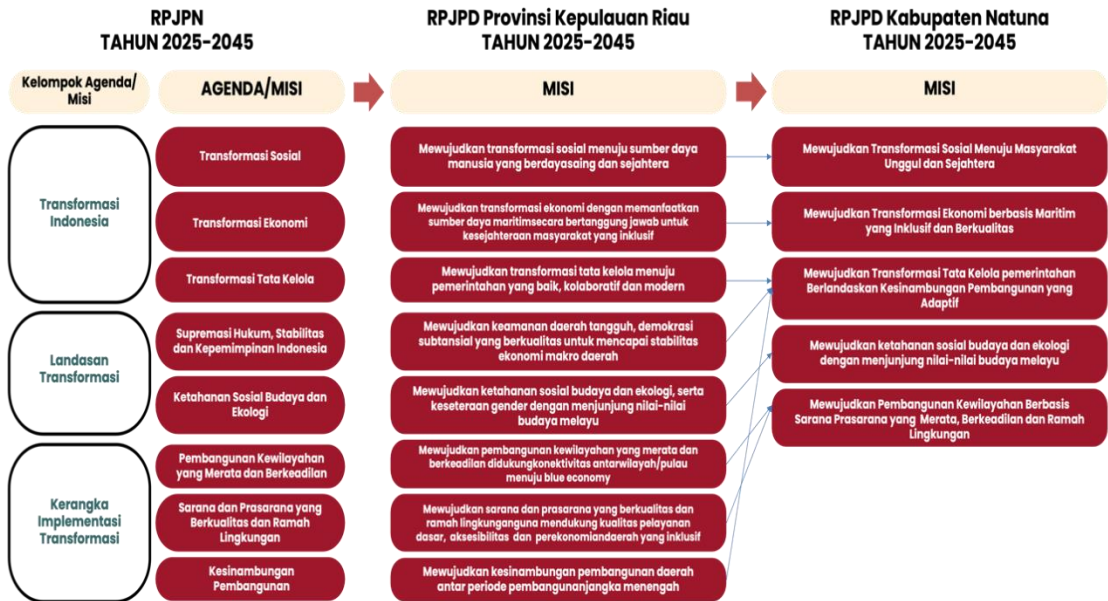
4. MISI 4 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu mengandalkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Fokus utama dari misi ini adalah melestarikan serta mengembangkan kekayaan budaya Melayu sebagai aset berharga yang mengikat identitas dan kesatuan masyarakat Natuna. Langkah-langkah strategis meliputi promosi seni, tradisi, dan bahasa Melayu, pemberdayaan komunitas adat, serta pelestarian lingkungan alam yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal. Dalam Upaya meningkatkan kapasitas ketahanan masyarakat dengan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, serta upaya pelestarian lingkungan alam untuk mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam konteks ketahanan ekologi, misi ini menuntut pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan terhadap ekosistem laut, dan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Dengan menggabungkan nilai-nilai budaya Melayu dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Natuna bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang tangguh, berdaya, dan harmonis, serta menjaga kelestarian lingkungan alam untuk generasi mendatang.

5. MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan berbasis sarana prasarana yang merata, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Langkah-langkah strategis mencakup pengembangan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah, serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, misi ini menitikberatkan pada integrasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat setempat serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, melalui upaya ini, kami bertujuan pemerataan infrastruktur berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, misi Kabupaten Natuna memedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Kepulauan Riau Tahun 2025-2045. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, provinsi dan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar IV.2

Penyelarasan Misi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna

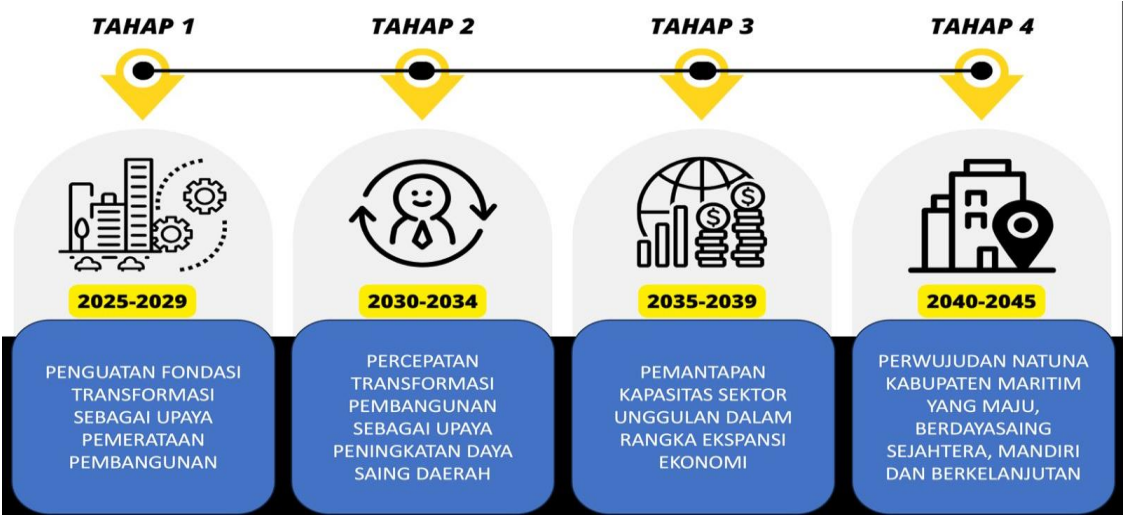
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi rangkaian langkah strategis yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah selama periode 20 tahun. Arah kebijakan menggambarkan kerangka umum tentang prioritas dan langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah daerah. Sementara itu, sasaran pokok merupakan target spesifik yang ingin dicapai dalam setiap sektor pembangunan, baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif, sebagai upaya untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah.

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 – 2045

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan suatu daerah dilaksanakan dalam empat tahapan lima tahun pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki tema pembangunan yang menjadi fokus kebijakan setiap periode lima tahun pembangunan. Berikut merupakan tema pembangunan setiap tahapan di Kabupaten Natuna.



Gambar V.1.

Tema Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Natuna

Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Natuna terbagi menjadi empat tahap periode lima tahunan dengan fokus pembangunan yang saling berkaitan yang memiliki arah kebijakan pada tiap periode dengan penjabaran sebagai berikut.

A. Tahapan Pembangunan Periode I (2025-2029)

Pada tahap pertama periode jangka panjang, memiliki tema pembangunan “Penguatan Fondasi Transformasi Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan”. Pada tahap ini pembangunan tahun 2025-2029, Kabupaten Natuna memiliki fokus pemerataan pembangunan diberbagai aspek, Penguatan fondasi transformasi sebagai upaya pemerataan

pembangunan di Kabupaten Natuna merupakan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada di berbagai sektor. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan aksesibilitas transportasi sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga dapat meningkatkan distribusi barang dan jasa serta memfasilitasi mobilitas masyarakat. Selain itu, penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan juga menjadi kunci dalam transformasi ini. Masyarakat yang terdidik dan terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Upaya ini juga harus didukung oleh kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Dalam implementasinya, pemerataan pembangunan di Kabupaten Natuna juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan, sehingga generasi mendatang tetap dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan penguatan fondasi transformasi ini, diharapkan Kabupaten Natuna dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan penjabaran diatas maka arah kebijakan tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Transformasi sosial** diarahkan dengan arah kebijakan, “Penguatan kapasitas SDM melalui penjaminan penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata dan Penguatan perlindungan sosial masyarakat dengan pemanfaatan data dan informasi sosial ekonomi rumah tangga”
- 2) **Transformasi ekonomi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Pengembangan ekonomi unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas UMKM berbasis tenaga kerja yang berkualitas”
- 3) **Transformasi tata kelola** diarahkan dengan arah kebijakan “Peningkatan kinerja pemerintah daerah berbasis digitalisasi dan sarana prasarana berkualitas”
- 4) **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** diarahkan dengan arah kebijakan “Peningkatan pembangunan berbasis sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”
- 5) **Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana** diarahkan dengan arah kebijakan “Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur”

B. Tahapan Pembangunan Periode II (2030-2034)

Pada tahap kedua periode 2030-2034, memiliki tema pembangunan **Percepatan Transformasi Pembangunan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah**. Tahap pembangunan tahun 2030-2034 pada

Kabupaten Natuna memiliki fokus percepatan pembangunan pada berbagai aspek yang difokuskan pada pengembangan sektor unggulan daerah dengan didukung inovasi. Percepatan transformasi pembangunan sebagai upaya peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Natuna merupakan langkah strategis yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dengan ini, Kabupaten Natuna harus fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar, seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Dengan memanfaatkan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang dimiliki, diharapkan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang secara keseluruhan berkontribusi pada daya saing daerah. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan transformasi tersebut, penguatan infrastruktur menjadi kunci utama. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi yang memadai akan memudahkan akses ke pasar dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor pelayanan publik dan bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini juga akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Natuna di tingkat regional maupun nasional. Akhirnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu dalam transformasi pembangunan ini. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, masyarakat dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Dengan kombinasi antara pengembangan sektor unggulan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM, Kabupaten Natuna diharapkan dapat mempercepat transformasi pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya..

Pembangunan tahap kedua yang menjadi tahap lanjutan dari pembangunan tahap pertama pada Kabupaten Natuna tahun 2030-2034 dapat diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Transformasi sosial** diarahkan dengan arah kebijakan, “Percepatan pembangunan SDM yang berdayasaing, dan kompetitif serta Akselerasi transformasi sosial berbasis pengentasan kemiskinan menuju masyarakat dengan kehidupan yang layak”
- 2) **Transformasi ekonomi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Percepatan transformasi ekonomi diarahkan dengan pengembangan produk unggulan daerah, khususnya hilirisasi sektor pertanian, yang produktif dan kompetitif”
- 3) **Transformasi tata kelola** diarahkan dengan arah kebijakan, “Akselerasi perwujudan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang produktif dan adaptif serta memenuhi kinerja berbasis kompetensi”
- 4) **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Percepatan pembangunan SDM dengan pendekatan sosio-kultural menuju keluarga sejahtera”

- 5) **Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana** diarahkan dengan arah kebijakan, “Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru”

C. Tahapan Pembangunan Periode III (2035-2039)

Pada tahap ke-tiga ini memiliki tema pembangunan, “**Pemantapan Kapasitas Sektor Unggulan Dalam Rangka Ekspansi Ekonomi**”. Pada tahap pembangunan ini, Kabupaten Natuna memiliki fokus penguatan ekonomi daerah melalui sektor-sektor unggulan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas ekonomi unggulan bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan dengan pembangan produk-produk unggulan daerah Kabupaten Natuna. Penguatan pemantapan kapasitas sektor unggulan dalam rangka ekspansi ekonomi di Kabupaten Natuna sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan seluruh potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perikanan, pariwisata, pertanian, dan energi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan ini perlu diimplementasikan secara terencana dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, perlu ada sinergi antara peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung. Penguatan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya, akan mempermudah distribusi hasil produksi serta meningkatkan aksesibilitas wisatawan ke obyek wisata. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern, adatif dan inovatif dalam sektor perikanan dan pertanian diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasar lokal dan global. Dengan demikian, pengembangan sektor unggulan tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan juga memerlukan perhatian terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan, penting untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Program-program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan partisipasi masyarakat, Kabupaten Natuna dapat membangun ekonomi yang tangguh dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan tahap ketiga yang menjadi tahap lanjutan dari tahap-tahap sebelumnya pada Kabupaten Natuna tahun 2035-2039 dengan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Transformasi sosial** diarahkan dengan arah kebijakan, “Pemantapan pembangunan kualitas SDM yang handal dan memiliki produktivitas

yang tinggi serta ekspansi transformasi sosial diarahkan dengan Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat di atas garis kemiskinan”

- 2) **Transformasi ekonomi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Penguatan daya saing kualitas produk unggulan daerah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif”
- 3) **Transformasi tata kelola** diarahkan dengan arah kebijakan, “Penguatan kinerja pemerintah daerah yang transparan dan kondusif dalam mendukung iklim investasi dan ekonomi yang inklusif”
- 4) **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** diarahkan dengan arah kebijakan,” Pemantapan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkelanjutan menuju Natuna yang berakhlak dan inklusif”
- 5) **Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana** diarahkan dengan arah kebijakan,” Penguatan konektivitas dalam mendorong ekspansi regional pada sektor unggulan pembangunan Natuna”.

D. Tahapan Pembangunan Periode IV (2040-2045)

Tahap akhir dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna adalah **Perwujudan NATUNA Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan**. Pada tahap pembangunan tahun 2040-2045, Kabupaten Natuna memiliki fokus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang maju, adil dan merata diseluruh aspek pembangunan. Kabupaten Natuna, sebagai daerah maritim yang strategis, memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten yang maju dan berkeadilan. Dengan posisi geografis yang berada di perbatasan serta dikelilingi oleh laut, sektor maritim seperti perikanan, pariwisata bahari, memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, Natuna dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan dan fasilitas transportasi laut, darat, dan udara menjadi kunci untuk mewujudkan kemajuan ekonomi di Kabupaten Natuna. Kemudian Kabupaten Natuna juga berfokus pada aspek keadilan sosial dengan memastikan pembangunan yang inklusif dan merata. Pemerintah daerah mengupayakan agar seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil, mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang berkeadilan dapat dicapai dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan. Pembangunan tahap akhir yang menjadi tahap perwujudan dari tahap-tahap pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2040-2045 yang diupayakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Transformasi sosial** diarahkan dengan arah kebijakan, “Mewujudkan Masyarakat Natuna yang unggul dan mandiri, berakhlak mulia dan Perwujudan masyarakat yang makmur dan Sejahtera”



- 2) **Transformasi ekonomi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Perwujudan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing”
- 3) **Transformasi tata kelola** diarahkan dengan arah kebijakan, “Mewujudkan pemerintahan yang baik, adaptif, dan berorientasi pelayanan”
- 4) **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** diarahkan dengan arah kebijakan, “Perwujudan pembangunan berbasis sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”
- 5) **Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana** diarahkan dengan arah kebijakan, “Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan”

Dengan merujuk pada rumusan visi dan misi pada bab sebelumnya dan rumusan arah kebijakan pada tiap periode maka, keterkaitan antara visi, misi, dan arah kebijakan tiap tahapan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, dan Arah Kebijakan
pada tiap tahapan RPJPD

VISI: NATUNA BIRU “Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan”				
MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera	Penguatan kapasitas SDM melalui penjaminan penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata	Percepatan pembangunan SDM yang berdayasaing, dan kompetitif	Pemantapan pembangunan kualitas SDM yang handal dan memiliki produktivitas yang tinggi	Mewujudkan Masyarakat Natuna yang unggul, mandiri, dan berakhlak mulia
	Penguatan perlindungan sosial masyarakat dengan pemanfaatan data dan informasi sosial ekonomi rumah tangga	Akselerasi transformasi sosial berbasis pengentasan kemiskinan menuju masyarakat dengan kehidupan yang layak	Ekspansi transformasi sosial diarahkan dengan Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat di atas garis kemiskinan	Perwujudan masyarakat yang makmur dan sejahtera
Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas	Pengembangan ekonomi unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas UMKM berbasis tenaga kerja yang berkualitas	Percepatan transformasi ekonomi diarahkan dengan pengembangan produk unggulan daerah, khususnya hilirisasi sektor	Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mewujudkan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing



VISI: NATUNA BIRU				
“Kabupaten Maritim yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan”				
MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		pertanian, yang produktif dan kompetitif		
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, Berlandaskan Kestinambungan Pembangunan yang Adaptif	Peningkatan kinerja pemerintah daerah berbasis digitalisasi dan sarana prasarana berkualitas	Akselerasi perwujudan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang produktif dan adaptif serta memenuhi kinerja berbasis kompetensi	Penguatan kinerja pemerintah daerah yang transparan dan kondusif dalam mendukung iklim investasi dan ekonomi yang inklusif	Mewujudkan pemerintahan yang baik, adaptif, dan berorientasi pelayanan
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu	Peningkatan pembangunan berbasis sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Percepatan pembangunan SDM dengan pendekatan sosio-kultural menuju keluarga sejahtera	Pemantapan kondisi sosial budaya masyarakat yang berkelanjutan menuju Natuna yang berakhlak dan inklusif	Perwujudan pembangunan berbasis sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur	Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan konektivitas dalam mendorong ekspansi regional pada sektor unggulan pembangunan Natuna	Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan

5.1.1. Arah Pembangunan dan *game changer* Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2045

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Natuna memiliki arah pembangunan yang berdasarkan penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna. Dengan RPJPN memiliki 17 arah pembangunan (Indonesia Emas). Dalam rangka menjaga sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah maka 17 arah pembangunan harus diselaraskan, yang disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel V.2.
Arah Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045

RPJPN		RPJPD Provinsi Kepulauan Riau		RPJPD Kabupaten Natuna	
No	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan		Arah Pembangunan	
1	IE1. Kesehatan untuk Semua	KPB 1.	Kesehatan untuk Semua	NB.1	Kesehatan untuk Semua
	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	KPB 2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	NB.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	KPB 3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	NB.3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	KPB 4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	NB.4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	KPB 5.	Penerapan Ekonomi Hijau	NB.5	Pengembangan Ekonomi Hijau
	IE 6. Transformasi Digital	KPB 6.	Transformasi Digital	NB.6	Transformasi Digital
	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	KPB 7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	NB.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	KPB 8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	NB.8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	KPB 9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	NB.9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	KPB 10.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial	NB.10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	KPB 11.	Stabilitas Ekonomi Makro	NB.11	Stabilitas Ekonomi Makro
5	IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	KPB 12.	Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	NB.12	Ketahanan dan Kondusifitas Daerah
	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	KPB 13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	NB.13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	KPB 14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	NB.14	Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender
	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	KPB 15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	NB.15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	KPB 16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	NB.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	KPB 17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	NB.17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Catatan: KPB: Kepri Permata Biru; NB: Natuna Biru

Kebijakan Super Prioritas, yang sering juga disebut sebagai "Game Changer," merupakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk fokus pada sektor-sektor kunci yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk merespons tantangan dan peluang yang ada di tengah dinamika global, dengan memprioritaskan pengembangan di sektor-sektor yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Penerapan kebijakan super prioritas membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan upaya transformasi super prioritas (Game Changer)



Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu merumuskan transformasi super prioritas Kabupaten Natuna yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.3.
Kebijakan Super Prioritas (*Game Changer*)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun		Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi STEAM unggulan bertaraf internasional khususnya pada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Politeknik Negeri Batam		
Pengembangan rintisan perguruan tinggi negeri STEAM dan/atau vokasi		
Pengembangan perguruan tinggi vokasi dan/atau akademi komunitas terbuka		
Penciptaan SDM berkualitas serta Pemerataan guru untuk peningkatan kualitas pendidik di Kepulauan Riau	Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh	Digitalisasi pendidikan jarak jauh
	Link and match tenaga kerja : Pendidikan dengan industry strategis	Optimalisasi pendidikan vokasi berbasis hilirisasi komoditas unggulan
	System basis data peningkatan kompetensi terintegrasi	Peningkatan kualitas pola mutasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
	Sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja internasional	
	Pengembangan Politeknik Pariwisata Batam	
	Pembangunan politeknik ekonomi kreatif	
Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan		Pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas
Perlindungan social dan layanan dasar	Ketepatan penyaluran perlindungan social adaftif dengan memanfaatkan data regsosek	Pengentasan kemiskinan berbasis pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi yang valid dan up to date



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
	data regsosek Pemenuhan layanan dasar (kesehatan, air minum layak,sanitasi, konektivitas)	Pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum layak, sanitasi, konektivitas)
	Pengembangan system layanan kesehatan bergerak yang tidak terbatas pada layanan puskesmas keliling	Pengembangan system layanan kesehatan bergerak
	Penyediaan akses terhadap rumah layak huni guna peningkatan kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas rumah tinggal masyarakat menuju penyediaan akses rumah layak huni
	Penerapan graduasi bantuan sosial, penguatan kemandirian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	penguatan kemandirian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Industrialisasi padat teknologi dan inovasi	Penanaman modal asing teknologi tinggi berorientasi ekspor	
	Percepatan hilirisasi alumina (smelter alumina ingot)	
	Optimalisasi Kawasan industri dan Kawasan ekonomi khusus yang sudah terbangun	
	Intensifikasi tata Kelola hak kekayaan intelektual	
	Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral penting, industri medium high technology (industri elektronik, optik, dan digital), dan industri manufaktur perkapalan, terutama pada koridor industri Batam-Bintan-Karimun	



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
	Pengembangan industrialisasi perikanan, terutama di Kawasan Perkotaan Batam dan Ranai	Pengembangan industrialisasi perikanan di kawasan Ranai
Ekonomi biru dan ekonomi halal	Tahap 1: Integrasi destinasi Batam dan Bintan dan penguatan identitas KTA	
	Pengembangan kampung nelayan Ekosistem industri halal dan pengarusutamaan pariwisata ramah muslim	Penguatan pariwisata bahari go International
	Penyelesaian status sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna	Optimalisasi SKPT Kabupaten Natuna
	Penyusunan pedoman dan regulasi pariwisata ramah muslim	
	Penerapan blue green and circular ekonomi (BGCE) di sektor pariwisata	
	Ketersediaan ekosistem dan infrastruktur mutu bertaraf internasional	
	Penetapan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global geopark	Penetapan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global geopark
	Pengembangan destinasi wisata dan promosi wisata budaya melayu di Pulau Penyengat	
	Peningkatan produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan di Kepulauan Riau	Penguatan produktivitas nelayan perikanan tangkap yang berkelanjutan
Percepatan transisi energi	Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan	



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
	Pembangunan infrastruktur energy Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau pulau kecil di Kepulauan Riau	Pembangunan infrastruktur energi yang merata dan ramah lingkungan
Pengolahan limbah	Infrastruktur pendukung industry pengolah limbah	
	Waste manajemen dengan pendekatan sirkular	
Infratruktur digital	Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional	
Transformasi digital	Digital coverage (4G) di seluruh wilayah Kepri	Digital Coverage (4G) di seluruh wilayah Natuna
	Perluasan data center di Batam dan pengembangan data center di Bintan	
	Produksi talenta digital	
	Satu data Kepri	Penguatan Satu Data Natuna guna peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
	Fasilitasi dan optimalisasi insentif fiscal untuk industry digital	
Infrastruktur konektivitas ekonomi	Peningkatan kapasitas Pelabuhan ekspor di Batam	
	Pembangunan pos lintas batas Negara di natuna	Peningkatan tipe lintas batas
	Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Tanjung Balai Karimun dan selat lampa Jembatan Batam-Bintan	
	Transportasi konektivitas laut antar pulau	Penguatan konektivitas antar pulau di Natuna



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
	Transportasi konektivitas udara	Pembangunan bandar udara Tingkat lokal (perintis)
	Pengembangan transportasi publik perkotaan di Kawasan Perkotaan Batam	
	Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/ lambat tumbuh, terutama di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, dan Kab. Natuna	Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna percepatan penuntasan kemiskinan
Reformasi birokrasi dan kelembagaan	Restrukturisasi dan peningkatan kapasitas Badan Pengelola (BP) Bintan, BP Karimun dan BP Tanjung Pinang	Perluasan kapasitas dan kualitas pelayanan publik berbasis digital
	Revisi regulasi KPBBP Batam, Bintan dan Karimun	
	Penyediaan Mall pelayanan publik	Implementasi reformasi birokrasi dan restrukturisasi tata kelola kelembagaan daerah
	Penempatan perwakilan KL teknis terkait lartas	
	Reformasi administrasi system intensif perpajakan	
	Penguatan sosialisasi dan komunikasi terkait regulasi intensif fiskal	



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
Penguatan tata kelola dan kelembagaan manajemen ASN, kompetensi ASN, dan manajemen talenta dan karier ASN		
Digitalisasi pelayanan publik guna mengurangi bureaucratic cost		
Pengembangan industri pertahanan, terutama industri kapal perang, industri radar, dan industri electronic warfare di koridor industri Batam-Bintan Karimun		
Penguatan Lantamal Batam guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Malaka (ALKI-1) dan peningkatan Lanal Natuna menjadi Lantamal Natuna guna penguatan keamanan global maritime trade route serta pengamanan & penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara (Laut Tiongkok Selatan)		
Penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan stabilitas nasional		
Pengendalian inflasi dan peningkatan PAD	Pembangunan pasar induk di Batam	Penguatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Natuna
	System pemantauan harga terpadu	
	Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang	
	Memperkuat peran BUMD	
	Kerjasama antar daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Natuna, Kab. Anambas, dan Kab. Lingga		
Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kepulauan Riau		
Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengolahan sampah organik, implementasi EPR, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna terutama di Perkotaan Batam Bintan		Penguatan pengelolaan sampah dalam menjaga kualitas air dan udara
Pemenuhan akses sanitasi aman universal terutama di Perkotaan Batam -Bintan dan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh Kab. Natuna, Kab . Anambas, dan Kab. Lingga		Pemenuhan akses sanitasi aman universal
Pemenuhan akses air minum aman universal terutama pada daerah afirmasi /lambat tumbuh Kab. Natuna, Kab. Anambas, dan Kab. Lingga dan pengembangan akses air minum perpipaan di Perkotaan Batam-Bintan		Pemenuhan akses air minum aman universal
Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dan jati diri bangsa Indonesia dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila		
Penguatan moderasi beragama guna mewujudkan toleransi dan harmoni sosial		



PROVINSI KEPULAUAN RIAU		KABUPATEN NATUNA
Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	Quick Wins Provinsi Kepulauan Riau	Quick Wins
Penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan		
Pengelolaan risiko bencana multiancam, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor di seluruh Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau		Pengelolaan risiko bencana multiancam, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor
Penguatan konservasi ekosistem keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta penguatan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan, termasuk pengembangan sistem peringatan dini terhadap ancaman kerusakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan pengelolaan B3 secara terpadu, terutama pada KPPN Penyengat dan sekitarnya		Penguatan konservasi ekosistem dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui peringatan dini, penegakan hukum, serta pengelolaan B3 secara terpadu dan berkelanjutan.
Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk antar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.		Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahal nya pengiriman produk
Pendirian Pelabuhan Pengumpan lokal di pulau-pulau yang memiliki potensi ekonomi di kabupaten dan kota.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan lokal di pulau-pulau yang memiliki potensi ekonomi

5.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok menggambarkan pencapaian pada tiap misi RPJPD Kabupaten Natuna. Dalam mengukur sasaran pokok dan arah pembangunan memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai dalam empat periode per lima tahunan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna dijabarkan pada tiap misi RPJPD sebagai berikut.

5.2.1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera

Transformasi sosial di Kabupaten Natuna dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera. Kabupaten Natuna

berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas manusia dan fasilitas pendukung pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi individu dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan kerja dan pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi serta mendorong pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang layak, sejahtera, dan berkualitas merupakan tujuan yang penting dalam pembangunan di Kabupaten Natuna. Dalam mencapai kehidupan yang layak, perlu diambil langkah-langkah yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, terlebih dalam aspek perlindungan sosial di Kabupaten Natuna. Sasaran pokok transformasi sosial di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

1) Meningkatnya SDM yang unggul, produktif dan sejahtera

5.2.2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas

Transformasi ekonomi di Kabupaten Natuna dilakukan untuk mewujudkan perekonomian yang maju. Kabupaten Natuna mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk mengoptimalkan sektor ekonomi unggulan dan potensial sehingga tercipta perekonomian yang inklusif dan berkualitas. Pemanfaatan pemantapan nilai tambah dalam sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi di Kabupaten Natuna. Nilai tambah ini mencakup proses atau aktivitas yang meningkatkan kualitas, kegunaan, atau harga produk atau layanan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu sektor. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas serta diversifikasi sektor yang ada di Kabupaten Natuna. Optimalisasi dalam pemantapan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui evaluasi dan pengembangan melalui pengumpulan dan analisis data terkait untuk melacak perkembangan dan tren dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga, dapat diterapkan dalam mencapai peningkatan keunggulan kompetitif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Natuna. Meningkatnya kesempatan lapangan usaha yang berkualitas merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kawasan ekonomi dan klaster industri untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis, kolaborasi antarperusahaan, dan transfer teknologi di Kabupaten Natuna. Sehingga, tercipta lapangan usaha yang berkualitas di Kabupaten Natuna. Kemudian pemanfaatan teknologi pertanian yang inovatif dan sesuai dengan kondisi lokal, seperti penggunaan varietas tanaman unggul, teknik irigasi modern, penggunaan pupuk organik, dan teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Natuna. Hal ini juga akan mengungkit peningkatan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan mendukung inovasi

pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Natuna. Dalam meningkatkan iklim investasi diperlukan daya tarik yang dapat meningkatkan minat investor, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan memberikan insentif bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya dukungan terhadap kewirausahaan lokal melalui penyediaan pelatihan, pendanaan, dan bimbingan bagi pengusaha kecil dan menengah dapat membantu mengembangkan bisnis lokal yang memberikan nilai tambah untuk menarik investor di Kabupaten Natuna. Sasaran pokok transformasi ekonomi di Kabupaten Natuna dijabarkan sebagai berikut.

1) Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah berbasis hilirisasi dan pariwisata

5.2.3. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan

Pembangunan kewilayahan berbasis sarana prasarana yang merata, adil dan ramah lingkungan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pembangunan. Pemerataan sarana prasarana di Kabupaten Natuna dilakukan untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kabupaten Natuna mengupayakan tersedianya konektivitas, aksesibilitas, dan fasilitas umum secara merata dan ramah lingkungan sehingga terwujud pembangunan sarana prasarana berkelanjutan. Adanya perencanaan infrastruktur yang terarah dan komprehensif berdasarkan analisis kebutuhan serta potensi pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Natuna dapat meningkatkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas. Perencanaan pemerataan infrastruktur pembangunan perlu untuk memperhitungkan aspek keberlanjutan, keterjangkauan, dan dampak lingkungan. Dengan begitu, dapat tercipta sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Kabupaten Natuna. Sasaran pokok pemerataan sarana prasarana di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

5.2.4. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan Kestinambungan Pembangunan yang Adaptif

Transformasi tata kelola di Kabupaten Natuna dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kesinambungan pembangunan yang adaptif. Kabupaten Natuna mengupayakan penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kepatuhan, serta keadilan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi publik, kebijakan, dan keputusan pemerintah. Hal ini termasuk dalam publikasi data keuangan, kegiatan, dan kebijakan pemerintah secara terbuka dan mudah diakses. Dengan begitu, dapat tercipta kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Natuna. Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan dengan kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan mereka sendiri dengan efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan merancang

kebijakan pajak yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial daerah serta optimalisasi pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Natuna. Sasaran pokok transformasi tata kelola di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan berintegritas

5.2.5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu

Ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Natuna dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai kebudayaan Melayu sebagai kearifan lokal. Kabupaten Natuna mengupayakan pelestarian budaya dan lingkungan dalam mewujudkan ketahanan daerah terhadap degradasi budaya dan lingkungan. Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri, pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pengelolaan drainase perkotaan yang baik. Adanya transisi penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa sebagai alternatif yang ramah lingkungan terhadap energi fosil. Sehingga, kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Natuna dapat terjaga. Adanya program konservasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati lokal, termasuk pembentukan kawasan konservasi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya biodiversitas, dan rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi di Kabupaten Natuna. Penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian dari eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan. Sehingga, tercipta Kabupaten Natuna yang berketahanan bencana dan perubahan iklim. Pengembangan kemajuan budaya daerah yang berkaitan dengan adat dan budaya Melayu akan membawa berbagai manfaat dan pengaruh positif. Hal ini dapat memperkuat identitas kultural lokal, memperkuat hubungan antar masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai budaya Melayu. Selain itu, pengembangan ini dapat menjadi sumber pendapatan dan pengembangan ekonomi lokal, seperti pada industri pariwisata dan budaya. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan budaya dan perlindungan lingkungan, serta menghargai budaya lain yang juga berada di Kabupaten Natuna. Sasaran pokok ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

1) Penguatan ketahanan sosial budaya daerah dan ekologi menuju kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan ketangguhan bencana

Dengan penjabaran rumusan sasaran pokok pada tiap misi sesuai penjabaran diatas, maka perlu dirumuskan indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang digambarkan melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP). Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Natuna merupakan hasil integrasi dalam penyelarasan antara IUP Nasional (RPJPN), IUP RPJPD Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan 17 arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi. Dengan perumusan IUP Kabupaten Natuna, maka pada saat penyusunan RPJMD dan integrasi pada tiap tahapan direkomendasikan



menggunakan indikator yang bersifat makro atau bercetak tebal yang tertuang dalam IUP Kabupaten Natuna. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keterkaitan antar substansi RPJPD maka berikut disajikan tabel keterkaitan misi, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, IUP dengan angka baseline tahun 2025 dan proyeksi tahun 2045.

Tabel V.4.
Keterkaitan Misi, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan IUP
beserta baseline (2025) dan proyeksi (2045)

MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan Sejahtera	Meningkatnya SDM yang unggul, produktif dan sejahtera	NB.1	Kesehatan untuk Semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Usia Harapan Hidup	74,15	74,51	78,49
				Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.					
				Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan					
				Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	2	Kesehatan ibu dan anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	2,00	2,00	1,00
				Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.					
				Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.					
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.					
				Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.					
				Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga					
				Percepatan eliminasi praktik					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga					
				Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah					
				Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	3	a)Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) b)Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	64,19	70,2	100
				Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)			63,7	65,9	90
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan					
				Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna).					
				Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100
		NB.2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	5	- Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		a. Literasi Membaca			
				Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan		SD	62,79	66,79	85,79 – 90,79



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	2023	BASELINE	PROYEKSI
							2025	2045
				rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.				
				Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	SMP	73,59	77,59	94,49 – 97,74
				Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	b. Numerasi			
				Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	SD	51,27	55,27	71,14 – 75,49
					SMP	66,57	70,57	85,92 – 90,27
				Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,08	9,54	12,38
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	c) Harapan Lama Sekolah	13,93	13,95	14,73
				Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)				
				Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang				



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	2023	BASELINE	PROYEKSI	
							2025	2045	
				berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)	d) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun (%)	55,45	100	100	
				Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.					
				Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan					
				Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan					
				Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).					
				Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.					
				Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)					
				Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)					
		NB.3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)	6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	4,74-5,00	1,70-1,99
			Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan						



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)					
				Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)	7	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54,95	54,96	55,70
				Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)	8	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,38	20,48	22,36
Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan Berkualitas	Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah berbasis hilirisasi dan pariwisata	NB.4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.					
				Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor	9	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
							2025	2045
			ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik,DUDI, masyarakat, baik dalam dan luarnegeri.					
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.		a) Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota (%)	59,32	61,36	80,74
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten/kota (%)	25,33	25,84	31,53
			Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.		c) Rasio kewirausahaan Daerah	2,23	2,46	6,22
			Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian		d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,85	0,94	2,37
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.					
			Peningkatan produktivitas BUMD.		e) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	-5,3	2,2	3,6
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan system transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan	10	Tingkat pengangguran terbuka	4,05	4,03-4,00	3,83-3,50
				11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	40,05	41,63	61,37



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.					
				- Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis. - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.	12	Pengembangan Pariwisata			
						a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,5	0,55	1,46
						b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	227	247	447
				Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
		NB.5	Pengembangan Ekonomi Hijau	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	13	Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,78	0,86-1,00	2,28-3,00
				Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.					
				Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.					
				Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.					
				Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.					
				Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian					
				Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/lowcost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektorsektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.					
				Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	2023	BASELINE	PROYEKSI
							2025	2045
				peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.				
				Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.				
				Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.				
				Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.				
				Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.				
				Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif				



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	2023	BASELINE	PROYEKSI	
							2025	2045	
				dan disinsentif					
				Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.					
		NB.6	Transformasi Digital	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	14	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	0,57	0,70	
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital		15	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses Internet	78,14	65,5	90,01	
		Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.							
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection							



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan.					
		NB.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/ pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Natuna,	16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	17,16	18,03	17,04
				Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kep. Natuna					
				Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Kep. Natuna					
				Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep.Natuna					
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	NB.8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		17	Kota dan Desa Maju Inklusif dan Berkelanjutan			
				Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	17.a	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	92,40	92,96	100
				Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.					
				Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.					
				Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.					
				Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	17.b	Persentase Desa Mandiri	4,29	0	11,42
				Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).					
				Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa, dan jalan pada pulau- pulau kecil.					
				Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.					
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan Kestinambungan Pembangunan yang Adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	NB.9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah					
				Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
				Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.					
				Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).					
				Percepatan pelaksanaan reforma agraria.					
				Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.					
				Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.					
				Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.					
				Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusatdaerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.					
				Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.					
	NB.10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	18	Indeks Reformasi Hukum	87,90	88,55	95,00



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
			Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	3,35	5,00
				Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	20	Indeks Pelayanan Publik	2,84	3,04	5,00
				Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kepulauan Riau, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kepulauan Riau yang profesional dan bebas korupsi.	21	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	76,80	78,00	90,00
				Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.					
				Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	22	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	84,49	85,00	85,00
				Penguatan integritas partai politik.		a) Pilpres	84,49	85,00	85,00
						b) Pileg	81,08	85,00	85,00
						c) Pemilukada	86,30	88,03	86,30
		NB.11	Stabilitas Ekonomi Makro	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	23	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	2,33	2,63	5,48
				Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.					



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
		NB.12	Ketahanan dan Kondusifitas Daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah.					
				Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/ atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	24	Indeks Daya Saing Daerah	2,72	2,84	4,00
				Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut	25	Persentase potensi konflik terselesaikan	100	100	100
				Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/ pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Natuna)					
Mewujudan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu	Penguatan ketahanan sosial budaya daerah dan ekologi menuju kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan ketangguhan bencana	NB.13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	26.a	Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran)	0	1,1	45,4
					26.b	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	12,12	14,05	30,50
				Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83,58	85,88	90,22



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)		2023	BASELINE	PROYEKSI
								2025	2045
		NB.14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	28	Indeks Pembangunan Keluarga	61,36	64,5	76,00
				Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.					
				Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial	29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,528	0,477	0,171
		NB.15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	30	Kualitas Lingkungan Hidup			
						a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,29	81,27	83,59
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		9,05	12,59	53,00	
				c). Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah) (%)		72	71,07	72,42	
				d).Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		68	70,07	71,42	
		NB.16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan	31	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			



MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	2023	BASELINE	PROYEKSI		
							2025	2045		
			Pangan	terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		a). Ketahanan Energi				
						- Konsumsi listrik per kapita	680,39	745,81	1400	
						b). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	15,94	15,21	9,51	
						c) Ketahanan Air				
						- Kapasitas air baku (m3/detik)	0,1445	0,18	0,99	
						- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	76,60	78,72	100,00	
		NB.17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	32	Indeks Risiko Bencana (IRBi)	112,40	110,36	90,00	
							Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.			
								Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	33	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
				a) Kumulatif	n.a	6,57	7,92			
				b) Tahunan	n.a	10,35	11,70			

5.3. ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN

Dengan mengacu pada dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna menjadi bagian strategis dalam pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan kerangka pengembangan wilayah yang telah ditetapkan maka Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau memiliki tema besar “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Permata Biru Ekonomi menggambarkan potensi kekayaan maritim yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau begitu juga dengan Kabupaten Natuna. Dengan cita-cita dan harapan yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna mendukung dalam pembangunan potensi-potensi ekonomi khususnya pada sektor perikanan, pertambangan, industri dan pariwisata. Dengan memahami transformasi yang akan dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Kabupaten Natuna mendukung dalam pengembangan wilayah Natuna yaitu diawali dengan agenda pembangunan penguatan layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti Pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur Teknologi Informatika (TIK) untuk mendukung digitalisasi,

Kemudian pada pengembangan sektor ekonomi, pengembangan potensi pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi pilar-pilar utama di wilayah Natuna. Pariwisata alam memerlukan pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alam bawah laut, topografi wilayah, keanekaragaman hayati, serta keunikan budaya lokal. Kabupaten Natuna secara khusus memiliki geopark Tanjung Datuk, yang potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu UNESCO Global Geopark. Dalam mengoptimalkan potensi destinasi-destinasi pariwisata tersebut, fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan seperti akomodasi ramah lingkungan dan pusat informasi turis perlu dibangun, bersamaan dengan pelatihan bagi pemandu wisata lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyajikan pengalaman yang autentik kepada wisatawan, khususnya wisata bahari yang berkelanjutan. Optimalisasi potensi ekonomi biru, sebagai pilar lainnya dari perekonomian wilayah perlu diperkuat dari sisi hulu maupun hilir serta didukung oleh pengembangan riset terkait potensi ekonomi biru. Di sisi hulu, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta kegiatan pertambangan minyak dan gas serta mineral dan batubara perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi modern dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Dengan segala potensi produk unggulan daerah perlu adanya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan hilirisasi produk-produk sektor primer tersebut menjadi kunci, di mana industri pengolahan ikan dan galangan kapal dapat didirikan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung ekonomi maritim. Industri teknologi tinggi, khususnya yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi gas alam, juga harus diperhatikan untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan produk dan wisata halal dapat menjadi peluang pasar baru yang menjanjikan, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipercepat peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi pariwisata, perikanan, dan industri kemaritiman. Selain pengembangan

ekonomi intra wilayah Natuna, posisi strategis Natuna sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan, membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan. Optimalisasi potensi ini harus diiringi dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memahami posisi dan potensi Kabupaten Natuna, pada prinsipnya Kabupaten Natuna diorientasikan sebagai kawasan perbatasan internasional yang memiliki nilai geopolitis simpul transportasi energi bagi kepentingan kerjasama internasional. Namun, ditinjau dari arahan pengembangan secara meso dan mikro, maka Kabupaten Natuna secara spasial diarahkan sebagai pusat pengembangan Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri. Pusat pertumbuhan dengan karakteristik pelayanan, perdagangan dan simpul jasa juga diarahkan di Kawasan Perkotaan Ranai yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur. Adapun secara strategi prioritas pengembangan sektor ekonomi berdasarkan daya dukung spasial bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan hutan produksi
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat
- d. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan
- e. Mengembangkan industri pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja
- f. Mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata

Penguatan terhadap kedudukan normatif Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Natuna ditinjau dari penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 9 tahun 2018 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kabupaten Natuna. Penguatan ini selaras dengan kondisi empiris dan perencanaan spasial Kabupaten Natuna. Adanya KSCT dimaksudkan agar prioritas pengembangan pusat pertumbuhan potensial di Kabupaten Natuna diselenggarakan sesuai dengan potensi kewilayahan dan unggulan setiap kawasan dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya spesifik. Adapun penjabaran Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Natuna meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Ranai
2. Kawasan Minapolitan
3. Kawasan Agropolitan
4. Kawasan Peternakan
5. Kawasan Sentra Budidaya Perikanan
6. Kawasan Pariwisata
7. Kawasan Industri

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab penutup RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 ini berisikan kaidah pelaksanaan, manajemen risiko, kerangka pengendalian dan pembiayaan pembangunan daerah dengan penjabaran sebagai berikut.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJP Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Kepala daerah terpilih (Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Natuna) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJP Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
4. Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Natuna sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna.
5. Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Natuna serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi

dengan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.

6. Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna oleh Bappeda Kabupaten Natuna. Terkait manajemen risiko ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
7. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani.
8. Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RKPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Natuna mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Natuna digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyusun RPJMD Teknokratik. Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Natuna diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Natuna sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046 Pemerintah Kabupaten Natuna berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokumen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

6.2 Manajemen Risiko

Dalam penyusunan RPJPD memerlukan kesadaran tinggi atas manajemen resiko, sebagai Upaya mitigasi dalam kegagalan pembangunan daerah. Penyelenggaraan manajemen risiko sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan daerah, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kegagalan yang kemungkinan terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa

cara salah satunya peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dalam penerapan manajemen risiko, perlu adanya upaya untuk mengubah atau menyempurnakan berbagai regulasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan RPJPD.

6.3 Kerangka Pengendalian

Pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Melalui mekanisme pengendalian yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif dan efisien, serta proyek-proyek berjalan sesuai dengan target waktu dan kualitas yang ditetapkan. Ini juga berfungsi untuk mencegah penyimpangan dari rencana yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah juga sangat penting untuk menjaga kesinambungan antara kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Konsistensi ini dapat tercapai melalui sinkronisasi antara dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan menjaga konsistensi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan terarah dan berkelanjutan, tanpa adanya perubahan drastis yang dapat mengganggu prioritas dan capaian pembangunan. Selain itu, konsistensi ini membantu menjaga sinergi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

6.4 Pembiayaan Pembangunan

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pembiayaan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun sumber-sumber eksternal lainnya seperti investasi dan hibah dari pihak swasta atau internasional. Penguatan regulasi yang memungkinkan pemanfaatan aset daerah secara optimal juga merupakan upaya untuk memperluas kapasitas pembiayaan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi, tetapi juga mampu menggali potensi lain yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, inovasi dalam skema pembiayaan juga menjadi salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kapasitas keuangan sektor publik. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan adalah skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (*Public-Private Partnership/PPP*) yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, penerapan obligasi daerah, green bonds, atau skema pembiayaan berbasis kinerja juga dapat menjadi pilihan untuk memperluas sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas keuangan, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam rangka mendorong perluasan pembiayaan pembangunan daerah, maka peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan daerah. Dengan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*). Kemudian perluasan kerjasama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya. Selanjutnya penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi. Hal ini didukung dengan optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Keberhasilan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten Natuna. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.

BUPATI NATUNA

Wan Siswandi